

HUMAS & DILEMA GEPENG
Analisis Fungsi Kehumasan Dinas Sosial Dalam Implementasi
Program Penanggulangan Gepeng (Gelandangan dan Pengemis)
Di Kota Yogyakarta



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

WIDYANITA MUSTIKA PUTRI

12321062

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2017

Skripsi

HUMAS & DILEMA GEPENG

**Analisis Fungsi Kehumasan Dinas Sosial Dalam Implementasi
Program Penanggulangan Gepeng (Gelandangan dan Pengemis)
Di Kota Yogyakarta**

Disusun Oleh:

WIDYANITA MUSTIKA PUTRI

12321062

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan di
hadapan tim penguji skripsi.

Tanggal: 28 JUL 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,



Ali Minanto, S.Sos, M.A.

NIDN 0510038001

Skripsi

HUMAS & DILEMA GEPENG

**Analisis Fungsi Kehumasan Dinas Sosial Dalam Implementasi
Program Penanggulangan Gepeng (Gelandangan dan Pengemis)
Di Kota Yogyakarta**

Disusun Oleh:

**WIDYANITA MUSTIKA PUTRI
12321062**

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Program Studi
Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam

Indonesia

Tanggal: 29 JUL 2017

Dewan Penguji:

1. Ketua

Ali Minanto, S.Sos, M.A.

NIDN 0510033001

2. Anggota

Mutia Dewi, S.Sos, M.Ikom

NIDN 0520028302

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Muzayin Nazaruddin, S.Sos, M.A.

NIDN 0516087901

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Widyanita Mustika Putri

NIM : 12321062

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi oleh Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta,



Widyanita Mustika Putri

NIM. 12321062

MOTTO

Life as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. –
Mahatma Gandhi-

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. - Evelyn Underhill –

Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. -Khalifah Umar-

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

*Bapak Budi Pristiwiyono dan Ibu Hermyan , orang tua
tersayang serta Larasati Aulia Putri, Yoga Adi Putra, Satya Ragasa Putra,
Adinda Reihana Putri. Keluarga terbaik yang saya punya. Untuk semua rasa
lelah, tawa, bahagia saya persembahkan sedikit perjuangan yang tak seberapa
untuk memberi warna yang berbeda.*

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Fungsi Kehumasan Dinas Sosial Dalam Implementasi Program Penanggulangan Gepeng Di Wilayah Kota Yogyakarta. Shalawat serta salam tak lupa peneliti junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman yang telah membawa dan menyebarkan ajaran Islam sebagai *rahmatan lil' alamin*.

Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Kantor PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan lingkungan masyarakat di wilayah kota Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan mencoba memandang dari sudut keilmuan yang selama ini telah dipelajari dari perkuliahan di program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Indonesia Februari 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

Atas selesainya penyusunan Skripsi ini, diucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Ali Minanto S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar mendidik dan membimbing peneliti selama proses penelitian berlangsung.
2. Bapak Muzayin Nazaruddin, S.Sos, M.A. sebagai ketua program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini. Serta kepada seluruh dosen dan staf program studi ilmu komunikasi yang telah memberikan banyak ilmu, bantuan, bimbingan selama ini.
3. Ibu Nanik sebagai Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta, dan Mbak Suheni staff RPS Dinas Sosial kota Yogyakarta, Pak Oka Mahendra sebagai Kabid Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Pak Kasmat Ketua PSM kota Yogyakarta, Pak Mugi Rahayu Ketua Paguyuban warga Kitren Kotagede. Mereka yang bersedia menjadi narasumber penelitian atas segala informasi dan bantuan yang diberikan.

4. Bapak Ir. Budi Pristiwiyono dan Ibu Hermyan sebagai orang tua peneliti. Beribu-ribu untaian terima kasih belum sanggup menggambarkan rasa terima kasih atas segala dukungan, doa yang tulus, kasih sayang, motivasi yang selalu diberikan menjadi kekuatan terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga Palem Indah, Ibu Sri Teguh H. Pak Rudolf Michael, Mas Sigit, Mba Okta, Mba Dewi, Mba Wulan, Mas Guruh. Terima kasih sebesar-besarnya atas doa, kasih sayang yang tulus, motivasi, kritik dan saran yang selalu mendorong peneliti untuk menyelesaikan tanggung jawab ini.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, “Geng Gobal-Gabul” Bella Norma, Galuh Sekar, Riza Ardita, Giovani, Aghnia Kaulika, Laras, Haqkohati, Andhita Sekar. Kritik pedas, saran, cinta, motivasi kalian selalu menjadi yang terbaik dalam membentuk peneliti menjadi orang yang lebih baik.
7. Teman-teman kkn unit 243, Rahman, Indah, Siti, Rifai, terima kasih atas dukungan dan doa selama ini. Galih Maghribi, Rizky Moh Dillon terima kasih telah mewarnai perjalanan selama menempuh pendidikan melalui, motivasi, kritik, pengalaman menarik selama ini, semoga kesuksesan dapat segera tercapai.
Akhirnya skripsi ini selesai dibuat semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Mei 2017

Penulis,

Widyanita Mustika Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB	
I DILEMA GEPENG (Pekerja Rumah Untuk Dinas Sosial	
Kota Yogyakarta.....	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Penelitian Terdahulu	7
2. Kerangka Pemikiran	19
1.6. Metode Penelitian	19
1. Paradigma dan Pendekatan	19
2. Objek dan Lokasi Penelitian	20
3. Narasumber Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan	23
II MENGENAL DINAS SOSIAL KOTA YOGYAKARTA	25
A. Yogyakarta: Potret Daerah Istimewa.....	26
B. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	28
1. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.....	29
2. Struktur Organisasi	33

III	MENELISIK FUNGSI KEHUMASAN DINAS SOSIAL DALAM PERDA GEPENG	34
	A. Dinas Sosial Sebagai Komunikator.....	36
	1. Melaksanakan Upaya Preventif	36
	2. Penggunaan Media Untuk Sosialisasi	41
	B. Dinas Sosial Sebagai Mediator	52
	C. Dinas Sosial Sebagai Organisator	57
	1. Pelaksanaan Razia Terhadap Gepeng	57
	2. Pelatihan Terhadap Gepeng.....	62
	3. Pembinaan Terhadap Gepeng.....	57
IV	MENIMBANG PELUANG DAN HAMBATAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN GEPENG.....	78
	A. Gepeng: Potret Buram Di Daerah Istimewa.....	78
	B. Fungsi Dinas Sosial dalam Penanganan Gepeng di Wilayah Kota Yogyakarta	80
	a. Fungsi Humas Sebagai Komunikator Dalam Penanganan Gepeng Di Kota Yogyakarta	83
	b. Fungsi Humas Sebagai Mediator Dalam Penanganan Gepeng Di Kota Yogyakarta	90
	c. Fungsi Humas Sebagai Organisator Dalam Penanganan Gepeng Di Kota Yogyakarta.....	91
	C. Analisis SWOT Program Penanggulangan Gepeng di Kota Yogyakarta	92
V	HUMAS & DILEMA GEPENG: Simpulan dan Saran.....	101
	A. Kesimpulan	101
	B. Keterbatasan Penelitian.....	102
	C. Saran	102
	DAFTAR PUSTAKA	103
	LAMPIRAN	1

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Perda Gepeng Yang Disosialisasikan	5
1.2. Matriks SWOT (Rangkuti, Freedy, 2006)	18
2.1. Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	28
2.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ..	33
3.1. Papan Himbauan Perda Gepeng	42
3.2. Papan Himbauan Perda Gepeng	43
3.3. Poster Penanganan Gelandan dan Pengemis	45
3.4. Leaflet Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta.....	46
3.5. Leaflet Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta.....	47
3.6. Berita terkait Perda Gepeng di Harian Kedaulatan Rakyat	49
3.7. Website Dinas Sosial Provinsi DIY	51
3.8. Website Dinas Sosial Kota Yogyakarta.....	51
3.9. Proses Penanganan Gepeng oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dan Pihak Kepolisian	58
3.10. Gepeng Berkumpul Setelah diamankan.....	58
3.11. Gepeng Masuk Mobil ke Patroli.....	59
3.12. Aksi Penolakan Perda Gepeng.....	75
3.13. Aksi Penolakan Perda Gepeng	75
3.14. Konfresnsi Press Ponalakan Perda Gepeng	76

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Narasumber Penelitian.....	35
4.1. SWOT Penanggulangan Gepeng di Kota Yogyakarta	92



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Bukti Penelitian
Interview Guide
Transkrip Wawancara
Foto/ Dokumentasi

ABSTRAK

Widyanita Mustika Putri. 12321062. *Humas & Gepeng, Analisis Fungsi Kehumasan Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam Implementasi Program Penanggulangan Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) di Wilayah Kota Yogyakarta. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2017.*

Keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta semakin meningkat dan perlu penanganan yang tepat. Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gepeng sebagai payung hukum dalam menangani gelandangan dan pengemis. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah setelah terbit Peraturan Daerah adalah sosialisasi dan penanganan gepeng oleh Dinas Sosial. Tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisis fungsi kehumasan Dinas Sosial dalam implementasi penanggulangan masalah gepeng di wilayah Kota Yogyakarta; 2) Menganalisis peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam implementasi program penanggulangan gepeng di Kota Yogyakarta.

Paradigma penelitian ini adalah konstruktif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Fungsi Kehumasan Dinas Sosial dalam implementasi penanganan masalah gepeng di wilayah Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan a) Upaya preventif dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat; b) Sosialisasi melalui media; c) Razia gabungan; d) Pendekatan personal, pelatihan dan pembinaan. 2) Peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam implementasi program penanganan gepeng di Kota Yogyakarta yaitu peluang diantaranya kerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), perusahaan swasta melalui CSR, pelaku industri kreatif. Hambatan yang ditemui antara lain a) Kebiasaan dari gepeng yang hidup di jalanan dan sulit untuk diberikan arahan, pengertian; b) Gepeng lari dari kejaran petugas; c) Hambatan dari pekerjaan itu sendiri; d) Kesadaran gepeng masih rendah; e) Kesadaran dari masyarakat untuk membantu cukup tinggi; f) Adanya Perlawanan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang pro terhadap gepeng

Kata Kunci: *Fungsi Kehumasan, Dinas Sosial, Penanganan Gepeng.*

ABSTRACT

Widyanita Mustika Putri. 12321062. Public Relations & Homeless and Beggars, Analysis of Function of Public Relations Department of Social in Implementation Prevention Program for Homeless and Beggars in the Region of Yogyakarta. Undergraduate Thesis. Department of Communication. Faculty of Psychology and Socio-Cultural Studies. Islamic University of Indonesia. 2017.

The existence of homeless and beggars in the city of Yogyakarta is increasing and needs proper handling. Government publishes Regional Regulation No. 1/2014 on the handling homeless and beggars as a legal in addressing homeless and beggars. The efforts made by the government after Regulation socialization and handling area is flattened by the Department of Social. The purpose of this study is 1) Analyze the function of Department of Social in the implementation of overcoming the problem of homeless and beggars in the city of Yogyakarta; 2) Analyze the opportunities and constraints faced by the Department of Social s in the implementation of prevention programs for homeless and beggars of the city of Yogyakarta.

The paradigm of this research is a constructive approach to qualitative research. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Technique data analysis was done descriptively by step data reduction, data presentation and conclusion.

The results showed that 1) The function of Department of Social to handling homeless and beggars in the city of Yogyakarta carried out by a) preventive efforts with direct dissemination to the public; b) the information through the media; c) Arrest together; d) personal approach, training and coaching. 2) Opportunities and barriers faced by the Social Service in the implementation of the handling of sprawl in the city of Yogyakarta that such opportunities of cooperation with NGOs (Non Government Organization), private companies through Corporate Social Responsibility, creative industries. Obstacles encountered include a) habit of homeless and beggars who live on the streets and it is difficult to give referrals, understanding; b) Homeless and beggars run from the pursuing officers; c) The resistance of the work itself; d) Awareness homeless and beggars is still low; e) Awareness of the community to help is quite high; f) The existence of Resistance of NGOs pro- homeless and beggars.

Keywords: *Functions of Public Relations, Social Services, Handling homeless and beggars*

Mengapa pengemis di rendahkan? Aku yakin alasannya sangat sederhana yaitu karena mereka gagal hidup layak. Dalam prakteknya, orang tidak peduli apakah suatu pekerjaan itu berguna atau tidak, produktif atau bersifat parasit. Miris ketika uang menjadi alat ukur utama moralitas. Dengan ukuran ini mereka gagal dan karenanya mereka direndahkan. Seorang pengemis dilihat secara realistis, adalah sekedar seorang pengusaha yang mencoba bertahan hidup dengan cara menggunakan tangannya. Dia tidak pernah menjual kehormatannya, lebih dari kebanyakan orang modern, dia hanya memilih usaha yang tidak memberinya kemungkinan untuk menjadi kaya.

*George Orwell, Down
and Out in Paris and London*

BAB I
DILEMA GEPENG
Pekerjaan Rumah Dinas Sosial Kota Yogyakarta

A. Latar Belakang

Percepatan pembangunan di kota-kota besar tampaknya menimbulkan dampak positif dan negatif yang semakin sulit dihindari. Keberhasilan pembangunan di perkotaan, dan lambatnya pembangunan di pedesaan mengundang derasnya arus imigrasi dari desa menuju kota. Derasnya arus imigrasi desa ke kota berbanding terbalik dengan sulitnya memperoleh pekerjaan dan tempat bermukim di wilayah perkotaan dan pedesaan, yang antara lain dapat memunculkan gepeng. Istilah “gepeng” merupakan singkatan dari kata gelandangan dan pengemis. Mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap dan tinggal di tempat-tempat yang tidak lazim seperti di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

Menurut Departemen Sosial R.I (1992), gelandangan adalah orang-orang yang hidup mengembara di tempat-tempat umum, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan tidak memiliki tempat tinggal pada suatu daerah,serta menjalani hidup yang tidak layak, tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Pengemis adalah orang-orang yang sengaja memanfaatkan belas kasihan dari orang lain dengan berbagai alasan untuk mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum.

Menurut Muthalib dan Sudjarwo (dalam Iqbali, 2005: 3) diberikan tiga gambaran umum tentang gelandangan seperti dalam kutipan berikut.

Pertama, sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya. *Kedua*, orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai. *Ketiga*, orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan

keterasingan. Mengutip definisi operasional Sensus Penduduk (dalam Iqbali, 2005:3) maka gelandangan terbatas pada mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, atau tempat tinggal tetapnya tidak berada pada wilayah pencacahan. Karena wilayah pencacahan telah habis membagi tempat hunian rumah tinggal yang lazim maka yang dimaksud dengan gelandangan dalam hal ini adalah orang-orang yang bermukim pada daerah yang bukan tempat tinggal, tetapi merupakan konsentrasi hunian seperti dibawah jembatan, pinggiran sungai, emperan toko, taman, pasar, sepanjang rel kereta api, dan hunian konsentrasi gelandangan yang lainnya.

Gepeng menjadi masalah yang akrab dengan masyarakat yang terhimpit ekonomi akibat sempitnya lapangan kerja, sumber daya alam yang kurang menguntungkan dan lemahnya sumber daya manusia yang terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu factor individual dari gepeng yang kebanyakan dari mereka malas untuk mencari pekerjaan mereka lebih memilih menjadikan gepeng sebagai profesi. Hanya bermodalkan pakaian dan alat music seadanya kemudian memanfaatkan pusat-pusat keramaian kota untuk mendapatkan penghasilan mereka dapat memperoleh penghasilan yang lebih dibandingkan menjadi buruh. Hal ini jika terus dibiarkan tentunya akan menjadi sebuah masalah bagi daerah-daerah perkotaan.

Sebagai salah satu kota dengan keberhasilan pembangunan, Yogyakarta tak terhindarkan dari masalah gepeng. Yogyakarta menjadi salah satu kota yang masih dianggap nyaman bagi para gepeng untuk bertahan hidup. Fasilitas-fasilitas kotaseperti jembatan layang, stasiun, terminal, rel kereta api dijadikan para gepeng sebagai lahan untuk menetap. Sementara keramaian kota dan lalu lintas dijadikan para gepeng sebagai lahan mencari materi. Pada januari 2015 jumlah gepeng di kota Yogyakarta sekitar 600 orang meningkat dari tahun sebelumnya. Banyak wajah-wajah baru yang menjadi gepeng di kota Yogyakarta (<http://daerah.sindonews.com/> diakses 28 januari 2015). Hal ini membuktikan bahwa tak hanya gepeng lokal, namun gepeng dari luar kota juga banyak yang berdatangan mencari penghidupan di kota Yogyakarta. Permasalahan gepeng merupakan salah satu masalah yang sulit ditangani dari tahun ke tahun, dengan jumlah gepeng yang terus meningkat.

Hasil observasi penulis di kota Yogyakarta banyak gepeng yang turun kejalan. Terutama di tempat tempat yang menjadi obyek wisata seperti kawasan Malioboro, Tugu, Benteng dan sebagainya. Tentunya hal ini menjadi potret buruk Kota Yogyakarta sebagai kota Pariwisata. Selain itu kehadiran gepeng sebagai bentuk kesenjangan sosial masyarakat yang belum sejahtera. Melihat permasalahan fenomena gepeng, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No 1/2014 tentang Penanganan Gepeng. Perda ini berisi sanksi hukuman bagi gelandangan dan pengemis dan warga yang memberikan bantuan uang atau barang dalam bentuk apapun. Perda gepeng akan intensif dilakukan pada 2015, sebagai bentuk penegakkan Peraturan Daerah (Perda) No 1/2014 tentang Penanganan Gepeng.

Pelaksanaan Perda gepeng di wilayah kota Yogyakarta di jalankan oleh bidang RPS dari Dinas Sosial. Penyelenggarannya dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat dan gepeng tentang Perda gepeng dengan banyak cara seperti memasang papan himbauhan di titik-titik rawan gelandangan dan pengemis. Memanfaatkan media cetak salah satunya membagikan selabaran yang berisi tentang Perda gepeng kepada masyarakat wilayah rawan gepeng seperti Malioboro, Tugu, Benteng. Mengadakan pertemuan dengan komunitas dan relawan. Tujuannya memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya terkait Perda gepeng yang berlaku tanpa harus di bawah ke ranah hukum. Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan Satpol PP dalam mensosialisasikan tetang ancaman pidana dan denda terakait gepeng.

Ancaman Pidana dan Denda Terkait Gelandangan dan Pengemis		
Jenis Pelanggaran	Pidana	Denda
Gepeng Perorangan	6 Minggu	Rp 10 juta
Pemberi Uang/Barang	10 hari	Rp 1 juta
Gepeng Berkelompok	3 bulan	Rp 20 juta
Memperalat Orang Lain	1 tahun	Rp 50 juta
Mendatangkan Gepeng	1 tahun	Rp 50 juta
Mengkoordinir Gepeng	6 bulan	Rp 40 juta

Sumber: Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014

Gambar 1.1

Perda Gepeng yang di sosialisasikan.

Sumber: Dokumen Dinas Sosial Kota Yogyakarta

Selanjutnya Dinas Sosial intens melakukan razia dan penertiban gepeng di wilayah kota Yogyakarta dengan berkoordinasi dengan Dinas Ketertiban, Kepolisian, dan PSM. Setiap bulannya Dinas Sosial dan beberapa Dinas terkait memiliki agenda rutin mengadakan tiga sampai empat kali razia gelandangan dan pengemis khususnya di wilayah kota Yogyakarta. Sebagai agenda rutin pada pada 7 april 2015, sekitar pukul 20:00 WIB diadakan razia gepeng dengan mengerahkan Satpol PP yang berkoodinasi dengan pihak Polestra dan Dinas Sosial Yogyakarta (<http://jogja.tribunnews.com/2015/04/07/satpol-pp-kota-yogyakarta-gelar-razia-gepeng-malam-hari> diakses 29 april 2015). Titik lokasi tersebar di wilayah kota madya, antara lain di jalan Kyai Mojo, Alun-alun Selatan, Hos Cokroaminoto, dan Mangkubumi.

Selanjutnya Dinas Sosial mengadakan pembinaan dan pelatihan bagi gepeng yang terjaring razia dengan dibawa ke panti Sosial Bina Karya (PBSK) untuk diberi pembinaan agar mentalnya tidak mau menjadi gelandang lagi. Namun tindakan binaan yang dilakukan selama ini ternyata belum cukup efektif untuk membuat para gepeng berhenti menggelandang. Para gepeng justru tidak jera untuk kembali menggelandang, Mental mereka betah menjadi gelandang. Terbukti dengan angka pertumbuhan gepeng yang meningkat di kota Yogyakarta.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial dalam pelaksanaan perda gepeng di wilayah kota Yogyakarta penulis tertarik melakukan penelitian terkait dengan analisis fungsi kehumasan Dinas Sosial dalam implementasi program penanggulangan gepeng di kota Yogyakarta. Program yang dilakukan sebuah lembaga atau organisasi akan memperoleh hasil yang maksimal jika didukung dengan sumber daya dan strategi yang tepat. Ada banyak kegiatan dan aktivitas yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial kota Yogyakarta kepada masyarakat dalam rangka menyukseskan Perda Gepeng. Kegiatan dan aktivitas yang telah dijalankan Dinas Sosial selama ini tidak lain menjalankan fungsi kehumasan seperti sosialisasi, penertiban, pembinaan dan pelatihan, dan koordinasi dengan Dinas terkait. Strategi yang tepat diperlukan Dinas Sosial kota Yogyakarta dalam menyukseskan Perda Gepeng Dinas Sosial kota Yogyakarta. Dinas Sosial dapat menggunakan pendekatan SWOT untuk menganalisis peluang dan hambatan yang dimiliki yang kedepannya dapat menjadi bahan acuan perencanaan strategi dalam implementasi program penanggulangan gepeng.

Hal tersebutlah yang ingin peneliti ketahui melalui penelitian mengenai analisis fungsi kehumasan Dinas Sosial dalam implementasi program penanggulangan gepeng di Kota Yogyakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang timbul, yaitu :

1. Bagaimanakah fungsi kehumasan Dinas Sosial dalam implementasi penanggulangan masalah gepeng di wilayah kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam implementasi program penanggulangan gepeng di kota Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memaparkan fungsi kehumasan Dinas Sosial dalam implementasi program penanggulangan masalah gepeng dikota Yogyakarta.
2. Menganalisis sejauh mana fungsi kehumasan Dinas Sosial dalam implementasi program penanggulangan gepeng di kota Yogyakarta.
3. Memaparkan peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam impelmentasi program penanggulangan gepeng di kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ditinjau secara akademis dan praktis adalah:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini kedepannya dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian-penelitian yang bertema serupa.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil analisis terhadap peluang dan hambatan yang dimiliki Dinas Sosial dengan menggunakan analisis SWOT.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Analisis Fungsi Komunikasi Kehumasan Dinas Sosial Dalam Implementasi Program Penanggulangan Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) di Wilayah Kota Yogyakarta” ini bukanlah yang pertama membahas implementasi fungsi-fungsi kehumasan. Ada beberapa jurnal komunikasi yang telah melakukan penelitian mengenai implementasi fungsi-fungsi kehumasan.

Jurnal pertama berjudul “Peran Humas Pemerintah Kabupaten Sragen dalam Pengelolaan Isi Informasi *Website* Pemda sebagai Media *Communications Relations* dengan Masyarakat” oleh Meilyna Diah Anggrahini, Christina Rochayanti, dan Edwi Arief Sosiawan pada tahun

2008. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis peran humas pemerintah daerah Kabupaten Sragen dalam pengelolaan konten informasi dalam situs Pemerintah Daerah sebagai hubungan komunikasi dengan masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi literat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen memiliki peran dalam manajemen organisasi dalam proses pengelolaan konten informasi tentang semua kebijakan, program yang terdapat dalam website Pemerintah Daerah.

Jurnal kedua berjudul “Peran Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintah” oleh Evawani Elsy Lubis pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam membentuk citra positif Pemerintah Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari para informan dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2005 belum dilaksanakan secara optimal karena pencapaian informasi cenderung satu arah.

Jurnal ketiga berjudul “Optimalisasi Fungsi Humas Pemerintah *The Optomization Of Government Publik Relation Function*” oleh Anwar Sani pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pemahaman para pejabat kehumasan di lingkungan Kemendagri terhadap Permendagri No 13 Tahun 2011 dan implementasi Permendagri No 13 Tahun 2011 oleh pejabat kehumasan Kemendagri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial atas realitas dan interaksi simbolik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pejabat Humas Kemendagri memahami Permendagri 13/2011 sebagai regulasi yang mendorong Humas Kemendagri untuk meningkatkan

profesionalismenya dan merupakan upaya untuk mendorong partisipasi aktif publik. Sementara dalam implementasi Permendagri 13/2011 ditemukan beberapa latar belakang lahirnya Permendagri 13/2011, terdapat upaya sosialisasi Permendagri 13/2011, dampak, kendala serta solusi terkait implementasi Permendagri 13/2011 dan empat aktivitas kehumasan utama Kemendagri yaitu layanan informasi publik, pameran publik, analisis isi media dan manajemen krisis.

Jurnal keempat berjudul “Penerapan Evaluasi Kegiatan *Media Relations* Oleh Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah kota Surabaya” oleh Yohana Amelia Lumindong pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang penerapan evaluasi kegiatan media relations (MR) oleh Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya. Tinjauan pustaka yang digunakan adalah Kegiatan MR dalam Instansi Pemerintah, Evaluasi Kegiatan MR dalam Instansi Pemerintah, Lingkup Evaluasi Kegiatan MR dalam Instansi Pemerintah, dan Metode Evaluasi Kegiatan MR dalam Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan. Hasil penelitian ini adalah bagian humas menerapkan evaluasi secara tidak komprehensif, yaitu hanya menghitung output saja. Dengan kata lain, Bagian Humas masih melihat kegiatan media relations sebagai hubungan yang terbatas antara humas dengan media massa saja.

Jurnal kelima berjudul “Peran dan Posisi Hubungan Masyarakat Sebagai Fungsi Manajemen Perguruan Tinggi Negeri di Semarang” oleh Yanuar Luqman pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan posisi hubungan masyarakat (humas) dalam manajemen di institusi pendidikan dalam hal ini universitas dalam mencapai tujuan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian adalah Humas Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang beserta stakeholder internal. Hasil penelitian ini menunjukkan peran humas di Universitas Negeri cenderung bertindak sebagai *communication technician* dan hanya sedikit berperan sebagai *communication facilitator*. Posisi humas

di Universitas Negeri berada posisi yang marginal terbukti dengan masih banyak jenjang birokrasi yang harus dilalui dalam melaksanakan fungsinya. Kinerja humas berkaitan dengan peran dan posisinya pada penelitian ini dinilai positif dan sesuai dengan porsi kerja.

Jurnal keenam berjudul “Pergeseran Budaya Mengemis di Masyarakat Desa Pragaan Daya Sumenep Madura” oleh M. Ali Huamidy pada tahun 2005. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi paradigma masyarakat di desa Pragaan Madura dalam hal tradisi mengemis di komunitasnya. Berupaya menjawab tiga persoalan pertama, yakni persepsi masyarakat terhadap tradisi mengemis, proses internalisasi dan sosialisasi terhadap generasi mereka, serta strategi mengemis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan etnografi dengan subyek masyarakat desa Pragaan Sumenep Madura. Hasil penelitian ini menemukan bahwa orang-orang Pragaan Daya menganggap menjadi pengemis tidak melawan hukum dan bukan sebuah profesi hina. Dalam pandangan mereka mengemis telah menjadi mata pencaharian yang menutupi kebutuhan hidup mereka.

Pada penelitian ini memfokuskan pada fungsi kehumasan Dinas Sosial kota Yogyakarta dalam implementasi Peraturan Daerah tentang gelandangan dan pengemis untuk menganalisis bagaimana fungsi kehumasan yang dijalankan, serta peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian di lapangan terhadap semua pihak yang terkait dalam Perda Gepeng seperti Instansi Pemerintah, LSM, dan masyarakat.

2. Kerangka Pemikiran

a. Urgensi Humas Untuk Lembaga Pemerintah

Istilah humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat yang dapat mencakup individu ataupun organisasi. Humas adalah upaya terencana guna mempengaruhi opini publik melalui karakter yang baik dan kinerja yang bertanggungjawab, berlandaskan terjalinnya komunikasi dua belah pihak dengan

saling memuaskan, Scoot Cutlip dan Allan Center dalam Yosol Iriantara (2004:5).

Fungsi Humas dalam lembaga pemerintah menurut IPRA dalam (Rumanti 2005 :11) adalah sebagai berikut.

Hubungan masyarakat merupakan fungsi manajemen dari sikap budi yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan, yang oleh organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga umum dan pribadi dipergunakan untuk memperoleh dan membina saling pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada sangkut pautnya dan yang di duga ada kaitannya, dengan cara menilai opini publik mereka, dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan, guna mencapai kerjasama yang lebih produktif, dan untuk memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan kegiatan penerangan yang terencana dan tersebar luas.

Humas menurut (Jefkins, 2003:10) menjelaskan bahwa:

Humas adalah suatu bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar antara satu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik berlandaskan pada saling pengertian. Humas menyusun tujuan dan menggunakan metode manajemen yang tepat, untuk mengukur secara jelas semua hasil dan tingkat kemajuan. Humas melekat dengan fungsi manajemen yang dapat diartikan sebagai suatu kinerja yang sudah terencana dalam upaya membentuk opini publik yang baik sehingga timbul citra organisasi yang baik pula dan upaya menjalin hubungan saling pengertian dan berkesinambungan dengan publik.

Sementara humas menurut beberapa pakar lainnya dalam (Hermanto, 2007:7) memiliki definisi yang beragam:

Humas merupakan upaya yang disengaja, direncanakan, dan dilakukan terus menerus untuk membangun dan menjaga adanya saling pengertian antar organisasi dengan publiknya, menurut *Institute of Publik Relation, United Kingdom*. Kemudian, humas merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi perilaku publik, mengidentifikasi

kebijakan dan prosedur organisasi dengan perhatian ke publik dan melaksanakan program tindakan untuk mendapatkan pemahaman dan pengertian publik, menurut Deny Griswold, *Uitgiver van Publik Relation News, New York*. Humas merupakan upaya dengan menggunakan informasi, persuasi, dan penyesuaian untuk menghidupkan dukungan publik atas suatu kegiatan, atau suatu sebab, menurut E.L. Berneys, USA, 1956. J.C. Seidel dan W. Emerson Rech menjelaskan bahwa: Humas adalah proses yang berkesinambungan, seni menanamkan suatu perencanaan dan sebagainya. Humas sebagai jalan penengah atau sebagai jembatan antara organisasi dan publik internal atau eksternal. Fungsi humas adalah memelihara, mengembangkan mempertahankan, adanya komunikasi timbal-balik yang diperlukan dalam menangani, mengatasi problem yang muncul, atau meminimalkan munculnya problem.

Humas dituntut untuk menyadari bahwa masalah ataupun hubungan yang tidak baik dapat diatasi dengan memprioritaskan komunikasi yang baik dan hubungan manusiawi yang benar-benar manusiawi. Hal ini terjadi karena adanya komunikasi yang baik dan menimbulkan adanya saling keterbukaan, artinya kedua belah pihak mengedepankan perkembangan kedepan menjadi lebih baik dan menguntungkan semua pihak, dengan mengakui bila terdapat kesalahan maupun kekeliruan. Fungsi humas yang benar-benar dilakukan dengan baik merupakan instrumen yang ampuh untuk memperbaiki, mengembangkan peraturan, budaya organisasi, lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan yang berkaitan, memotivasi dalam menjalankan rencana hingga mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam konteks urgensi humas untuk lembaga pemerintahan, perlu dipahami humas memegang peranan penting dalam mengatur pola hubungan antara khalayak dengan organisasi. Kemudian membantu masyarakat kompleks dan pluralistik dalam mengambil keputusan dan berfungsi lebih efektif dengan cara berkontribusi pada terciptanya saling pengertian di antara kelompok dan institusi

terkait. Humas sebagai fasilitator dalam sebuah organisasi untuk menemukan titik temu antara organisasi dengan *stakeholdernya*. *Stakeholder* dari sebuah organisasi adalah masyarakat yang termasuk kedalam tanggungjawab organisasi. Dengan begitu, sangat penting untuk humas memiliki keterampilan dalam bidang komunikasi, karena humas dan komunikasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam pemenuhan tugas humas sehari-hari. Keterampilan komunikasi yang baik dapat menjembatani keinginan organisasi dengan keinginan khalayak.

b. Fungsi Dan Tugas Humas

Menurut Assumpta Rumanti (2005:39) ada pun lima tugas pokok humas yang harus dilakukan agar tercipta harmonisasi dalam organisasi:

Pertama, tugas humas adalah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyampaian informasi secara lisan, tertulis, melalui gambar (visual), kepada publik supaya publik mempunyai pengertian yang benar tentang organisasi atau perusahaan, tujuan, serta kegiatan yang dilakukan.

Humas juga harus memanfaatkan berbagai media kehumasan sebagai wadah informasi untuk memudahkan masyarakat dalam memperolehnya. Ada beberapa jenis media Humas, yaitu media pers, audio visual, radio, televisi, pameran, bahan-bahan cetakan, penerbitan buku khusus, surat langsung, pesan-pesan lisan, pemberian sponsor, dan jurnal organisasi.

Kemudian *kedua*, memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum atau masyarakat. *Ketiga*, memperbaiki citra organisasi. Sebagai seorang humas perlu mengetahui citra dari sebuah perusahaan terletak dimana. *Keempat* adalah tanggungjawab sosial. Humas merupakan instrumen untuk bertanggungjawab terhadap semua

kelompok yang berhak terhadap tanggungjawab tersebut. Terutama kelompok publik itu sendiri, lalu publik internal, dan pers. Tugas yang *kelima* adalah komunikasi. Humas merupakan pihak yang memiliki komunikasi tersendiri, yaitu timbal balik. Maka Humas perlu menguasai komunikasi dengan baik agar tercipta suatu komunikasi timbal balik yang efektif dan efisien. Keahlian dalam komunikasi yang dimiliki Humas sangatlah penting untuk membangun relasi dengan pihak lain. Seperti halnya dengan masyarakat, pihak internal organisasi, pihak eksternal organisasi serta pers.

Menurut Onong Uchana Effendi dalam Ruslan (2005:9) dalam konsep sebagai *Officer* ketika menjalankan tugas dan operasionalnya baik sebagai komunikator, mediator, dan organisator terdapat beberapa fungsi:

Pertama, menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. *Kedua*, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan publik eksternal. *Ketiga*, menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. *Keempat*, melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. *Kelima*, Operasionalisasi dan organisasi Public Relations adalah bagaimana membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya, untuk mencegah terjadinya rintangan psikologis, baik yang ditimbulkan dari pihak organisasi maupun dari pihak publiknya.

Tugas utama humas dalam lembaga pemerintahan menurut John D. Millet (dalam Ruslan, 2005:338) yaitu, mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat, kegiatan memberikan nasehat atau

sumbang saran menanggapi suatu hal sebaiknya dilakukan oleh instansi pemerintah seperti yang dikehendaki publiknya.

Menurut Dimock dan Koening dalam Ruslan (2001:108) tugas dan kewajiban humas pemerintahan adalah:

Pertama, berupaya memberikan penerangan Atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan, serta tujuan yang akan dicapai oleh pihak pemerintahan dalam melaksanakan program kerja pembangunan. *Kedua*, mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan, serta mengajak masyarakat berpartisipasi untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, hokum dan politik, turut menjaga stabilitasi dan keamanan dan ketertiban nasional. *Ketiga*, melaksanakan keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing secara konsisten serta professional.

Humas pemerintah mengemban tugas dan kewajiban utama yang saling berkaitan. Humas pemerintah menjadi ujung tombak dalam memberikan informasi seluas-luasnya mengenai peraturan, kebijakan, serta tindakan- tindakan dari lembaga pemerintah. Humaslah yang mengatur lalu-lintas, sirkulasi informasi internal dan eksternal agar berjalan dengan baik sehingga kebijakan, peraturan dan tindakan dari pemerintah dapat dipahami sebagai *publik acceptance* dan *publik support*.

Seorang praktisi humas pemerintahan dituntut memiliki ketrampilan manajerial dan ketrampilan teknis. Ketrampilan manajerial adalah kemampuan praktisi humas dalam mengelola, merencanakan, menjalankan, serta mengontrol manajerial yang dikelolanya. Ketrampilan manajerial praktisi humas pemerintah akan memudahkannya dalam menyusun strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan lembaga.

Effendy (2002:39-40), menjelaskan bahwa:

Tujuan humas pemerintah adalah memberikan penerangan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan sistem pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat menggunakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab sehingga timbul kepuasan publik dan terpupuknya rasa bangga sebagai warga negara.

Dari berbagai pendapat para pakar diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi kehumasan pada lembaga pemerintahan pada dasarnya berupaya menjalin komunikasi dua arah yang berarti mengkomunikasikan segala kegiatan dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Fungsi kehumasan pada konsepnya berlandaskan sebagai komunikator, mediator dan fasilitator. Beberapa kerangka pemikiran di atas menjadi landasan bagi peneliti untuk mengukur fungsi komunikasi kehumasan yang di jalankan oleh Dinas Sosial dalam implementasi program penanggulangan gepeng di wilayah kota Yogyakarta.

c. Analisis SWOT

Jogiyanto (2006:46) menjelaskan bahwa:

Analisis SWOT adalah akronim untuk "*Strengths*" kekuatan, "*Weakness*" kelemahan, "*Oportunities*" peluang dan "*Threats*" ancaman biasa digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan internal perusahaan. SWOT biasa digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari segala sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan eksternal dan segala tantangan yang di hadapi.

Menurut David Fred(2006:8), Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area bisnis. Kekuatan/kelemahan internal, digabungkan dengan peluang/ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang jelas, menjadi dasar untuk penetapan tujuan dan strategi. Tujuan dan

strategi ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan.

Adapun penjelasan dari SWOT menurut David, Fred R. (2006:47):

Pertama, kekuatan (*Strengths*) merupakan sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar. *Kedua*, kelemahan (*Weakness*) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen dan keterampilan pemasaran dapat meruoakan sumber dari kelemahan perusahaan.

Ketiga, peluang (*Opportunities*) adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan – kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang, seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. *Keempat*, ancaman (*Threats*) adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan – peraturan pemerintah yang baru dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan perusahaan.

1). Matriks SWOT

Menurut Rangkuti (2006:19), Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis.

IFAS EFAS	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Peluang (<i>Opportunity</i>)	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman (<i>Threats</i>)	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Gambar 1.2

Sumber: Matriks SWOT(Freedy Rangkuti 2006)

Berikut ini adalah keterangan dari matriks SWOT diatas menurut Rangkuti (2006:21):

Strategi SO (Strength and Oppurtunity). Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar – besarnya

Strategi ST (Strength and Threats). Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

Strategi WO (Weakness and Oppurtunity). Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada

Strategi WT (Weakness and Threats). Strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Dengan menggunakan analisis SWOT peneliti dapat mengukur peluang dan hambatan serta strategi yang dapat meminimalisir hambatan serta memaksimalkan peluang yang ada pada implementasi program penanggulangan gepeng di wilayah kota Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang ada. Penulis menganalisa dan menuliskannya sesuai dengan apa yang dilihat lewat observasi dan juga apa yang didapat lewat wawancara dan dokumen-dokumen yang didapat Salim (2006:34).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi bentuk kata-kata dalam bahasa, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah menurut Meolong (2006:7). Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap humas dan dilemma gepeng, analisis fungsi kehumasan Dinas Sosial dalam implementasi program penanggulangan gepeng di Kota Yogyakarta.

2. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Bidang RPS Dinas Sosial kota Yogyakarta, yang berlokasi di jalan kenari No 56, Umbulharjo, kompleks balaikota Yogyakarta.

3. Narasumber Penelitian

Narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan Perda Gepeng dan representative dalam penelitian ini yaitu:

1. Ibu Nanik selaku Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta

2. Ibu Suheni selaku staf RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta
3. Pak Kasmat selaku ketua PSM Kota Yogyakarta
4. Bapak Mugi Rahayu selaku ketua paguyuban warga Kitremn Kotagede
5. Bapak Oka Mahendra selaku Kabid Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

a. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini antara lain dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah kata-kata atau pernyataan, tindakan serta kebijakan yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi. Wawancara dan pertanyaan yang bersifat *open ended* karena peneliti bertanya secara langsung kepada narasumber. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah:

a) Wawancara

Wawancara menurut Bungin (2008:108) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian secara langsung dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman dan spontan guna memahami tentang persoalan fokus penelitian dari fungsi-fungsi komunikasi kehumasan Dinas Sosial kota Yogyakarta dalam implementasi program penanggulangan gepeng kepada lima narasumber yaitu: Ibu Nanik selaku kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Ibu Suheni selaku staf RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Pak Kasmat selaku ketua

PSM Kota Yogyakarta. Bapak Mugi Rahayu selaku ketua paguyuban warga Kitremn Kotagede. Bapak Oka Mahendra selaku Kabid Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

b) Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang terjadi dalam proses penelitian. Penulis melakukan observasi dengan sebatas meninjau dan mengamati objek.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data untuk menelusuri data atau informasi yang disimpan atau didokumentasikan (narasumber). Dokumen dalam penelitian ini adalah data dari Dinas Sosial dan dokumentasi pribadi penulis.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang digunakan peneliti untuk melengkapi atau mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, situs internet, skripsi dan sumber data lain, dan dokumen tertulis yang mendukung penelitian ini.

b. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut penulis ambil dari lapangan dan dikumpulkan sebagai bahan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian.

2. Pemilihan Data

Setelah data penulis kumpulkan dari lapangan, maka data selanjutnya adalah dengan melakukan tahap pemilihan data. Data-data yang telah terkumpul, penulis pilih sesuai dengan pokok permasalahan yang diambil.

3. Penyajian Data

Penulis dalam melakukan tahap penyajian data mendasarkan analisis pada data yang telah dipilih, yang kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi yang saling berkesinambungan antar pokok permasalahan.

4. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan setelah tahap penyajian data selesai. Dalam penelitian ini kesimpulan diambil dengan menjawab rumusan masalah yang ada. Selain kesimpulan penulis juga memberikan saran atau rekomendasi untuk penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I. DILEMA GEPENG : Pekerjaan Rumah Dinas Sosial Kota Yogyakarta

Bab 1 berisikan fenomena dilema gepeng: pekerjaan rumah Dinas Sosial kota Yogyakarta meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, paradigma dan pendekatan, objek dan lokasi penelitian.

BAB II. MENGENAL DINAS SOSIAL KOTA YOGYAKARTA

Bab 2 berisikan Yogyakarta: potret daerah istimewa, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sekretariat, bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bidang bantuan dan pengembangan kesejahteraan sosial, bidang pengembangan dan tenaga kerja, bidang pengawasan tenaga kerja dan hubungan industrial.

BAB III. MENELISIK FUNGSI KEHUMASAN DINAS SOSIAL KOTA YOGYAKARTA

Bab 3 berisikan tentang temuan fungsi kehumasan Dinas Sosial dalam implementasi penanganan masalah gepeng di wilayah kota Yogyakarta, melaksanakan upaya preventif, penggunaan media social, pelaksanaan razia terhadap gepeng, kegiatan penanganan gepeng oleh Dinas Sosial kota Yogyakarta, peluang dan hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial dalam implementasi program gepeng di kota Yogyakarta, peluang, hambatan.

BAB IV. MEMAPARKAN PELUANG DAN HAMBATAN FUNGSI HUMAS

Bab IV ini menjelaskan tentang peluang dan hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam melaksanakan penanganan gepeng.

BAB V. HUMAS & GEPENG (SIMPULAN DAN SARAN)

Bab V ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan kritik.

*Pulang ke kotamu
Ada setangkup haru dalam rindu
Masih seperti dulu
Tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna
Terhanyut aku dalam nostalgia
Saat kita sering luangkan waktu
Nikmati bersama
Suasana Jogja
Di persimpangan langkahku terhenti
Ramai kaki lima
Menjajakan sajian khas berselera
Orang duduk bersila
Musisi jalanan mulai beraksi
Seiring laraku kehilanganmu
Merintih sendiri
Ditelan deru kotamu*

Kla Project - Yogyakarta

BAB II

MENGENAL DINAS SOSIAL KOTA YOGYAKARTA

A. YOGYAKARTA : Potret Daerah Istimewa

Sejarah berdirinya pemerintahan kota Yogyakarta (<https://id.m.wikipedia.org> diakses 3 Maret 2015) diawali dengan adanya Perjanjian Gianti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Setahun kemudian pada tanggal 7 Oktober 1756 Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki istana baru. Dengan demikian berdirilah kota Yogyakarta dengan nama utuhnya Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Alam VIII diangkat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden RI. Pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Nasional

Sistem pemerintahan yang telah berjalan selama 50 tahun lebih memasuki era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan Pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah, menyelenggarakan otonomi daerah secara luas. Berdasar UU any maka sebutan kotamadya dati II Yogyakarta diubah menjadi kota Yogyakarta dan pemerintahannya disebut pemerintahan kota Yogyakarta dengan Walikota sebagai kepala daerahnya.

Kota Yogyakarta dengan masyarakatnya yang ramah, kekayaan budaya dan seni, dan sikap saling menghargai perbedaan membuat nyaman kota ini di setiap sudutnya. Yogya yang telah terkenal dengan kota wisata, kota sejarah, kota pelajar menjadi magnet tersendiri bagi siapa saja untuk datang dan kembali ke kota ini. Maraknya orang yang berdatangan ke Yogya membuat pemerintah dan

masyarakat berbondong-bondong melakukan pembangunan pada infrastruktur dan tata kota.

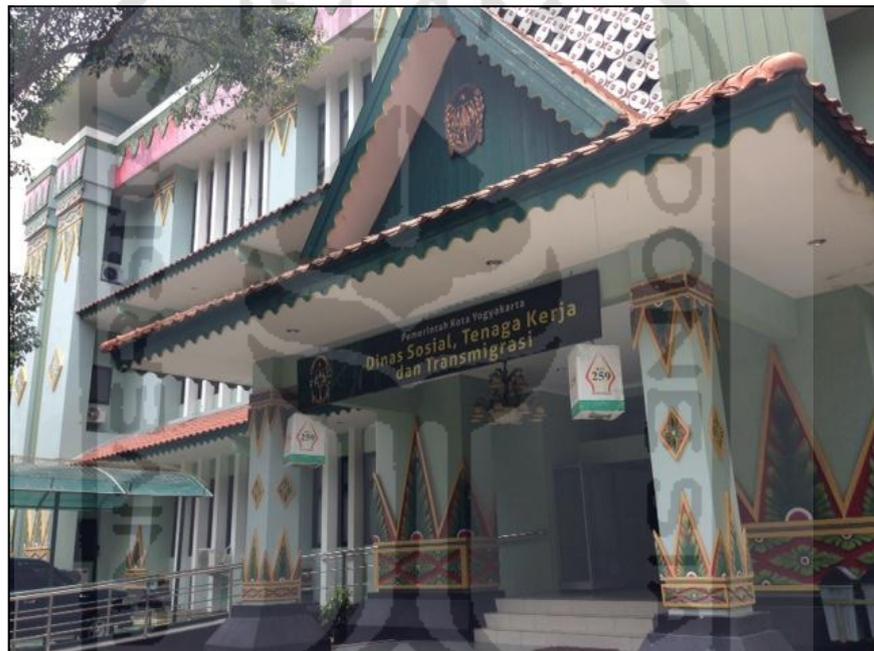
Ragam etnis dan budaya dari kota maupun desa bermigrasi ke kota Yogyakarta dengan berbagai kepentingan. Mulai dari sekedar berwisata, menempuh pendidikan, hingga mencari lapangan pekerjaan. Banyak perantau, mahasiswa yang di buat betah di kota Yogya, sulit bagi mereka untuk meninggalkan kota ini. Demi tinggal disini mereka berusaha untuk mendapatkan pekerjaan di kota Yogya. Namun seperti halnya kota-kota yang sedang berkembang tampaknya menimbulkan dampak positif dan negatif. Daya tarik kota Yogya yang mengundang derasnya arus imigrasi berbanding terbalik dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

Dengan lapangan kerja yang terbatas mereka bersaing untuk memperoleh pekerjaan dengan mengandalkan tingkat pendidikan. Untuk mendapatkan pekerjaan di sebuah hotel berbintang minimal mereka harus menempuh pendidikan sarjana dengan umr satu setengah juta. Banyak yang tersisihkan dan masih kesulitan untuk memperoleh pekerjaan, dan terhimpit kemiskinan. Hal ini memaksa mereka yang melihat kondisi Yogya sebagai kota wisata yang ramai di kunjungi untuk mengambil jalan pintas memilih menjadi pengemis dan gelandangan. Bahkan gelandangan dan pengemis di jadikan profesi yang dilakukan secara terkoordinir.

.Gepeng banyak yang berkeliaran di jalanan, mengamen dan mengemis di perempatan jalan dan tidur di emperan toko pada malam hari. Hal tersebut tentu saja membawa dampak yang kurang baik bagi Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota tujuan wisata. Keberadaan gepeng menjadi masalah yang krusial bagi kota Yogya yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Upaya pemerintah kota Yogyakarta melakukan razia gepeng, belum mampu mengurangi jumlah gepeng yang seolah terus bertambah dan berdatangan dari luar kota. Menghadapi fenomena tersebut pemerintah kota Yogyakarta terus berbenah dengan mencanangkan pembentukan Raperda Penangan Gepeng. Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk payung hukum bagi gepeng dan pengemis dengan mengesahkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gepeng dan Pengemis.

B. Dinas Sosial Kota Yogyakarta

Dinas Sosial kota Yogyakarta berdiri tergabung dengan lembaga Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Yogyakarta yang beralamat di jalan kenari No. 56, Umbulharjo, komplek balaikota Yogyakarta merupakan bagian dari Pemerintah kota Yogyakarta. Dinas Sosial kota Yogyakarta merupakan lembaga yang berperan aktif mendukung terlaksananya program-program yang dilaksanakan Pemerintah kota Yogyakarta, serta membantu Walikota dan wakil Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya di bidang kesejahteraan sosial.



Gambar 2.1

Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan dokumen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Yogyakarta menjelaskan bahwa:

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67) yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Rincian Tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian

Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Yogyakarta.

Dalam penelitian mengenai Humas dan Dilema Gepeng, Analisis Fungsi Kehumasan Dinas Sosial dalam Implementasi Program Penanggulangan Gepeng di Kota Yogyakarta, bidang RPS Dinas Sosial kota Yogyakarta menjadi objek dalam penelitian ini.

Berdasarkan Peraturan walikota No 75 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Bidang Rehabilitas dan Pelatihan Sosial adalah:

1. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

Bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial mempunyai fungsi pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial. Bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial terdiri dari smantani rehabilitasi masalah sosial dan smantani pelayanan sosial.

Kemudian adapun uraian tugasnya sebagai berikut,

Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial.

- a. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang.
- b. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial.
- c. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan pelayanan sosial.
- d. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

1) Smantani Rehabilitasi Masalah Sosial

Smantani Rehabilitasi Masalah Sosial memiliki uraian tugas sebagai berikut,

- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan

permasalahan yang berkaitan dengan rehabilitasi masalah sosial.

- b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan smantani.
- c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan rehabilitasi masalah sosial.
- d) Melaksanakan pendampingan keluarga miskin.
- e) Melaksanakan penggalian potensi ekonomi keluarga miskin.
- f) Melaksanakan pemberdayaan dan penguatan aktivitas ekonomi keluarga miskin.
- g) Melaksanakan fasilitasi penumbuhan kelompok-kelompok binaan sosial berbasis keluarga miskin.
- h) Melaksanakan fasilitasi penguatan kelompok-kelompok binaan sosial berbasis keluarga miskin.
- i) Melaksanakan fasilitasi penumbuhan layanan permodalan khusus bagi penguatan usaha warga miskin.
- j) Melaksanakan pendampingan pada keluarga yang memiliki anggota keluarga bermasalah sosial seperti anak cacat, psikotik, korban penyalahgunaan narkoba, mantan napi, dan anak nakal.
- k) Melaksanakan pendampingan pada korban penyalahgunaan narkoba.
- l) Melaksanakan fasilitasi penumbuhan kegiatan ekonomi produktif pada penderita cacat fisik, mental, mantan psikotik, dan korban penyalahgunaan narkoba.
- m) Melaksanakan pendampingan pada keluarga yang menjadi korban kekerasan sosial dan kekerasan dalam rumah tangga.
- n) Melaksanakan pendampingan pada wanita anak dan lansia korban kekerasan dalam rumah tangga.

- o) Melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga yang memiliki masalah sosial sebagai korban kekerasan sosial dan kekerasan dalam rumah tangga.
- p) Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga anak jalanan.
- q) Melaksanakan pembinaan sosial pada wanita tunasusila, waria dan masyarakat wilayah rawan sosial.
- r) Melaksanakan fasilitasi penumbuhan potensi ekonomi pada kelompok wanita, tunasusila dan waria.
- s) Melaksanakan fasilitasi pemulangan wanita tunasusila dan waria ke tempat asal.
- t) Melaksanakan pendampingan pada penderita cacat fisik.
- u) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

2) Smantani Pelayanan Sosial

Smantani pelayanan sosial memiliki uraian tugas sebagai berikut,

- a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan sosial.
- b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan smantani.
- c) Melaksanakan pendampingan pada penderita cacat mental.
- d) Melaksanakan pendampingan pada mantan psikotik.
- e) Melaksanakan pelayanan bantuan perawatan rehabilitasi kejiwaan bagi penyandang psikotik.
- f) Melaksanakan pengiriman penderita sakit jiwa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ).
- g) Melaksanakan pengembalian mantan psikotik ke alamat asal.
- h) Melaksanakan pelayanan bantuan stimulant rehab rumah keluarga kurang layak huni.
- i) Melaksanakan pemakaman jenazah terlantar.
- j) Melaksanakan pelayanan fasilitas adopsi anak.

k) Melaksanakan layanan Jaminan Asuransi Kesejahteraan Sosial (JAKS).

l) Melaksanakan fasilitasi dan supervisi kegiatan-kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial dari kegiatan dekonsetrasi dan pembantuan.

m) Melaksanakan pelayanan administrasi panti bagi anak terlantar yang perlu dikembalikan ke tempat asal.

n) Melaksanakan pemberian bantuan terhadap warga masyarakat terlantar yang perlu dikembalikan ke tempat asal.

o) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan layanan dalam panti melalui fasilitasi forum panti dan membangun hubungan kemitraan antara pemerintah dan pengelola panti dan hubungan yang sinergis.

p) Melaksanakan pelayanan informasi dan laporan pencarian anggota keluarga yang hilang atau pergi dari rumah.

q) Melaksanakan pemberian informasi bantuan masyarakat yang membutuhkan rekomendasi untuk memperoleh layanan bantuan pendidikan di luar jaminan pendidikan bagi warga renta miskin.

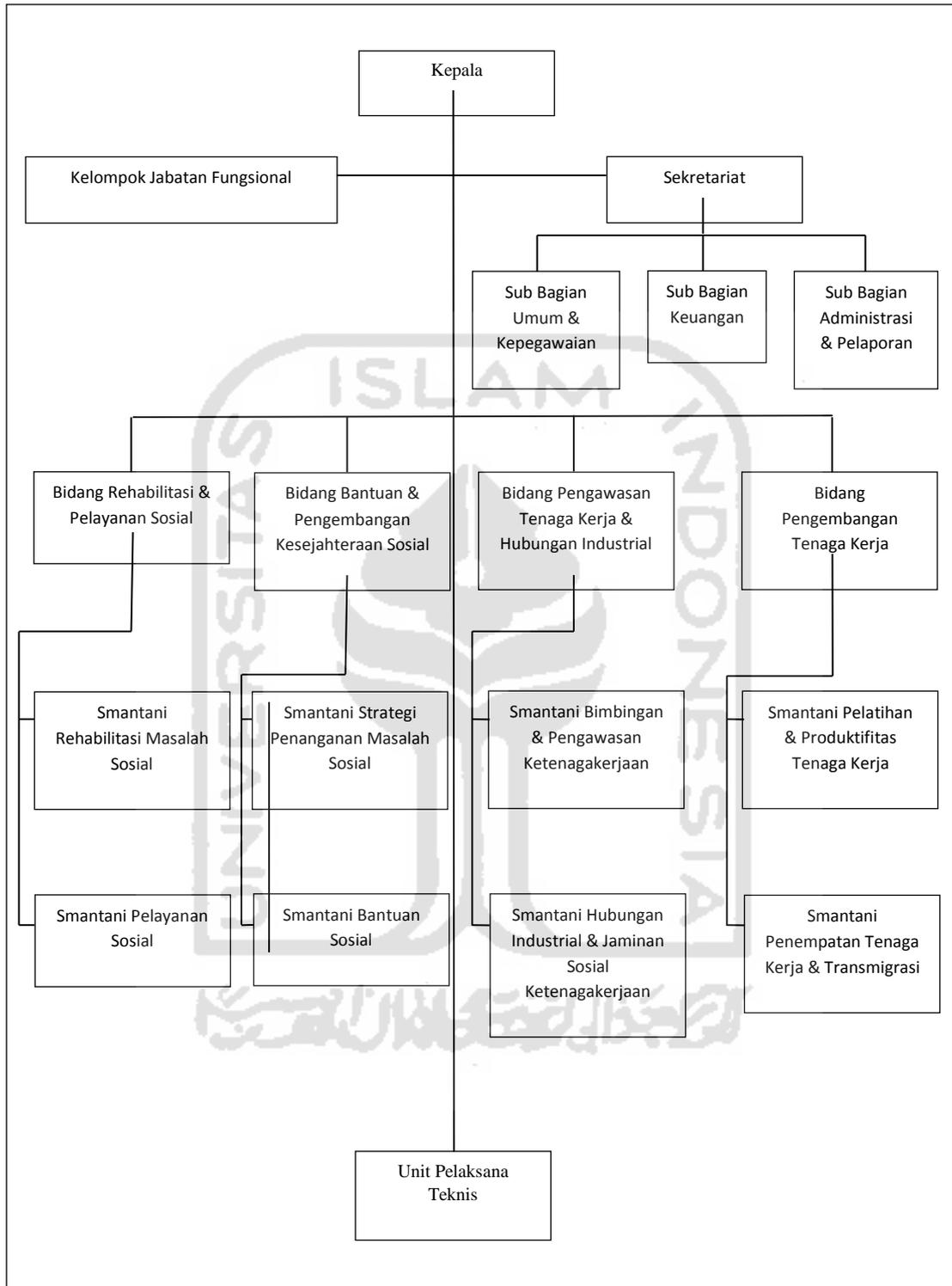
r) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan PJKA dan otoritas pengelola terminal darat dalam hal pemulangan orang terlantar.

s) Menyiapkan bahan koordinasi dengan rumah zakat dan lembaga sosial yang memberikan bantuan keterlantaran.

t) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Smantani.

u) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

C. Struktur Organisasi



Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

The History of PR is...

A history of a battle for what is reality

And how people will see and understand reality



-Struat Ewen-

BAB III
MENELISIK FUNGSI KEHUMASAN DINAS SOSIAL DALAM
PERDA GEPENG

Bab ini berisi tentang hasil temuan yang telah peneliti lakukan melalui wawancara dengan Dinas Sosial, Dinas Ketertiban, PSM, tokoh masyarakat dan hasil survey dilapangan. Untuk menguak fungsi kehumasan yang dilakukan Dinas Sosial dalam implementasi Perda Gepeng di wilayah kota Yogyakarta.

Pada penelitian ini penulis fokus pada permasalahan terkait dengan dan peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam implementasi program penanggulangan gepeng di Kota Yogyakarta. Penulis telah melakukan wawancara penelitian ini:

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Ibu Nanik	Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta
2	Ibu Suheni	Staf RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta/ Tim Penjangkauan Gepeng
3	Pak Kasmat	Ketua PMS Kota Yogyakarta
4	Bapak Mugi Rahayu	Ketua Paguyuban Warga Kitren Kotagede
5	Bapak Oka Mahendra	Kabid. Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

Sumber: Data Penelitian, 2016.

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap narasumber penelitian, penulis uraikan dalam sub bab berikut ini:

Sesuai dengan fungsi humas dalam melaksanakan perannya maka humas pemerintah menjalankan perannya sebagai komunikator, mediator dan organisator. Begitu juga yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam melakukan penanganan masalah gepeng di Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi humas yang dijalankan dengan aktivitas berikut ini:

A. Dinas Sosial Kota Yogyakarta sebagai Komunikator

Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam melaksanakan peran sebagai komunikator pada penanganan masalah gepeng di Kota Yogyakarta dilakukan dengan:

1. Melaksanakan Upaya Preventif

Dinas Sosial Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki terkait dengan sosialisasi penanganan gepeng terhadap masyarakat luas adalah mempunyai fungsi preventif dan rehabilitas. Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsinya tersebut mengedepankan fungsi kehumasan untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat luas agar tujuan dapat tercapai. Upaya preventif yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam penanganan gepeng dilaksanakan dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Fungsi kehumasan tersebut dilakukan dengan sosialisasi program penanganan gepeng di wilayah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan peraturan daerah sebagai payung hukum penanganan gepeng di wilayah kota Yogyakarta. Tim pelaksana penanganan gepeng tersebut ada pada SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Setelah terbitnya peraturan daerah tersebut maka dilakukan sosialisasi oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan sosialisasi Perda Gepeng di

Kota Yogyakarta, Dinas Sosial bekerjasama dengan tim penjangkauan Perda Gepeng. Tim tersebut mempunyai tugas sebelum tanggal 25 setiap bulannya selama dua kali melakukan penjangkauan ke target sasaran. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Saya ikut di tim penjangkauan Perda Gepeng gelandangan dan pengemis yang di adakan oleh Dinas Sosial. Kami tiap bulannya dapat jatah 2 kali penjangkauan sebelum tanggal 25 tiap bulan” (Hasil wawancara dengan Ibu Suheni, selaku Staf RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta/ Tim Penjangkauan Gepeng pada tanggal 9 November 2016).

Tim penjangkauan terdiri dari 3 orang dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2 orang dari Polresta Kota Yogyakarta, 10 orang dari Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta sehingga total ada 15 orang, terkadang ditambah dengan anggota PSM dan yang sedang mengadakan penelitian juga ikut terlibat. Koordinasi lintas instansi untuk melakukan penjangkauan kepada anak gepeng tersebut adalah dengan cara Dinas Sosial Kota Yogyakarta membuat surat yang ditujukan ke instansi terkait sehingga tidak timbul jadwal yang bersamaan. Tim penjangkauan gepeng sudah mempunyai program kerja yang termasuk dalam program keseluruhan tentang Perda Gepeng yang sudah disusun tahun sebelumnya.

Penanganan secara preventif dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat luas, pihak instansi yang terkait, sedangkan untuk rehabilitasi maka Dinas Sosial menampung gepeng yang berhasil diamankan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta yang melakukan razia terhadap gepeng. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Perda itu No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gepeng, kemudian mulai ya istilahnya sosialisasi-sosialisasi. Dinas Sosial kan untuk preventif dan rehabilitasi. Preventif itu kita membuat liflet-lifletnya. Kemudian kita memasang papan

himbauan di pertigaan perempatan di beberapa titik yang ada *traffic light*” (Hasil wawancara dengan Ibu Nunik selaku Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada tanggal 27 September 2016).

Sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat dan gepeng juga dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui tim penjangkauan. Pelaksanaan sosialisasi perda dilakukan dengan pemberitahuan kepada masyarakatan melalui pendekatan personal, hal tersebut dikarenakan banyak warga masyarakat yang baik orang tua maupun anak yang rentan untuk turun ke jalan. Tim penjangkauan menyampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan karang taruna, PKK, bahwa pada saat ini sudah terbut Perda tentang gepeng sehingga apabila ada anak atau orang tua yang menyuruh anak untuk turun ke jalan akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Masyarakat diberikan pengetahuan dan pengertian tentang anak jalanan dan gepeng bahwa apabila ada razia maka akan dibawa ke panti. Bagi yang belum pernah dirazia maka akan tinggal di panti selama 1 bulan, yang sudah dua kali dirazia akan tinggal di panti selama 3 bulan dan yang sudah pernah dirazia sebanyak 3 kali akan ditempatkan di panti selama 6 bulan. Hal tersebut untuk membuat efek jera. Anak jalanan dan gepeng yang tinggal di panti akan dirawat dan diberdayakan dengan diberikan pelatihan keterampilan Tim penjangkauan tidak melakukan pendampingan untuk anak jalanan dan gepeng selama tinggal di panti. Pernyataan tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Kalau pelaksanakannya untuk pemberitahuan dengan pendekatan ke masyarakat, saya juga sering ketemu orang yang rentan dan punya anak rentan turun ke jalan. Saya beritahukan sekarang sudah ada Perda, ada sanksi-sanksinya perlahan-lahan mereka akan berhenti turun ke jalan, Kalau sekaligus anak jalanan dan gepeng gak akan bisa. Saya memberikan pengertian beginiloh seandainya kena razia kita bawa ke panti di assessment kalau belum pernah kena razia nanti satu bulan di panti, kalau sudah dua kali 3 bulan, tiga kali

6 bulan. Itu biar memberikan efek jera, mereka juga disana bukan hanya di urus tapi juga di perdayakan.

Kalau bisa di dandani, dikembalikan ke asalnya jangan hidup di jalan” (Hasil wawancara dengan Ibu Suheni, selaku Staf RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta/ Tim Penjangkauan Gepeng pada tanggal 9 November 2016).

Sosialisasi yang dilakukan dengan jangkauan masyarakat dilaksanakan dengan mengundang perwakilan tokoh masyarakat, ketua perkumpulan/paguyuban masyarakat untuk datang ke kecamatan dan pihak dinas meminta untuk dilibatkan dalam kegiatan di masyarakat. Pada saat kegiatan di masyarakat petugas dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta datang sebanyak 3 orang dan membawa brosur tentang penanganan gepeng dan dibagikan kepada warga masyarakat. Salah satu contohnya adalah di masyarakat Kitren, Kota Gede dimana di wilayah tersebut terdapat pengamen yang diindikasikan suka melakukan pencurian. Oleh warga masyarakat pengamen tersebut tidak dimusuhi akan tetapi dirangkul, diajak komunikasi agar tidak mengamen kembali. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Pernah mba, dulu saya di undang ke kecamatan untuk sosialisasi Perda Gepeng. Setelah itu mereka “matur” untuk dilibatkan di kegiatan kami untuk sosialisasi. Pas kumpul warga itu mereka datang ada 3 orang bagi brosur tentang penanganan gepeng. Disinikan ada salah satu warga yang terlibat jadi pengamen, dia dicurigai sering mencuri soalnya banyak hewan peliharaan yang hilang misalnya ayam, burung. Sama warga kitren anak ini malah kami rangkul, dilibatkan disemua kegiatan, tetap diajak *sharing*, ya gimana caranya biar dia gak ngamen lagi. Kalau PSM seingat saya sering kerumahnya silaturahmi sama keluarganya, ngobrol sama anaknya yang pengamen” (Hasil wawancara dengan Bapak Mugi Rahayu selaku Ketua Paguyuban Warga Kitren Kota Gede, pada tanggal 4 Januari 2017).

Pengamen yang diindikasi suka melakukan pencurian oleh warga masyarakat dan petugas PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang mendatangi kerumahnya melakukan upaya dengan memberikan

pekerjaan di makam. Untuk warga masyarakat Kitren sendiri, oleh Dinas Sosial,

Kota Yogyakarta diberikan pelatihan berupa sablon dan pembuatan kripik pisang dan diikuti oleh pemuda dan ibu-ibu. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari. Selesai pelatihan Dinas Sosial Kota Yogyakarta memberikan 3 perangkat keperluan sablon dan 5 perangkat untuk pembuatan kripik pisang yang kemudian dibagikan kepada 3 RT.

Warga masyarakat di Kitren melakukan upaya sehingga pengamen yang telah dirangkul untuk bekerja tidak melakukan perbuatannya kembali, hal tersebut dilakukan dengan saling meningkatkan kepedulian antar sesama. Warga masyarakat saling melakukan pengawasan sehingga apabila ada kejadian anggota warga mengalami kondisi yang tidak baik kemudian dilaporkan ke dinas agar segera ditangani. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Iya berhasil mba, kalau dari paguyuban sendirikan sudah punya program kerja yang tujuannya warga saling menjaga peduli satu sama lain, tetap ngayomilah. Warga sini yang ngawasi nanti kalau kejadian lagi kita laporkin, sayakan rutin di undang ke kecamatan nanti disana saya laporkan biar Dinasnya menanganinya. Tapi warga pokoknya tetap menjaga jangan sampai kejadian lagi” (Hasil wawancara dengan Bapak Mugi Rahayu selaku Ketua Paguyuban Warga Kitren Kota Gede, pada tanggal 4 Januari 2017).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa sosialisasi secara langsung dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan membentuk patner masyarakat yaitu PSM. PSM ada di berbagai wilayah di Kota Yogyakarta dengan tujuan lebih dekat kepada masyarakat dan yang mengetahui secara langsung kondisi dari gepeng dan keluarga sehingga memudahkan dalam komunikasi dan penanganannya.

2. Penggunaan Media untuk Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan yang dilakukan kepada khalayak agar mengetahui suatu pesan atau informasi yang diberikan oleh pemberi pesan. Sosialisasi adalah suatu bentuk komunikasi kepada orang banyak yang dilakukan dalam berbagai cara, hal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam melaksanakan sosialisasi adalah dengan membuat media untuk sosialisasi. Media untuk sosialisasi tersebut meliputi papan himbuan yang ditempatkan di tempat yang strategis, spanduk dan leaflet yang dapat menjangkau masyarakat luas. Diharapkan dengan adanya media sosialisasi tersebut maka pesan dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta terkait dengan penanganan gepeng dapat sampai kepada Sasarannya. Berikut ini adalah beberapa media sosialisasi tersebut:

a. Papan Himbuan

Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam penanganan gepeng adalah dengan membuat papan himbuan yang disebar di titik-titik keramaian Kota Yogyakarta seperti di perempatan yang berisikan informasi agar tidak memberikan uang kepada gepeng dan disertai dengan sanksi yang diberikan apabila melanggar ketentuan tersebut. Papan himbuan untuk gepeng tersebut ada mulai tahun 2015 dengan sebelumnya papan himbuan yang sama berisi informasi terkait sanksi bagi pemberian uang kepada anak jalanan. Anak jalanan pada saat ini sudah mulai berkurang dan muncullah gepeng. Tujuan dari adanya pemasangan papan himbuan yang dipasang di lokasi strategis di wilayah Kota Yogyakarta tersebut adalah agar masyarakat luas dapat membaca dan menerapkan himbuan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Sebelumnya kan sudah ada papan himbauan juga tapi untuk anjal, anak jalanan, tapi anak jalanan kan sekarang sudah berkurang, nah munculah gepeng. Anjal bersama orang tuanya. Kemudian dari beberapa papan himbauan itu kita ganti, tempatnya memang sama cuma isinya kita ganti dengan Perda Gepeng beserta Sanskinya. Biasanya itu orang kalau memberi kok kena sanski, ada juga yang tidak tau. Kalau di pintu-pintu masuk DIY kan sudah di pasang papan himbauan oleh DIY. Kota yang lingkup kota dimulai tahun 2015 kita sudah mengganti isi dengan Perda Gepeng dan sanksinya” (Hasil wawancara dengan Ibu Nunik selaku Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada tanggal 27 September 2016).

Berikut ini merupakan gambar dari papan himbauan tentang gepeng yang dipasang di titik-titik keramaian di Kota Yogyakarta:

Gambar 3.1
Papan Himbauan Gepeng



Sumber: Data Dokumentasi Pribadi, 2017.

Papan himbauan gepeng tersebut di atas berada di depan SMKN2 Jetis Yogyakarta. Papan himbauan tersebut tidak jelas tulisannya karena tertutup pohon sehingga tidak dapat dibaca oleh masyarakat yang melintas di jalan tersebut. Papan himbauan gepeng lainnya ada di pertigaan Demangan Yogyakarta:

Gambar 3.2

Papan Himbauan Gepeng



Sumber: Data Dokumentasi Pribadi, 2017.

Gambar di atas adalah papan himbauan gepeng yang berisikan informasi larangan memberikan uang recehan kepada gepeng. Informasi tersebut diharapkan dapat diterapkan oleh masyarakat terutama yang berada di jalanan dimana masih banyak yang merasa iba dengan anak jalanan dan gepeng dengan memberikan uang sekedarnya, padahal hal tersebut tidak dibenarkan yang akan membuat ketergantungan pada anak jalanan dan gepeng.

b. Spanduk

Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam sosialisasi Perda Gepeng juga membuat spanduk. Akan tetapi spanduk yang telah dibuat tersebut banyak yang hilang, ada indikasi yang melepas spanduk tersebut adalah dari kalangan gepeng sendiri. Pencopotan spanduk yang dibuat dan dipasang oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta tersebut tentu saja membuat kecewa aparat dinas. Spanduk yang terpasang di depan instansi seperti di kantor kecamatan tidak dilepas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, hal tersebut dikarenakan adanya penjagaan yang cukup ketat di instansi. Berikut hasil wawancara penulis:

“Iya mbak, spanduk kami pasang di depan kantor instansi pemerintahan lebih aman, hal tersebut juga secara langsung menyerukan kepada masyarakat bahwa semua instansi di pemerintah kota Yogyakarta mendukung penanganan gepeng. Kalau di instansi rata-rata spanduk bertahan lama ya, beda kalau kita pasang di jalan itu cepat rusak karena kadang dirusak gepeng sendiri” (Hasil wawancara dengan Ibu Nunik selaku Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada tanggal 27 September 2016).

Spanduk terkait dengan gepeng tersebut oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dipasang di instansi pemerintahan Kota Yogyakarta. Diharapkan dengan pemasangan di kantor pemerintah tersebut masyarakat yang datang dapat membaca dan ikut serta dalam upaya penanganan gepeng.

c. Poster

Dinas Sosial Kota Yogyakarta juga membuat poster yang dipasang di papan-papan pengumuman yang ada di setiap instansi. Poster tersebut berisikan penanganan gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Yogyakarta. Dalam poster tersebut berisikan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama melindungi

warga masyarakat dari perbuatan menggelandang dan atau mengemis sesuai dengan slogan “Wujudkan Jogja Istimewa Bebas dari Gepeng”. Dalam poster tersebut juga dimuat tentang informasi tentang ancaman pidana dan denda terkait gelandangan dan pengemis. Berikut ini merupakan gambar poster tersebut:

Gambar 3.3

Poster Penanganan Gelandangan dan Pengemis



Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

d. Leaflet

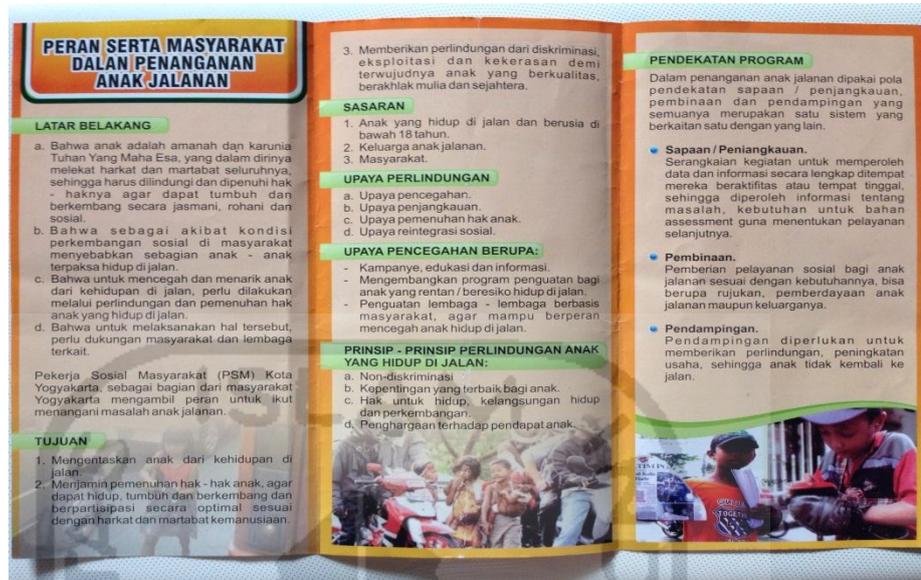
Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam melakukan sosialisasi penanganan gepeng adalah dengan membuat leaflet. Leaflet dibuat dan disebarluaskan kepada masyarakat melalui PSM, tim penjangkauan dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta bermitra dengan PSM Anjal Gepeng. Berikut ini merupakan gambar dari leaflet yang disebarluaskan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta:

Gambar 3.4
Leaflet Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta



Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
Gambar 3.5

Leaflet Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta



Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

Leaflet tersebut berjudul “Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta”, yang dalam pembuatannya didukung oleh Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta dan Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Informasi yang ada dalam leaflet tersebut adalah terkait dengan latar belakang mengenai kondisi perkembangan sosial yang ada di masyarakat yang dapat menyebabkan sebagian anak-anak terpaksa hidup di jalan sehingga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kota Yogyakarta sebagai bagian dari masyarakat Yogyakarta mengambil peran untuk ikut menangani masalah anak jalanan. Selanjutnya berisikan informasi terkait dengan upaya perlindungan dan upaya pencegahan timbulnya anak jalanan, prinsip perlindungan anak yang hidup di jalan dan pendekatan program yang dilakukan. Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara penulis dengan Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta:

“Kita leaflet itu disebar ke PSM, jadi ada tim penjangkauan dari Dinsos bermitra dengan PSM Anjal Gepeng, mereka sekalian membagikan leaflet, atau dimesjid-mesjid kalau hari jumat kan ada yang minta-minta. Jadi ada tim yang masuk kesana dan nitip ke peng-Khotbahnya juga.

Terus kita juga dintib menyasar kesana, ada yang ikut jumat, ada yang berjaga agak jauh. Begitu selesai di *calling* “ini sudah selesai” (Hasil wawancara dengan Ibu Nunik selaku Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada tanggal 27 September 2016).

Pada saat pelaksanaan tugasnya PSM Anjal Gepeng membagikan leaflet kepada anak jalanan dan gepeng, ke masjid-masjid dititipkan kepada pengkhotbah terutama pada hari Jumat pada saat diselenggarakan sholat Jumat karena banyak gepeng yang meminta-minta di sekitar masjid. Pada hari Jumat tersebut, dari Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta juga melakukan razia bagi gepeng yang melakukan aktivitas di sekitar masjid, terdapat petugas yang melakukan jaga dan mengawasi agar gepeng tidak lari.

e. Media Cetak

Sosialisasi terkait dengan Perda Gepeng dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan mengundang wartawan dalam acara *press realease* yang diselenggarakan oleh humas Kota Yogyakarta. Pada acara tersebut, terdapat media cetak dan elektronik yang meliput acara dan terdapat sesi tanya jawab dengan wartawan terkait dengan Perda yang akan terbit dan seputar program kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Berikut ini adalah gambar :

Gambar 3.6

Berita terkait Perda Gepeng di Harian Kedaulatan Rakyat



Sumber: Dokumentasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta

Informasi terkait dengan terbitnya Perda Gepeng diberitakan oleh Harian Kedaulatan Rakyat yang terbit pada Minggu 28 Desember 2014. Pada berita tersebut berisikan informasi mengenai berlakunya Perda Gepeng yang akan berlaku pada 1 Januari 2015. Bagi pemberi uang kepada gepeng maka akan diancam dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Diharapkan dengan besaran denda tersebut dapat membuat keengganan dari masyarakat untuk memberikan uang kepada gepeng di jalanan. Pihak Dinas Sosial Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya, menjalin kerjasama dengan media baik cetak maupun elektronik yang berskala nasional dan lokal. Kerjasama tersebut berupa liputan pada saat *press realness*, pemberitaan kegiatan instansi melalui radio, televisi, surat kabar sehingga tercipta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Terkait dengan pemberitaan Perda Gepeng, diharapkan dengan

adanya pemberitaan tersebut masyarakat luas dapat mengetahuinya sehingga pelaksanaan Perda dapat berjalan dengan baik.

f. Media Website

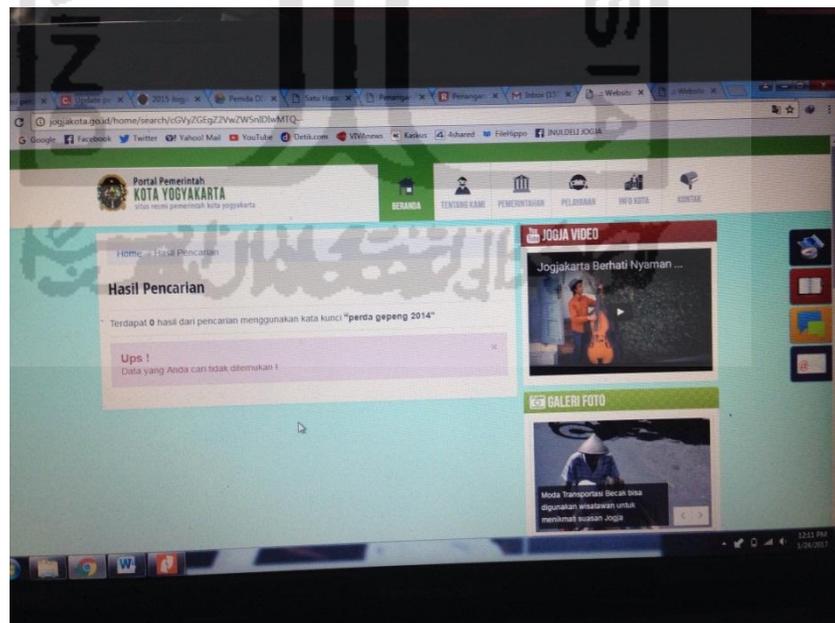
Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai website instansi yang dapat diakses melalui dinsos.jogjaprov.go.id. Website tersebut berisikan informasi terkait dengan program kebijakan dari pemerintah daerah, forum interaktif masyarakat, prosedur pelayanan masyarakat, profil dan informasi umum terkait dengan Provinsi DIY. Dalam website tersebut juga berisikan informasi terkait dengan penanganan gepeng yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat diakses melalui <http://dinsos.jogjaprov.go.id/2015-jogja-bebas-gepeng/>. Berikut ini merupakan halaman website terkait dengan informasi penanganan gepeng tersebut.

Gambar 3.7 Website Dinas Sosial DIY



Sumber: dinsos.jogjaprov.go.id/

Gambar 3.8 Website Pemerintah Kota Yogyakarta



Sumber: jogjakota.go.id/

Informasi yang tertera pada website tersebut berisikan mengenai pemberitaan bahwa Kota Yogyakarta pada tahun 2015 diharapkan sudah bebas dari gepeng seiring dengan berlakunya Perda tentang Gepeng. Informasi dari website resmi tersebut menyebutkan bahwa “Barangsiapa melakukan pengkandangan dan pengemisan akan dijatuhi denda Rp 10 juta atau kurungan 6 bulan. Dan barangsiapa yang memberikan sesuatu kepada gekandangan dan pengemis akan dikenakan denda Rp 1 juta atau kurungan 1 bulan”. Diharapkan dengan informasi yang tercantum pada website tersebut masyarakat luas dapat mengetahuinya.

B. Dinas Sosial Kota Yogyakarta sebagai Mediator

Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam melaksanakan peran sebagai mediator pada penanganan masalah gepeng di Kota Yogyakarta dilakukan kerjasama dengan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam penanganan gepeng direncanakan terlebih dahulu. Program Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sudah diusulkan mulai bulan Maret 2016 dengan membuat rencana kerja. Apabila ada program yang terlewatkan maka menunggu pada perubahan anggaran. Program yang sudah direncanakan tidak dapat ditambah atau dikurangi. Dalam penyusunan rencana kerja tersebut Dinas Sosial Kota Yogyakarta melibatkan masing-masing seksi di dinas yang kemudian dikoordinasikan ke Bapeda Kota Yogyakarta. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Iya setahun sebelum, seperti yang tahun 2017, kita sudah usulkan di bulan maret. Kalau misalnya terlewatkan kita nunggu besok di perubahan anggaran. Jadi *timeline* nya memang Maret pengusulan rencana “Rencana kerja” untuk mau kegiatan kita berapa orang, itu sampai bulan Maret sudah di tentukan. Itu sudah gak bisa nambah gak bisa ngurangi, kalau mau nambah ya tidak merubah itu ada yang selipkan disitu. Itu kan masing-masing seksi menyusun, nanti di koordinasikan ke Bapeda” (Hasil wawancara dengan Ibu Nunik selaku Kabid

RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada tanggal 27 September 2016).

Perencanaan program kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta juga melibatkan anggota PSM (Pekerja Sosial Masyarakat). PSM menyusun proposal yang menjadi agenda kerjanya dalam satu tahun ke depan yang kemudian dari perencanaan program tersebut menjadi rencana kerja dari Dinas Sosial. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Iya dilibatkan mba, kita kan juga menyusun program proposal kita ajukan ke Dinas Sosial itu jadi satu dengan rangkaian kerja Dinas Sosial” (Hasil wawancara dengan Bapak Kasmat, selaku Ketua PMS Kota Yogyakarta pada tanggal 10 November 2016).

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penanganan gepeng maka Dinas Sosial Kota Yogyakarta melibatkan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat). Hal tersebut sesuai dengan peraturan dari Menteri Sosial yang menghimbau agar di setiap kabupaten, kota, kecamatan dan kelurahan dibentuk Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat. Di wilayah Kota Yogyakarta untuk kegiatan PSM berjalan baik dengan dibentuk tim penjangkauan anak jalanan, akan tetapi pada saat ini anak jalanan sudah mulai berkurang akan tetapi tidak secara keseluruhan ada yang datang dan pergi. Oleh karena itu tim penjangkauan pada saat ini menanggapi anak jalanan dan gepeng.

PSM merupakan mitra dari Dinas Sosial yang mulai mendapatkan tugas pada tahun 2009 untuk penanganan anak jalanan berbasis masyarakat. PSM sebagai mitra dari Dinas Sosial ikut serta aktif dalam sosialisasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gepeng. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan melibatkan komunikasi dengan karang taruna, ibu-ibu PKK. PSM juga menyampaikan informasi terkait dengan pemberdayaan gepeng dan pencegahannya.

Anggota PSM diberikan pelatihan yaitu bimbingan sosial dasar dan bimbingan sosial lanjut termasuk kode etik dalam menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Dilatih mba, namanya bimbingan sosial dasar dan bimbingan sosial lanjut, termasuk kode etiknya. Teman-teman sekarang sudah menikmati pekerjaan di lapangan” (Hasil wawancara dengan Bapak Kasmat, selaku Ketua PMS Kota Yogyakarta pada tanggal 10 November 2016).

Setelah terbit Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gepeng maka tugas dari PSM bertambah yaitu menangani gepeng. PSM dalam menangani anak jalanan dan gepeng dibentuk 3 tim yaitu tim utara, tim tengah dan tim selatan yang meliputi 14 kecamatan dibagi pada 3 tim tersebut. Tim PSM tersebut diberi nama tim 70. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“PSM sebagai mitra pemerintah, kalau di kota kita bermitra dengan Dinas Sosial. Mulai tahun 2009 kita mendapat tugas untuk teman-teman PSM di kota Yogyakarta. Tugas pertamanya adalah kegiatan penanganan anjal berbasis masyarakat. Untuk tugas itu setelah terbitnya perda 1 Tahun 2014, tugas kita di tambah penanganan gelandangan dan pengemis. Menangani penanganan anjal berbasis masyarakat itu kita bentuk tiga tim. Tim utara, tim tengah tim selatan, meliputi wilayah 14 kecamatan di bagi 3. Wilayah termasuk jetis, gondokusuman pokoknya 14 kecamatan di kota. Terus kita bentuk tim namanya tim 70. Itu terdiri dari anggota PSM terus kita bagi tadi utara, tengah dan selatan. Tugas awalnya penanganan anjal basis masyarakat, ada tiga poin yang menjadi konsen kita” (Hasil wawancara dengan Bapak Kasmat, selaku Ketua PMS Kota Yogyakarta pada tanggal 10 November 2016).

Tugas dari PSM telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta yaitu:

1. Penanganan anak jalanan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.

Di wilayah Kota Yogyakarta pada saat ini hampir tidak ada anak jalanan yang berkeliaran di jalan. Tim PSM menasar anak jalanan yang kemudian didata, didokumentasikan dan dimintai pernyataan agar tidak kembali turun ke jalan karena perbuatan tersebut melanggar hukum dan membahayakan bagi

anak jalanan sendiri. Anak jalanan yang didata oleh tim PSM kemudian diikutkan dalam program pelatihan sesuai dengan minat anak.

2. Penanganan terhadap orang tua dari anak jalanan

Peran orang tua sangat penting dalam memberikan pengertian, arahan kepada anak yang hidup di jalanan. Tim PSM datang ke orang tua anak jalanan yang sudah didata dan dilakukan kunjungan ke rumah (*home visit*). Tim PSM melakukan dialog dengan orang tua mengenai penyebab anak turun ke jalan dan dicarikan solusi sehingga anak tidak turun ke jalan lagi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa penyebab anak turun ke jalan diantaranya adalah *broken home*, orang tua yang sudah tidak memperhatikan anak lagi karena perceraian, masalah ekonomi dll. Solusi dari tim PSM kepada orang tua yang memiliki anak turun ke jalan adalah memberdayakan orang tua dengan memberikan keterampilan usaha dan memberikan modal. Hal tersebut bertujuan agar secara ekonomi orang tua mampu untuk mencukupi kebutuhan anak sehingga anak tidak perlu turun ke jalan untuk menjadi pengamen ataupun pengemis.

3. Kerjasama dengan masyarakat

Masyarakat diharapkan untuk tergerak memberantas anak jalanan. Peran serta dari masyarakat sangat penting untuk mengajak anak-anak terlibat dalam kegiatan yang positif. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan kerja bakti bersama-sama, mengajak ikut serta dalam kegiatan keagamaan seperti TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) dan pengajian, shalat berjamaah. Melalui kegiatan yang positif tersebut anak-anak tidak terlibat dalam kegiatan yang negatif seperti narkoba dll.

PSM dalam melaksanakan tugasnya tersebut meliputi penanganan terhadap anak jalanan dan gepeng yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Tim PSM melakukan pendekatan secara personal dengan mendatangi secara langsung tempat berkumpulnya gepeng tersebut. Tim PSM secara rutin datang ke tempat gepeng berkumpul dan dilakukan secara bertahap dalam waktu beberapa hari, gepeng yang mempunyai identitas merupakan warga kota Yogyakarta diberikan pengertian agar mau untuk kembali ke masyarakat dengan diberikan bekal pelatihan supaya mandiri. Pelatihan yang akan diberikan disesuaikan dengan minat dari gepeng tersebut. Bagi yang bukan merupakan warga masyarakat Kota Yogyakarta maka dapat dilakukan pengembalian ke daerah asalnya dengan difasilitasi oleh Dinas Sosial.

Wilayah yang akan disasar dalam penanganan gepeng cukup luas maka dilakukan koordinasi dengan teman-teman PSM lainnya yang berada di lingkup kabupaten sehingga dapat menjangkau di luar kota Yogyakarta. Akan tetapi terkendala dengan anggaran sehingga dari tim PSM tidak banyak orang yang dapat dilibatkan. Secara rutin setiap bulannya tim PSM diminta oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta untuk mendata anak jalanan dan gepeng di *camp assessment*. Data yang telah terkumpul dari *camp assessment* tersebut kemudian dilaporkan ke Dinas Sosial Kota Yogyakarta setiap tiga bulan sekali. Dalam laporan tersebut tim PSM juga menyampaikan evaluasi berupa kendala yang terjadi di lapangan yang akan dibahas dalam rapat koordinasi antara Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan PSM untuk membahas hambatan dan solusinya.

Teknis pengembalian ke daerah asal bagi gepeng yang bukan merupakan warga masyarakat Kota Yogyakarta adalah dengan menggunakan surat antar dari Dinas Sosial untuk dikembalikan ke masing-masing daerahnya seperti gepeng dari Jakarta, Semarang, Temanggung, Surabaya dll. Akan tetapi kendala yang dihadapi dalam proses pengembalian ke daerah tersebut adalah gepeng yang tidak mau kembali ke daerah asal sehingga kembali lagi ke Yogyakarta padahal gepeng yang diantar kembali ke daerahnya masing-masing diberikan uang saku dari anggaran Dinas Sosial. PSM juga melakukan pendataan terhadap gepeng yang tidak memiliki tempat

tinggal dan tidur di sudut kota, depan pertokoan, bawah jembatan (*homeless*) dengan target pendataan selama dua minggu. Hasil yang diperoleh oleh PSM selama kurun waktu satu minggu telah berhasil mengumpulkan sebanyak 450 data.

C. Dinas Sosial Kota Yogyakarta sebagai Organisator

Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam melaksanakan peran sebagai organisator pada penanganan masalah gepeng di Kota Yogyakarta dilakukan dengan:

1. Pelaksanaan Razia terhadap Gepeng

Dinas Sosial Kota Yogyakarta merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam hal penanganan anak jalanan dan gepeng untuk diberdayakan agar dapat memiliki kemampuan untuk mandiri sehingga tidak turun kembali ke jalanan. Anak jalanan dan gepeng yang berhasil diamankan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Kota Yogyakarta untuk didata dan direhabilitasi. Berikut ini merupakan gambar dari kegiatan pengamanan terhadap gepeng yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta:

Gambar 3.9
Proses Pengamanan Gepeng Oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dan Pihak Kepolisian



Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

Gambar 3.10
Gepeng Berkumpul setelah Diamankan



Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

Gambar 3.11
Gepeng Masuk ke Mobil Patroli



Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

Pada gambar tersebut di atas terlihat anggota tim penanganan gepeng dari Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dan kepolisian melakukan penertiban terhadap gepeng. Gepeng yang berhasil diamankan kemudian akan dilakukan pendataan dan selanjutnya akan dibawa ke Dinas Sosial Kota Yogyakarta apabila memiliki KTP Kota Yogyakarta, apabila berasal dari luar daerah maka akan dikembalikan ke daerah asalnya. Razia terhadap gepeng tersebut dilakukan pada siang dan malam hari. Pada malam hari gepeng mulai berkumpul untuk beristirahat biasanya gepeng menggelar tikar, kardus untuk alas tidur di depan pertokoan sehingga memudahkan untuk melakukan penangkapan.

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang penanganan gepeng dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta untuk penertibannya dan dibantu pihak kepolisian untuk pengamanan. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta secara rutin mengagendakan penertiban dua kali dalam sebulan yaitu setiap

tanggal 4 dan 20 an setiap bulannya. Petugas akan memberikan penjelasan kepada gepeng dengan berbicara sopan dan santun terkait dengan penertiban yang dilakukan dan memeriksa KTP yang dimiliki, apabila tidak memiliki maka akan masuk ke mobil patroli untuk dibawa ke Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Untuk Perda Gepeng yang terlibat ada Dinas Sosial, Dinas Ketertiban untuk menertibkan, Polisi untuk pengamanan. Kami diberi agenda oleh Dinsos sebulan 2 kali untuk penertiban. Biasanya tanggal 4 dan 20an tiap bulannya, bisa pagi ataupun malam kayak begini operasinya. Kami patroli keliling Kota Yogyakarta, kalau ada yang tiduran di emperan toko, ngamen terus gak ada KTPnya ya diangkut, tapi kalau ada KTPnya gak dibawa sesuai prosedur. Di bawa secara sopan dan santun diajak baik-baik, tapi kalau gak mau baru kita paksa. Setelah penertiban gepeng di bawa ke *camp assessment*, disana kami serahkan ke petugasnya di urusi oleh Dinas Sosial” (Hasil wawancara dengan Bapak Oka Mahendra selaku Kabid. Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, pada tanggal 22 September 2016).

Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dalam penertiban gepeng juga menerima laporan dari masyarakat, petugas akan siap 24 jam untuk pengamanan gepeng. Pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dapat dilakukan sendiri tanpa keterlibatan dari pihak kepolisian dan Dinas Sosial Kota Yogyakarta karena penertiban diluar agenda penertiban dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Akan tetapi koordinasi penertiban tetap dilakukan terutama dalam memberikan laporan gepeng yang akan masuk ke *camp assessment*. Pada saat penertiban gepeng oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta pada setiap kegiatan yang dilakukan tidak ada jumlah target yang harus terjaring. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta mensasar kawasan ramai seperti daerah Tugu karena banyak pengamen dengan harapan Kota Yogyakarta nantinya akan bebas dari gepeng.

Gepeng dan anak jalanan yang berhasil dirazia kemudian akan dilakukan rehabilitasi. Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam melakukan rehabilitasi anak jalanan dan gepeng melakukan pemisahan sehingga tepat perlakuan yang diberikan antara anak jalanan dan gepeng. Gepeng akan ditempatkan di *camp assessment* atau panti karya sedangkan untuk anak ditempatkan di panti hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Karena anjal dan gepeng tidak jauh berbeda sebetulnya, anjal kan anak kalau sudah gede jadi gepeng, atau gepeng membawa anak. Itu kalau kena razia nanti akan disendirikan, anak kan tidak lepas dari orang tuanya di panti akan disendirikan. Kalau yang gepeng kan di *camp assessment* atau panti karya. Kasian juga kalau anak di jadikan satu dengan orang tua, ya walaupun kalau di jalan mereka sudah biasa bersama. Tapi kita kan juga ada perlindungan terhadap anak” (Hasil wawancara dengan Ibu Nunik selaku Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada tanggal 27 September 2016).

Pada tahun 2015 Dinas Sosial Kota Yogyakarta mulai mempersiapkan anggaran untuk operasi penanganan gepeng, panti untuk tempat gepeng dipersiapkan. Kesulitan yang dihadapi pada tahun 2015 untuk anggaran penanganan gepeng tersebut adalah dana yang belum siap sehingga dana diikutkan dari perubahan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Tahun 2015 sudah mulai penganggaran untuk operasi, dan panti di campnya dipersiapkan. Penganggaran harus sudah setahun sebelumnya, pada saat ini muncul pada tahun itu belum ada penganggaran jadi ikut di perubahan anggaran dan sudah mulai untuk tahun kedepannya. Di tahun 2015 sudah dianggarkan oleh Dinas Sosial DIY” (Hasil wawancara dengan Ibu Nunik selaku Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada tanggal 27 September 2016).

Pelaksanaan razia gepeng dilakukan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dan sudah diberikan anggaran khusus. Oleh karena itu Dinas Sosial Kota Yogyakarta tidak menganggarkan dana untuk

keperluan pelaksanaan razia gepeng. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai anggaran khusus untuk penanganan gepeng dan anggaran tersebut diserahkan kepada masing-masing Kabupaten/Kota. Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada tahun 2016 menerima jatah anggaran dalam satu bulan sebanyak 4 kali anggaran turun yang dipergunakan untuk keperluan preventif dan rehabilitasi. Razia yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta tersebut dilakukan secara rutin dengan agenda dua kali dalam sebulan dengan koordinasi bersama pihak kepolisian. Razia oleh Dinas Keteriban Kota Yogyakarta melibatkan pihak Dinas Sosial Kota Yogyakarta sebanyak 3 orang, polisi 2 orang dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta sebanyak 10 orang.

2. Pelatihan kepada Gepeng

Pihak Dinas Sosial Kota Yogyakarta memberikan pelatihan kepada anak jalanan dan gepeng. Pelatihan diberikan kepada anak jalanan dan gepeng yang sudah tidak berada pada usia sekolah yaitu pada usia 19-20 tahun, sedangkan anak jalanan dan gepeng yang masih pada usia sekolah dikembalikan kepada sekolah dan tidak mengikuti pelatihan. Pelatihan yang diberikan kepada gepeng tersebut diantaranya adalah bengkel, sablon, potong rambut. Pada saat diselenggarakan pelatihan maka pihak Dinas Sosial Kota Yogyakarta menyediakan pelatih yang handal di bidangnya untuk memberikan pelatihan kepada gepeng agar mempunyai keterampilan. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Dia datangi pedekatan secara personal untuk di kembalikan ke masyarakat. Kemudian kalau di temukan penduduk kota, kita kan ada pelatihan untuk anjal, dari hasil penjangkauan tim itu. Mereka kan tidak hanya sekali dua kali bertemu, terus ditanya keinginannya itu apa, kemudian kita penuhi seperti tahun ini minta di latih sablon, bengkel, kalau tahun kemaren

potong rambut. Bengkel hanya tambal ban saja, karena mereka kalau diberi pelatihan yang pakai mikir sudah tidak bisa, mereka sudah tidak mau. Kemaren kita juga salah strategi pada saat pelatihan sablon hari pertama kan harus teori dulu pelatihan gambar” (Hasil wawancara dengan Ibu Nunik selaku Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada tanggal 27 September 2016).

Strategi yang dilakukan agar gepeng senang mengikuti pelatihan adalah pada saat pelatihan langsung diajarkan praktik, sedangkan materi teori diberikan setelah selesai praktik atau sambil jalan dengan praktik. Hal tersebut dikarenakan apabila gepeng diberikan materi teori terlebih dahulu maka akan cepat bosan dan pada hari pelatihan berikutnya tidak datang untuk mengikuti pelatihan karena bosan dengan teori.

Pelatihan yang ditujukan kepada gepeng kurang lebih diikuti oleh 40 orang gepeng. Pihak Dinas Sosial Kota Yogyakarta juga bekerjasama dengan PSBK, Pangudi Luhur Bekasi dari Kementerian Sosial Pusat dalam memberikan pelatihan kepada gepeng. Dari pelatihan itu juga diberikan motivasi kepada gepeng dan juga menyiapkan program yang dapat diikuti salah satunya adalah program transmigrasi yang disiapkan dari seksi transmigrasi. Akan tetapi program transmigrasi tersebut tidak diminati oleh gepeng, terbukti dengan jumlah pendaftar yang minim. Dari pihak PSBK sendiri juga membuka pelatihan bagi gepeng dan dapat mengikutinya selama kurun waktu 6 bulan, akan tetapi dari pelatihan yang diadakan di Dinas Sosial Kota Yogyakarta informasi tersebut tidak direspon positif dimana tidak ada gepeng yang bersedia mengikuti pelatihan tersebut.

3. Pembinaan kepada Gepeng

Setelah selesai diadakan pelatihan kepada gepeng maka di hari akhir gepeng diberikan bimbingan sosial. Pihak Dinas Sosial Kota Yogyakarta mendatangkan narasumber dari KPA (Komisi Peduli AIDS) untuk memberikan motivasi bagi gepeng terkait dengan kesehatan dan pencegahan bahaya HIV-AIDS. Hasil dari bimbingan sosial tersebut adalah banyak anak yang masih belum tahu terkait dengan penyakit HIV-AIDS, bagaimana dampaknya dan bagaimana pencegannya. Anak-anak dan gepeng yang mengikuti bimbingan sosial antusias dengan materi yang diberikan. Dari 20 anak yang mengikuti bimbingan sosial, mayoritas menyatakan ketertarikan dan antusiasnya dengan ada yang bertanya dan memperhatikan dengan seksama.

Kegiatan lain dalam penanganan gepeng oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta adalah pembinaan terhadap orang tua dari anak jalanan dan gepeng yang dimulai pada tahun 2015. Pada saat dilakukan pembinaan maka orang tua diberikan motivasi agar anak-anaknya tidak turun ke jalan karena hal tersebut melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah dan bagi yang melanggar akan diberikan sanksi. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Kita juga ada pembinaan untuk keluarganya setiap tahun ada mulai tahun 2015. Karena jumlah anjal semakin menurun kita untuk orang tuanya. Harapan kami orang tua juga bisa memperhatikan anaknya utuk tidak turun di jalan. Saat pelatihan itu kan kita panggil satu-satu pekerjaannya apa, ternyata ada yang ngaku kerja di jalanan ngamen. Kita motivasi untuk tidak turun ke jalan karena itu melanggar Perda” (Hasil wawancara dengan Ibu Nunik selaku Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada tanggal 27 September 2016).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan gepeng di wilayah Yogyakarta, Dinas Sosial Kota Yogyakarta bekerjasama dengan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) untuk membantu dalam melakukan pendekatan kepada anak jalanan dan gepeng. Pihak Dinas Sosial Kota Yogyakarta menyediakan anggaran khusus dalam kegiatan yang melibatkan PSM tersebut. Selanjutnya, Dinas Sosial Kota Yogyakarta juga melakukan koordinasi secara kontinyu dengan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dalam hal penertiban anak jalanan dan gepeng sedangkan untuk KPA (Komisi Peduli AIDS) melakukan koordinasi pada saat akan dilaksanakan pembinaan kepada anak jalanan dan gepeng.

Tim internal dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam penanganan gepeng sendiri ada sebanyak 5 orang yang melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal. Dari masing-masing pegawai di Dinas Sosial Kota Yogyakarta apabila ada kegiatan di luar yang diikuti oleh seksi lain maka ikut menyampaikan sosialisasi. Begitu juga apabila sedang berada di masyarakat, ikut serta membagikan leaflet, menyampaikan sosialisasi pada acara ceramah keagamaan di masjid dan kegiatan kemasyarakatan lainnya serta pemaparan program setiap awal tahun kepada PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan. Untuk kegiatan Dinas Sosial Kota Yogyakarta tidak secara resmi mengundang wartawan baik cetak maupun elektronik, akan tetapi wartawan sesuai tugasnya selalu mencari berita yang layak untuk diberitakan. Salah satunya kegiatan di Dinas Sosial Kota Yogyakarta seperti penertiban anak jalanan dan gepeng, pelatihan dan pembinaan secara aktif wartawan melakukan pemberitaan dan dari Dinas Sosial sebagai narasumber.

Implementasi program penanggulangan gepeng di wilayah Kota Yogyakarta terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa untuk peluang yang ada adalah peluang kerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak di bidang pemberdayaan anak jalanan. Melalui kerjasama tersebut maka LSM dan Dinas Sosial Kota Yogyakarta dapat membuat suatu program dengan bantuan tenaga sebagai pelaksana dan konseptor dari LSM. Pihak Dinas Sosial juga dapat bekerjasama dengan perusahaan swasta melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Iya kita sebenarnya ada peluang untuk kerjasama dengan LSM dan swasta biasanya melalui program CSR, nanti bisa buat program yang berguna untuk anak jalanan misal keterampilan dengan bantuan dana dari program CSR tersebut. Nanti juga ada pertanggungjawabannya bagaimana progress program tersebut dan kita beri laporan kepada penyandang dana” (Hasil wawancara dengan Ibu Nunik selaku Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada tanggal 27 September 2016).

Program yang dapat direalisasikan jika ada kerjasama dengan LSM dan perusahaan swasta melalui program CSR diantaranya adalah pembangunan rumah singgah. Rumah singgah tersebut dapat dimanfaatkan oleh gepeng untuk belajar, membaca buku, berlatih keterampilan dan lain sebagainya. LSM dapat terlibat dalam hal perencanaan program dan tenaga pelaksana yang bertanggungjawab atas rumah singgah tersebut dengan pengawasan di bawah Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

Peluang lainnya yang diharapkan dapat terealisasi adalah ke depannya pihak Dinas Sosial Kota Yogyakarta dapat bekerjasama dengan pelaku industri kreatif. Kerjasama tersebut dapat berupa bantuan pelatihan keterampilan kepada gepeng agar dapat siap bekerja. Seperti diketahui gepeng yang hidup di jalanan minim keterampilan sehingga gepeng butuh keterampilan yang dapat langsung disalurkan di dunia kerja. Diharapkan dengan gepeng yang bekerja dan mempunyai kesibukan yang menghasilkan maka sudah tidak ada lagi niat atau motivasi untuk kembali turun ke jalanan. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara penulis berikut ini;

“Kedepan kita bisa kerjasama dengan pelaku industri kreatif yang dapat memberikan pelatihan bermanfaat yang dapat langsung disalurkan kerja sehingga gepeng tidak ada waktu dan niat untuk kembali ke jalan karena sudah sibuk kerja” (Hasil wawancara dengan Ibu Nunik selaku Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada tanggal 27 September 2016).

Peluang kerjasama dengan pelaku industri kreatif masih sangat terbuka lebar, mengingat pada saat ini banyak pelaku industri yang membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja yang mau untuk dibina dan diberikan pelatihan khusus sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan meminimalisir biaya perekrutan pegawai. Melalui kerjasama dengan pelaku industri kreatif tersebut maka diharapkan gepeng dapat diikutsertakan melalui pelatihan dan dapat disalurkan langsung untuk bekerja melalui perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut.

Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam penanganan terhadap gepeng pada saat pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan. Hambatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a). Kebiasaan dari gepeng yang hidup di jalanan dan sulit untuk diberikan arahan, pengertian.

Anak-anak yang hidup di jalan diupayakan untuk dibawa ke panti sosial untuk diberikan penghidupan yang layak dan keterampilan yang memadai dan bagi yang putus sekolah akan diberikan bantuan untuk dapat melanjutkan ke sekolah, akan tetapi untuk mengajak anak-anak tersebut Dinas Sosial Kota Yogyakarta merasa kesulitan karena kebiasaan anak yang sudah terbiasa hidup di jalan.

b). Gepeng lari dari kejaran petugas

Pada saat dilaksanakan razia oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta gepeng yang hidup di jalanan terutama yang masih muda memilih untuk melarikan diri dengan lari menghindari petugas. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Hambatannya itu mereka yang sudah biasa hidup di jalan untuk di bawa ke panti selama ini kan seperti di paksa. Padahal kalau tidak di paksa tidak ada yang mau kecuali sakit itu di bawa polisi ke rumah sakit mau. Jadi selama ini kita seperti memaksa terutama yang di berita berita kan Dinas Ketertiban yang selalu di sorot, tetapi kalau tidak seperti itu nyatanya kita motivasi tidak ada yang mau ikut ke panti. Kendalanya pada saat kita razia biasanya yang masih muda-muda yang potensial sudah kabur, lebih pintar mereka larinya juga cepetkan” (Hasil wawancara dengan Ibu Nunik selaku Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada tanggal 27 September 2016).

Anak-anak yang hidup di jalanan mental yang dimiliki masih belum terbentuk dan biasanya menginginkan kehidupan yang praktis dalam mendapatkan uang. Hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah, bahkan ada yang belum pernah

mengenyam pendidikan formal sama sekali. Dari pihak Dinas Sosial Kota Yogyakarta ada program bagi anak yang sudah putus sekolah untuk dilakukan pembinaan program 25 hari agar tidak turun ke jalan lagi, diharapkan dengan pembinaan anak akan mendapatkan arahan dan keterampilan sehingga dapat kembali ke sekolah atau berwirausaha.

c). Hambatan dari pekerjaan itu sendiri

Hambatan dalam melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Bagi pekerja di Dinas Sosial Kota Yogyakarta atau Tim Penjangkauan Gepeng dalam melaksanakan tugas sering mendapatkan anak jalanan yang kondisinya memprihatinkan seperti badan kotor dan bau, pakaian lusuh sehingga anggota tim yang bertugas untuk membawa anak jalanan tersebut menjadi khawatir akan terkena penyakit yang dibawa oleh anak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Banyak keluh kesah suka dukanya mba. Salah satunya yang pernah kami alami, waktu itu kami pernah razia gelandangan yang sudah 14 tahun di jalanan, di daerah pasar kuncen ke utara. Itu sudah telanjang rambutnya sudah gimbal sebadan. Itu yang jangkau pada muntah-muntah. Keesokan harinya saya sendiri kena herpes, dari polresta Pak Arif kena juga. Kita sudah akrab dengan bau-bau mistik mba” (Hasil wawancara dengan Ibu Suheni selaku Staf RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta/ Tim Penjangkauan Gepeng pada tanggal 9 November 2016).

“Maaf ya tak ceritain, kalau kendalanya gepeng kan banyak yang buang kotoran dicelana ya kita harus tahan sama aroma-aroma mistisnya, pernah ada yang 14 tahun buang kotoran di celana dia udah gak bisa jalan jadi kita angkat pakai kain bawa kerumah sakit, setelah itu pada kena herpes seminggu pada demam. Ada juga orang gila yang bawa senjata tajam kalau mau diamankan biasanya mereka ngamuk, ya itu agak susah karena kadang kadang harus agak keras mengamankannya” (Hasil wawancara dengan Bapak Oka Mahendra selaku Kabid.

Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, pada tanggal 22 September 2016).

Gepeng yang keadaannya memprihatinkan tersebut juga dialami oleh petugas yang melakukan penertiban dari Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta sehingga menyebabkan tertular penyakit herpes karena kondisi dari gepeng yang berpenyakit. Gepeng juga ada yang membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga sehingga dari petugas harus berhati-hati dan dengan upaya keras dalam penertibannya.

d). Kesadaran gepeng masih rendah

Kesadaran dari anak jalanan yang dirazia oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta masih rendah. Berbagai program yang diselenggarakan tidak berhasil karena kesadaran dan minat minim. Beberapa program tersebut diantaranya adalah nikah masal bagi anak jalanan, akan tetapi terdapat beberapa anak jalanan yang akan mengikuti program tersebut yang pada akhirnya tidak berhasil karena sesuatu hal. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Pernah juga kena razia kami kirim ke camp dari sana dikirim ke panti Bekasi diberi pelatihan, nanti mungkin bisa di nikahkan masal. Kami kan kedatangan dari Bekasi, kami di berikan jatah untuk mengirimkan gepeng kesana untuk pelatihan dan nikah masal. Pernah ada dari Wonosari sudah kami kirimkan kesana, sudah ikut pelatihan pas mau di nikahkan dia mala kabur. Padahal kalau gak nikahkan dia deket sama lelaki yang ini deket itu deket. Kita juga kan seneng sudah mau berhasil bisa meningkatkan derajat hidup dia, sudah kita urus semuanya tinggal nih ijab. Saya di wa “Bu gagal” saya sedih juga mba, tanggung jawab kita kan besar juga. (Hasil wawancara dengan Ibu Suheni selaku Staf RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta/ Tim Penjangkauan Gepeng pada tanggal 9 November 2016).

Kendala dari kesadaran anak jalanan yang masih minim tersebut maka Tim Penjangkauan Gepeng dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta melakukan upaya dengan bekerjasama dengan sakti peksos yaitu pekerja sosial yang sudah berpengalaman di bidangnya dan mendapatkan pembinaan di tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua PMS Kota Yogyakarta, dapat diketahui bahwa untuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dari Perda Gepeng di wilayah Kota Yogyakarta adalah upaya untuk menjangkau gepeng tersebut mendapatkan perlawanan dari gepeng sendiri. Gepeng yang sudah dibawa oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta kemudian kembali turun ke jalan, terutama bagi kelompok yang mengkoordinir gepeng untuk keuntungan diri sendiri dimana gepeng dipekerjakan di jalanan misal untuk mengemis, mengamen. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut ini:

“Begini mba kadang-kadang untuk menjangkau gepeng sendiri dengan alasan klasik mereka kita jangkau nanti *ngeyel* balik lagi. Apalagi kalau ada yang koordinir yang nge drop pakai mobil kadang-kadang temen-temen suka salah paham dengan coordinator itu, sampai mau berantem juga” (Hasil wawancara dengan Bapak Kasmal selaku Ketua PMS Kota Yogyakarta pada tanggal 10 November 2016)

Masih minimnya kesadaran dan motivasi dari gepeng untuk berusaha menjalani hidup dengan layak. Hal tersebut menghambat kerja dari petugas Dinas Sosial dalam melakukan pengamanan terhadap gepeng agar tidak turun ke jalan dan mengganggu ketertiban lalu lintas dan masyarakat. Kondisi dari gepeng yang memprihatinkan seperti pakaian lusuh, badan kotor bahkan ada yang sampai tidak memakai baju membuat petugas menjadi khawatir untuk mendekati karena ada rasa takut untuk terkena penyakit yang dibawa oleh gepeng tersebut. Pada saat ini juga gepeng yang turun di jalan sudah banyak yang dikoordinir sehingga jumlahnya semakin banyak ditemui di jalanan, sehingga untuk

menuntaskan kasus gepeng membutuhkan sosialisasi dan upaya yang tegas dari aparat yang berwenang.

e). Kesadaran dari masyarakat untuk membantu cukup tinggi

Masyarakat yang sedang berkendara di jalanan banyak menemui anak jalanan dan gepeng yang sedang duduk-duduk di pinggir jalanan, ada juga yang mengamen, dan menawarkan jasa lap kendaraan. Tentu saja kondisi tersebut membuat risih sebagian orang dan ada juga yang iba, beberapa orang pada saat ini masih banyak yang memberikan uang sekedarnya bagi anak jalanan dan gepeng tersebut walaupun sudah ada aturan terkait dengan larangan pemberian uang kepada anak jalanan dan gepeng. Tingginya tingkat solidaritas masyarakat tersebut dikarenakan tujuan ingin menolong secara sesama yang membutuhkan, akan tetapi caranya tidak dibenarkan oleh pemerintah karena ada larangan tersebut.

Dalam Islam pada dasarnya ada perintah untuk bersedekah, berbagi kepada sesama terutama yang membutuhkan. Berikut ini merupakan kutipan ayat Al-Quran yang berisikan perintah bersedekah:

- a. “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?” (QS. Al Munafiqun: 10)
- b. “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al Baqarah: 195)

- c. “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (QS. Al Baqarah: 215)

Kutipan dalam ayat A-Quran tersebut di atas dapat menjadi dasar bahwa bersedekah sangatlah penting dan barang siapa yang bersedekah maka Allah akan melipatgandakan rejekinya. Hal tersebutlah yang kemudian dilakukan oleh masyarakat pada saat ini dengan tetap memberikan uang sekedarnya kepada anak jalanan dan gepeng yang ditemui di jalanan karena tidak tega dengan melihat kondisi anak jalanan dan gepeng tersebut. Adanya himbauan larangan untuk memberikan uang kepada anak jalanan dan gepeng tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat karena merasa pemberian uang tersebut dirasa dapat dipergunakan untuk membeli makan atau minum. Dari sisi pemerintah sendiri yaitu Dinas Sosial Kota Yogyakarta, pemberian uang tersebut dapat membuat anak jalanan dan gepeng menjadi nyaman sehingga malas untuk bekerja selayaknya. Adanya anak jalanan dan gepeng di pinggir jalan baik sendiri dan gerombolan tersebut dapat memunculkan kriminalitas di jalan dan tidak nyaman di pandang mata. Oleh karena itu Dinas Sosial Kota Yogyakarta berharap kepada masyarakat yang akan memberikan sumbangan, sedekah dapat diberikan di panti, masjid, lembaga zakat agar sasarannya tepat.

f). Adanya Perlawanan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang Pro terhadap Gepeng

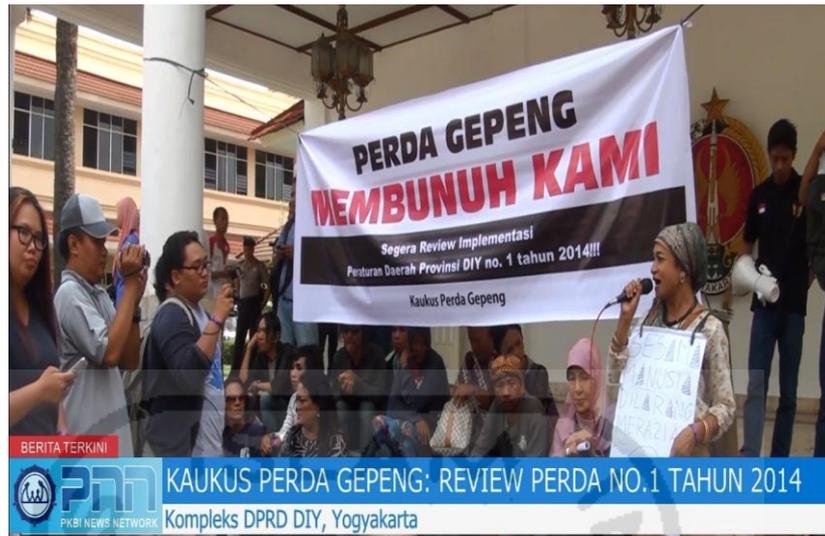
Diterbitkannya Perda No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gepeng mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, salah satunya ada yang menolak Perda tersebut. Kumpulan dari 19

komunitas yang ada di DIY menuntut Perda tersebut untuk dibatalkan. Alasannya adalah implementasi dan isi dari Perda tersebut dinilai mengandung unsur kekerasan dan melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Beberapa LSM yang menolak Perda tersebut diantaranya adalah LBH Jogja, PLU Satu Hati, Ikatan Warian Yogyakarta, Save Streets Children, PKBI DIY, Rumah Keong, IHAP. LSM tersebut bersatu menolak Perda dikarenakan terdapat beberapa alasan, yaitu:

- a. Perda dinilai tidak realistis. Dalam Perda Gepeng pada Pasal 1 menunjukkan upaya koersif dalam melindungi dan memberdayakan pengemis. Pada pasal pemidanaan dinilai tidak realistis karena menggunakan kata dan/atau yang dapat dipahami pelanggar Perda bisa mendapatkan kedua hukuman tersebut yaitu kurungan dan denda. Denda yang diberikan kepada pelanggar Perda juga dinilai terlalu besar yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
- b. Panti rehabilitasi yang disediakan tidak layak
Panti rehabilitasi (camp assessment) dinilai tidak layak, karena tidak tersedia ruangan yang nyaman, alat kebersihan tidak layak, pemenuhan kebutuhan makan yang tidak layak dan masih banyak lagi kekurangan. Jumlah pekerja sosial atau pendamping bagi anak jalanan dan gepeng di panti tidak memadai yang jumlahnya hanya 12 orang, sementara 1 orang mendampingi 5 sampai dengan 20 orang anak jalanan dan gepeng.

Berikut ini merupakan beberapa gambar dari aksi yang dilakukan oleh LSM terkait dengan penolakan terhadap Perda Gepeng:

Gambar 3.12 Aksi Penolakan Perda Gepeng



Sumber: <https://www.google.co.id/>

Gambar 3.13

Aksi Penolakan Perda Gepeng



Sumber: <https://www.google.co.id/>

Gabungan dari LSM yang menolak Perda Gepeng tersebut membuat press release dan petisi online yang tujuannya adalah mendesak agar DPRD memberikan kepastian audiensi tentang Perda Gepeng. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan mengirimkan surat permohonan audiensi kepada DPRD DIY.

Gambar 3.14

Konferensi Pers Aksi Penolakan Perda Gepeng



Sumber: <http://www.harianjogja.com/baca/2015/04/17/perda-gepeng-dituntut-dibatalkan-setujukah-595625>

Kaucus dari komunitas dan LSM yang menolak Perda **Gepeng** menilai bahwa substansi Perda DIY No. 1 Tahun 2014 yang seharusnya menjadi penanganan gelandangan dan pengemis, dan menjadi solusi untuk persoalan di jalanan ternyata justru menjadi instrumen peraturan daerah yang mencerminkan diskriminasi dan kekerasan negara. Kemudian diantaranya mencerminkan kebijakan kriminalisasi oleh Negara dan pelanggaran HAM terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng). Substansi Perda DIY No 1 Tahun 2014 yang tidak jelas, berdampak sistemik kepada implementasi yang diskriminatif, kriminalisasi

oleh negara terhadap berbagai perbuatan yang terkait dengan keberadaan gelandangan dan pengemis(gepeng), pemiskinan, stigma buruk kepada gepeng. Kaukus dari komunitas dan LSM yang menolak Perda Gepeng kemudian menyatakan sikap sebagai berikut:

- a. Menolak substansi Perda No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang merepresentasikan stigma, kriminalisasi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM.
- b. Mengecam keras tindak kekerasan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam implementasi Perda Gepeng, diantaranya kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan sosial, penangkapan sewenang-wenang termasuk salah tangkap, perlakuan tidak manusiawi dan pengabaian di *camp assessment*, pemaksaan ekspresi gender, serta tindakan-tindakan lain yang tidak menunjukkan penghormatan terhadap HAM.
- c. Perda No 1 Tahun 2014 ini merupakan kegagalan Pemerintah DIY dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, hak sipil dan politik warga dalam bentuk kriminalisasi.
- d. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak seharusnya mendefinisikan gelandangan, pengemis, waria sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial yang pantas disingkirkan.

Adanya penolakan dari gabungan dari komunitas dan LSM yang ada di Yogyakarta tersebut berdampak pada pelaksanaan dari Perda Gepeng tersebut.

BAB IV
MENIMBANG PELUANG DAN HAMBATAN FUNGSI DINAS SOSIAL
DALAM PENANGANAN GEPENG

1. Gepeng: Potret Buram di Kota Istimewa

Keberadaan gepeng di sebuah perkotaan menjadi salah satu masalah krusial yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan dari UUD 1945 Pasal 34 yang menyatakan bahwa “anak terlantar dan fakir miskin di pelihara oleh Negara” menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk memelihara anak-anak yang terlantar dalam hal ini juga termasuk anak jalanan dan gepeng serta fakir miskin. Begitu juga yang dialami oleh pemerintah Kota Yogyakarta, gepeng menjadi permasalahan serius yang perlu untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Fenomena yang terjadi adalah banyak gepeng yang datang dari luar daerah dan masuk ke wilayah Kota Yogyakarta. Gepeng banyak yang berkeliaran di jalanan, mengamen dan mengemis di perempatan jalan dan tidur di emperan toko pada malam hari. Hal tersebut tentu saja membawa dampak yang kurang baik bagi Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota tujuan wisata. Banyak pelajar/mahasiswa dari luar daerah dan wisatawan domestik maupun luar negeri yang datang ke Kota Yogyakarta.

Gelandangan merupakan dampak negatif dari adanya pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan. Keberhasilan pembangunan di wilayah perkotaan dan keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan mengakibatkan arus urbanisasi masyarakat desa menuju kota yang menyebabkan munculnya gelandangan di daerah perkotaan. Ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki serta minimnya keterampilan sehingga sulit untuk mencari pekerjaan. Pola pikir yang rendah tersebut dan kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar

serta pengaruh pergaulan menyebabkan banyak yang terjerumus menjadi gepeng.

Adanya gepeng yang seolah terus meningkat dari waktu ke waktu walaupun dari pihak pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya dengan adanya razia gepeng, akan tetapi keberadaan gepeng tetap saja tidak berkurang akan tetapi terus bertambah. Menghadapi fenomena tersebut, pihak pemerintah Kota Yogyakarta mencanangkan pembentukan Raperda Penanganan Gepeng. Pertimbangan dari Raperda tersebut adalah pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan. Gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum. Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah Kota Yogyakarta membentuk payung hukum bagi gepeng dan pengemis dengan mengesahkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gepeng dan Pengemis. Peraturan Daerah tersebut telah mulai diberlakukan pada 1 Januari 2015.

Setelah 2 tahun sejak disahkannya Perda Gepeng tersebut fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada gepeng yang banyak ditemui di jalanan. Masyarakatpun banyak yang iba dengan adanya gepeng dan memberikan uang receh bagi gepeng yang meminta-minta di pinggir jalan. Padahal memberikan uang bukan merupakan solusi bagi gepeng, dalam Perda tersebut juga ada sanksi cukup berat, yakni bagi warga yang diketahui

masih memberikan uang receh bagi pengemis dan gelandangan di jalan dapat terkena pidana kurungan atau denda. Perda Penanggana Gepeng tersebut juga pada saat ini masih menimbulkan pro dan kontra terkait dengan persoalan HAM (Hak Asasi Manusia), ditambah dinilai pemerintah daerah belum cukup mampu untuk memberikan penanganan gepeng yang layak karena tempat rehabilitas masih sangat minim dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bagi gepeng yang jumlahnya banyak.

2. Fungsi Dinas Sosial dalam Penanggulangan Gepeng di Wilayah Kota Yogyakarta

Pelaksanaan tugas dalam menginformasikan apa yang menjadi tugas dan fungsi suatu instansi agar diketahui oleh masyarakat luas adalah merupakan bagian dari tugas humas. Menurut Jefkins (2003:10), humas adalah suatu bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar antara satu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik berlandaskan pada saling pengertian. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait dengan fungsi humas dari instansi pemerintahan yaitu Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam implementasi penanggulangan masalah gepeng di Kota Yogyakarta.

Dinas Sosial merupakan SKPD pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi yang diatur oleh undang-undang. Salah satu yang menjadi kewenangan dari Dinas Sosial adalah melakukan pencegahan, penertiban dan pembinaan terhadap permasalahan gepeng. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan tersebut perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas agar dapat mengetahui dan ikut serta membantu dalam penanganan gepeng di Kota Yogyakarta. Permasalahan gepeng seolah menjadi fenomena gunung es, dimana sudah rutin dilakukan penertiban oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta beserta dengan Dinas

Ketertiban Kota Yogyakarta akan tetapi masih saja banyak ditemui gepeng yang ada di jalanan. Gepeng tersebut berasal dari masyarakat Kota Yogyakarta sendiri ataupun datang dari luar daerah. Oleh karena itu Dinas Sosial Kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam penanganan gepeng yaitu dalam hal pembinaan dan pemberian pelatihan keterampilan bagi gepeng. Untuk penertiban gepeng, Dinas Sosial Kota Yogyakarta berkoordinasi dengan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dan pihak kepolisian.

Menurut Effendy (2002: 39-4), humas pemerintah memiliki fungsi pokok:

- a. Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintahan yang diwakilinya
- b. Memberi pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan informasi mengenai kebijaksanaan hingga mampu mensosialisasikan
- c. Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah dan masyarakat
- d. Berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan baik jangka panjang maupun jangka pendek (Effendy, 2002: 39-40)

Terkait dengan fungsi pokok yang dimiliki oleh humas pemerintah tersebut maka humas harus berperan aktif dalam mengkomunikasikan tugas dan fungsi instansinya kepada masyarakat serta kebijakan apa yang dikeluarkan oleh instansi agar diketahui secara luas. Komunikasi penting dilakukan karena dapat menyampaikan identitas si penyampai pesan, dan memberikan pengaruh, memberikan pemahaman kepada orang lain untuk mendapatkan informasi yang akan dimaksud. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Scheidel dalam Mulyana (2000: 4) yang mengemukakan bahwa:

“Kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang disekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Karena komunikasi tidak selalu berhubungan dengan verbal atau menggunakan bahasa yang diucapkan”

Menurut Ruslan (2005:99), humas pemerintah tidak memiliki kepentingan komersial dan bisnis. Kegiatannya adalah melayani masyarakat, menciptakan informasi dan komunikasi secara terbuka dengan masyarakat maupun media. Begitu juga yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsi kehumasannya untuk menyampaikan pesan/informasi kepada masyarakat luas. Effendy (2002: 39-40) menyatakan bahwa tujuan humas pemerintah adalah memberikan penerangan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan sistem pemerintah daerah. Tujuan dan fungsi kehumasan di pemerintahan pada dasarnya berupaya menjalin komunikasi dua arah yang berarti mengkomunikasikan segala kegiatan dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Fungsi kehumasan dijalankan oleh humas *officer* dalam menjalankan tugas dan operasionalnya sebagai komunikator, mediator dan organisator. Effendi mendeskripsikan fungsi humas sebagai berikut:

- a. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi
- b. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan publik eksternal
- c. Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dan organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publik kepada organisasi
- d. Melayani publik dan menasihati pimpinan demi kepentingan umum
- e. Operasionalisasi dan organisasi humas adalah bagaimana membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya, untuk

mencegah terjadinya rintangan psikologis baik yang ditimbulkan dari pihak organisasi maupun dari pihak publiknya

Terkait dengan fungsinya sebagai seorang komunikator, mediator dan organisator tersebut di atas maka dalam penanganan terhadap gepeng di Kota Yogyakarta penulis dapat memberikan analisis sebagai berikut:

a. Fungsi Humas sebagai Komunikator dalam Penanganan Gepeng di Kota Yogyakarta

Fungsi humas sebagai komunikator adalah sebagai penyampai pesan/informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini humas menyampaikan apa yang menjadi program pemerintah terkait dengan penanganan gepeng. Sebagai seorang komunikator maka humas Dinas Sosial Kota Yogyakarta melaksanakan hal berikut ini:

1) Sosialisasi secara Langsung Penanganan Gepeng di Kota Yogyakarta

Sosialisasi penanganan gepeng merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam melaksanakan fungsi kehumasan. Disinilah pentingnya fungsi humas dalam melaksanakan sosialisasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam penanganan masalah gepeng. Adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gepeng perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara luas agar masyarakat mengetahui dan ikut serta membantu program pemerintah daerah.

Rachmadi (1994:22) menyatakan bahwa fungsi humas pemerintah adalah mengatur lalu-lintas, sirkulasi informasi internal dan eksternal dengan memberikan informasi serta penjelasan seluas mungkin kepada Publik atau mengenai kebijakan, program, serta tindakan-tindakan dari lembaga atau organisasinya. Dinas Sosial Kota

Yogyakarta dalam pelaksanaan sosialisasi penanganan gepeng bekerjasama dengan tim penjangkauan Perda Gepeng yang memiliki tugas menjangkau target sasaran. Harapannya dengan adanya tim penjangkauan tersebut dapat lebih mudah berkomunikasi dengan gepeng dan dapat segera diberikan penanganan. Tim penjangkauan tersebut melibatkan Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dan Polresta Kota Yogyakarta, ada juga anggota dari PSM (Pekerja Sosial Masyarakat). Tim penjangkauan melakukan kunjungan kepada gepeng dan orang tua sehingga dapat terjalin komunikasi yang terarah sehingga pesan dapat mudah disampaikan. Harapan dari adanya tim penjangkauan tersebut adalah agar gepeng tidak turun ke jalan dan memberikan informasi kepada orang tua agar memiliki peran dalam memberikan nasihat/arahan kepada anaknya yang menjadi gepeng karena peran orang tua/keluarga sangat penting.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta terkait dengan penanganan gepeng merupakan wujud dari kebijakan pemerintah agar masyarakat luas mengetahui apa yang menjadi program dari pemerintah daerah, hal tersebut juga mendukung dari era keterbukaan publik. Kebijakan pemerintah mengenai keterbukaan informasi publik merupakan sebuah kebijakan komunikasi yang dibuat dengan tujuan untuk melancarkan sistem komunikasi di Indonesia. Khususnya dalam dimensi komunikasi organisasi karena organisasi merupakan sebuah badan publik yang menjalankan proses komunikasi kepada berbagai pihak.

Menurut penulis sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tersebut cukup efektif dalam menekan tumbuhnya gepeng di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan PSM yang terjun ke lapangan dapat berkomunikasi secara langsung kepada anak dan orang tua/keluarga yang rentan menjadi gepeng. Adanya komunikasi efektif yang terjalin antara PSM dengan orangtua akan dapat diketahui

permasalahan yang dihadapi oleh anak sehingga dapat dicarikan solusinya dan meminimalisir potensi menjadi gepeng. Dinas Sosial Kota Yogyakarta yang mensasar kegiatan masyarakat perlu ditingkatkan sehingga menjadi sebuah agenda yang rutin. Dinas Sosial Kota Yogyakarta tidak hanya sekedar memberikan sosialisasi pada saat acara yang melibatkan masyarakat seperti PKK, karang taruna saja, akan tetapi juga ikut serta dalam melakukan evaluasi terkait dengan hasil sosialisasi yang telah dilaksanakannya.

2) Menggunakan Media untuk Sosialisasi dalam Penanggulangan Gepeng

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gepeng. Peraturan Daerah tersebut perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas. Dinas Sosial Kota Yogyakarta berusaha untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas dengan membuat media sosialisasi. Media sosialisasi tersebut berupa papan himbuan yang diletakkan di lokasi titik strategis seperti di perempatan jalan raya dan lokasi yang ramai. Penulis memang menemukan beberapa papan himbuan yang terpasang di lokasi strategis di wilayah Kota Yogyakarta yang berada di titik keramaian seperti perempatan lalu lintas. Akan tetapi terdapat papan himbuan yang pemasangannya tertutup oleh daun pohon yang tumbuh di pinggir jalan sehingga menutupi papan himbuan tersebut dan menjadi tidak terbaca. Hal tersebut sangat disayangkan karena pesan menjadi tidak tersampaikan. Oleh sebab itu, Dinas Sosial Kota Yogyakarta perlu melakukan evaluasi dan pengecekan secara rutin terhadap papan himbuan yang telah dipasang, apakah papan himbuan masih berdiri tegak tiangnya, apakah papan himbuan mengganggu kondisi sekitar pemasangan papan himbuan.

Media sosialisasi selanjutnya yang dipergunakan adalah spanduk, spanduk dipasang di setiap instansi dan kantor kecamatan. Dinas Sosial Kota Yogyakarta juga membuat leaflet/selebaran terkait dengan permasalahan gepeng dan Peraturan Daerah yang mengaturnya yang disebarluaskan kepada masyarakat, instansi pemerintahan, kantor kecamatan sehingga dapat dibaca oleh masyarakat yang datang ke kantor pemerintahan. Leaflet yang dibuat tersebut dibagikan kepada masyarakat oleh tim PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) pada saat kegiatan karang taruna, PKK, sholat Jumat di masjid sehingga lebih tepat sasaran.

Menurut analisis penulis, fungsi kehumasan terutama dalam sosialisasi perlu ditingkatkan kembali terutama dengan menggunakan beberapa media seperti media cetak dan elektronik. Media cetak dapat dilibatkan dalam pelaksanaan fungsi kehumasan, seperti dalam hal *press conference*, peliputan kegiatan penertiban, dan pelaksanaan program pelatihan dan pembinaan terhadap gepeng. Media cetak seperti koran lokal dapat menginformasikan kegiatan tersebut dalam bentuk berita sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas terkait dengan tugas dan kewenangan Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam penanggulangan gepeng. Berdasarkan hasil penelitian penulis *press release* terkait dengan kegiatan Dinas Sosial Kota Yogyakarta masih kurang maksimal karena penulis kesulitan untuk mencari pemberitaan yang ada di media baik cetak maupun elektronik terkait dengan informasi penanganan gepeng. Untuk pemberitaan terkait dengan Perda Gepeng, penulis berhasil menemukan hanya satu pemberitaan yang diulas oleh media cetak lokal yaitu Kedaulatan Rakyat yang terbit pada akhir tahun 2014, yang berisikan informasi terkait dengan terbitnya Perda Gepeng.

Selanjutnya, Dinas Sosial Kota Yogyakarta juga masih belum maksimal menggunakan media internet melalui website pemerintah kota Yogyakarta, pemberitaan terkait dengan penanganan gempa hanya ada di website pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau hanya ada di tingkat provinsi saja, sementara website pemerintah kota Yogyakarta tidak ada sama sekali yang membahas program tersebut. Menurut penulis, hal tersebut sangat disayangkan karena website yang sudah ada tidak dipergunakan secara maksimal. Penggunaan media baru seperti internet dengan menggunakan website, aplikasi media sosial seperti *facebook*, *twitter* akan lebih memudahkan pesan sampai kepada masyarakat, masyarakat yang menerima pesan juga lebih banyak, pesan cepat sampai. Selain itu dengan penggunaan internet, biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah.

Pemilihan media sangat mempengaruhi pesan dapat tersampaikan dengan baik atau tidak sehingga pemilihan media harus tepat dan sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak, serta jenis pesan yang disampaikan (Effendy, 2001: 37). Effendy (2001: 37) menyatakan bahwa untuk mencapai sasaran komunikasi maka dapat dipilih salah satu atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan disampaikan, dan teknik yang akan dipergunakan. Pemilihan media massa lokal sebagai media sosialisasi menurut penulis adalah penting karena media lokal tujuan utama adalah mengangkat berita lokal yang menjadi keunggulan daerahnya. Pemberitaan di media lokal juga ditunjang dengan media nasional agar pesan dapat diketahui oleh masyarakat secara luas karena jangkauan media nasional mencakup seluruh Indonesia. Kerjasama dengan media *online*, juga menjadi pilihan yang tepat karena berita dapat disampaikan dengan cepat kepada masyarakat yang terhubung dengan internet. Melalui media *online* berita dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja dan kapan saja tanpa terhambat tempat dan waktu hanya dengan akses internet saja.

Berdasarkan uraian terkait dengan fungsi kehumasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam penanganan gepeng tersebut di atas maka dapat diuraikan terkait dengan model komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Penyampaian pesan dalam sosialisasi tidak terlepas dari aktivitas membujuk dan mendidik. Dinas Sosial Kota Yogyakarta terkait dengan penanganan gepeng menggunakan model komunikasi yang digunakan oleh seorang Humas untuk melakukan distribusi informasi kepada khalayaknya. Tersampainya informasi kepada publik dapat diketahui melalui efek yang diberikan setelahnya. Efek ini bisa berupa tanggapan langsung atau kritikan yang akan disampaikan kemudian. Berikut ini adalah uraiannya:

1) *Source* (Sumber)

Sumber penyampai pesan dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Dinas Sosial Kota Yogyakarta secara langsung menyampaikan pesan kepada masyarakat luas terkait dengan penanganan gepeng. Pegawai dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta datang turun langsung ke lapangan melalui kegiatan kemasyarakatan untuk menyampaikan program pemerintah terkait penanganan gepeng. Untuk lebih memudahkan kerja dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta menggandeng PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang mempunyai tugas melakukan penjangkauan kepada masyarakat.

2) *Message* (Pesan)

Pesan yang disampaikan melalui sosialisasi baik langsung ataupun dengan menggunakan media sosialisasi adalah mengenai penanganan gepeng. Untuk masing-masing media tentu saja pesan yang disampaikan berbeda karena menyangkut keterbatasan dari

media tersebut. Informasi lebih banyak disampaikan melalui sosialisasi secara langsung tatap muka dengan masyarakat, sedangkan apabila menggunakan media seperti poster, spanduk, leaflet maka pesan yang disampaikan terbatas.

3) Channel (Media)

Dinas Sosial Kota Yogyakarta menggunakan beberapa media dalam menyampaikan pesan terkait dengan penanganan gepeng. Media tersebut berupa papan himbauan, spanduk, poster, leaflet. Diharapkan dengan penggunaan media tersebut masyarakat luas dapat mengetahuinya. Akan tetapi dari pihak Dinas Sosial Kota Yogyakarta belum memaksimalkan penggunaan media internet. Website yang dimiliki oleh pemerintah kota Yogyakarta belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengulas kegiatan dari pemerintah daerah padahal dengan menggunakan website informasi yang akan disampaikan dapat lebih banyak dan sarannya lebih luas dan informasi menjadi lebih cepat tersampaikan. Dinas Sosial Kota Yogyakarta juga belum menggunakan aplikasi media sosial yang sedang *trend* pada saat ini untuk menyampaikan pesan padahal penggunaan media sosial lebih menasar kepada masyarakat luas sehingga pesan dapat mudah tersampaikan mengingat pengguna media sosial cukup besar. Penggunaan media sosial juga hemat biaya dan pesan dapat lebih cepat sampai kepada masyarakat.

4) Receiver (Penerima)

Penerima pesan terkait dengan penanganan gepeng adalah masyarakat. Diharapkan dengan diterimanya informasi tersebut maka masyarakat dapat ikut serta membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan program pemerintah tersebut.

Masyarakat memiliki peran penting terutama melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekitarnya, harapannya adalah tidak ada gepeng yang berada di wilayahnya sehingga masyarakat perlu pro aktif dalam pencegahannya. Oleh karena itu tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah daerah saja dalam penanganan gepeng, karena peran serta dari masyarakat sangat penting sehingga masyarakat perlu pemahaman dan pengetahuan terkait penanganan gepeng.

5) *Effect* (Efek)

Efek yang timbul dari adanya sosialisasi terkait dengan penanganan gepeng adalah masyarakat menjadi bertambah pengetahuannya terkait dengan program kerja pemerintah daerah. Sosialisasi secara langsung yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta disambut positif oleh masyarakat dimana pada saat sosialisasi banyak masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Masyarakat secara umum menyambut baik akan program kerja pemerintah daerah dalam penanganan gepeng karena akan berdampak pada kenyamanan masyarakat dan bebas dari ancaman kriminalitas.

b. **Fungsi Humas sebagai Mediator dalam Penanganan Gepeng di Kota Yogyakarta**

Humas sebagai seorang mediator berfungsi sebagai penengah, memediasi suatu hal yang sedang menjadi permasalahan. Dalam hal penanganan gepeng di Kota Yogyakarta ini Dinas Sosial Kota Yogyakarta memiliki mediator yaitu PSM (Pekerja Sosial Masyarakat). Kegiatan penanganan gepeng di wilayah Kota Yogyakarta menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Kegiatan yang dilakukan tersebut meliputi

keterlibatan dari PSM (Pekerja Sosial Masyarakat). PSM merupakan mitra dari Dinas Sosial dan ikut serta aktif dalam sosialisasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gepeng. Anggota PSM telah terlatih karena sebelumnya mendapatkan bimbingan sosial dasar dan bimbingan sosial lanjut serta kode etik. PSM memiliki tugas yaitu penanganan anak jalanan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, penanganan terhadap orang tua dari anak jalanan dan kerjasama dengan masyarakat. PSM dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi 3 (tiga) tim yaitu tim utara, tim tengah dan tim selatan.

Kegiatan penanganan gepeng selanjutnya adalah dengan pelatihan keterampilan. Pelatihan diberikan kepada gepeng yang sudah tidak masuk usia sekolah. Pelatihan keterampilan disesuaikan dengan minat dari gepeng agar gepeng semangat dalam mengikutinya. Materi yang diberikan dalam pelatihan meliputi teori dan praktik dengan porsi praktik lebih besar. Selanjutnya Dinas Sosial Kota Yogyakarta mengadakan pembinaan yang tujuannya memberikan informasi terkait dengan kesehatan, kemasyarakatan dengan mendatangkan narasumber. Selain pembinaan terhadap gepeng, Dinas Sosial Kota Yogyakarta juga melakukan pembinaan kepada orang tua gepeng. Melalui pembinaan tersebut diharapkan gepeng memiliki motivasi ke depan agar menjalani hidup lebih baik lagi dengan tidak turun ke jalanan dan mendapatkan dukungan penuh dari orang tua dan keluarganya.

c. Fungsi Humas sebagai Organisator dalam Penanganan Gepeng di Kota Yogyakarta

Humas sebagai organisator dalam penanganan gepeng melakukan kegiatan melaksanakan razia gepeng yang bekerjasama dengan dinas terkait. Selanjutnya setelah adanya razia gepeng

adalah melakukan upaya rehabilitasi gepeng. Gepeng yang dirazia akan direhabilitas dan diberikan pemberdayaan. Pemberdayaan tersebut berupa keterampilan agar gepeng memiliki bekal nantinya sehingga tidak kembali lagi menjadi gepeng. Dinas Sosial Kota Yogyakarta memberikan alternative pelatihan kepada gepeng sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan agar gepeng yang menerima pelatihan dapat dengan senang mengikuti pelatihan yang diberikan dan dengan bekal pelatihan yang dimiliki nantinya dapat bekerja ataupun membuka usaha sendiri dengan keterampilan yang dimiliki. Dinas Sosial Kota Yogyakarta juga memberikan pembinaan kepada gepeng terkait dengan pembinaan spiritual dan kesehatan sebagai bekal pengetahuan bagi gepeng.

3. Analisis SWOT Program Penanggulangan Gepeng di Kota Yogyakarta

Terkait dengan penanggulangan gepeng di wilayah Kota Yogyakarta, Dinas Sosial Kota Yogyakarta menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat peluang sehingga di kemudian hari pelaksanaan penanggulangan gepeng dapat lebih maksimal. Penulis telah melakukan penelitian di lapangan terkait dengan peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan penanggulangan gepeng.

Dari hasil penelitian di lapangan, penulis melakukan analisis SWOT terhadap implementasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam penanggulangan gepeng. Menurut Jogiyanto (2005: 46), SWOT biasa digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari segala sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan eksternal dan segala tantangan yang dihadapi. Menurut Ferrel dan Harline (2005), fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis

situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman).

Berikut ini merupakan tabel SWOT dari penanggulangan permasalahan gepeng yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta:

Tabel 4.1 SWOT Penanggulangan Gepeng di Kota Yogyakarta

No	SWOT	Keterangan
1	<i>Strenght</i> (Kekuatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial Kota Yogyakarta mempunyai kekuatan dalam menjalankan perannya sebagai komunikator yaitu mampu untuk berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dan kepolisian dalam upaya preventif penanggulangan gepeng sesuai dengan amanat dalam Peraturan Daerah 2. Dinas Sosial Kota Yogyakarta mempunyai kekuatan dalam menjalankan perannya sebagai mediator yaitu memiliki PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang membantu dalam penanganan gepeng
2	<i>Weakness</i> (Kelemahan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan sosialisasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta belum memaksimalkan penggunaan website dan media sosial

		<p>2. Pegawai Dinas Sosial Kota Yogyakarta lemah dalam penggunaan media sosial, internet</p> <p>3. Jumlah SDM yang terbatas</p>
3	<i>Opportunity</i> (Peluang)	<p>1. Dalam menjalankan perannya sebagai komunikator, mediator dan organisator dalam penanganan gepeng maka Dinas Sosial Kota Yogyakarta memiliki peluang dalam melaksanakan tugasnya yaitu perkembangan era digital pada saat ini sehingga seorang humas harus menguasai dan memanfaatkan media internet. Penggunaan internet sangat tepat karena menasar banyak orang, biaya murah, efektif dan efisien dalam hal waktu</p> <p>2. Dinas Sosial Kota Yogyakarta memiliki peluang untuk dapat bekerjasama dengan swasta melalui program CSR untuk membantu membuat program pelatihan kreatif</p>
4	<i>Threat</i> (Ancaman)	<p>1. Ancaman yang dihadapi oleh humas sebagai komunikator dalam penanganan gepeng adalah adanya perlawanan dari gepeng pada saat razia yang dapat</p>

		<p>membahayakan jiwa petugas, penyakit dari gepeng yang dapat menular kepada petugas pada saat razia</p> <p>2. Ancaman dari pihak luar dalam menjalankan peran humas yaitu adanya pihak yang kontra dengan adanya Perda Gepeng sehingga dapat menghambat kinerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta</p>
--	--	---

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Berdasarkan tabel SWOT tersebut di atas berikut ini merupakan analisis penulis terkait dengan peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan penanganan gepeng.

1. *Strenght* (Kekuatan)

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing (Fred R, 2005: 47). Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Yogyakarta memiliki kekuatan yang dapat dimaksimalkan dalam penanganan gepeng. Kekuatan yang dimiliki tersebut adalah dalam menjalankan perannya sebagai komunikator. Peran sebagai komunikator tersebut maka Dinas Sosial Kota Yogyakarta mampu untuk berkoordinasi dengan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dan kepolisian dalam penertiban gepeng. Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam menjalankan perannya sebagai mediator memiliki PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang membantu dalam penanganan gepeng.

Kekuatan yang dimiliki tersebut harus dimaksimalkan sehingga dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam penanganan gepeng. Koordinasi antar instansi penting dilakukan sehingga dengan adanya kerjasama instansi yang berwenang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik terkait penanggulangan gepeng. Adanya penertiban gepeng secara gabungan tersebut mempermudah dalam razia karena petugas banyak sehingga cakupan wilayah yang ditertibkan semakin luas dan semakin banyak pula gepeng yang dapat ditertibkan. Adanya PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dapat membantu dalam hal pembinaan gepeng. Tim PSM ini yang aktif ke lapangan, melakukan pendataan gepeng, dialog dengan gepeng ataupun orang tua bagi yang masih memiliki orang tua atau keluarga sehingga gepeng atau anak jalanan mendapatkan dukungan dari keluarga dan tidak turun ke jalan lagi. PSM Dinas Sosial Kota Yogyakarta ini juga dapat memberdayakan orang tua sehingga orang tua dari gepeng dapat meningkatkan perekonomian dan memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan anaknya. Adanya PSM inilah yang menjadi kekuatan unggulan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta karena PSM yang lebih dekat kepada masyarakat sehingga komunikasi terjalin secara personal dan kekeluargaan.

2. Weakness (Kelemahan)

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan (Fred R, 2005: 47). Kelemahan yang ada dalam pelaksanaan penanggulangan gepeng adalah terkait dalam pelaksanaan sosialisasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta belum memaksimalkan penggunaan website dan media sosial. Penggunaan media internet pada saat ini dirasa sangat penting karena dapat memudahkan percepatan informasi sampai kepada masyarakat luas,

selain itu biaya yang dipergunakan juga murah. Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi kehumasannya juga kurang melaksanakan *press release* sehingga informasi atau kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta kurang terekspos di pemberitaan media. Humas *officer* Dinas Sosial Kota Yogyakarta juga belum maksimal dalam penguasaan internet sehingga penggunaan media internet sebagai sarana sosialisasi masih lemah.

3. Opportunity (Peluang)

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan instansi (Fred R, 2005: 47). Dalam penanganan gepeng di Kota Yogyakarta, Dinas Sosial Kota Yogyakarta memiliki peluang ke depannya sehingga pelaksanaan penanganan gepeng dapat lebih maksimal. Peluang tersebut adalah berkembangnya era digital pada saat ini sehingga internet dapat digunakan sebagai sarana penyampai pesan yang efektif dan efisien. Internet dapat menasar semua kalangan terlebih anak muda pada saat ini sudah dekat dengan internet. Internet dari segi biaya murah, mudah digunakan dan dapat menasar masyarakat dengan luas.

Kerjasama dengan perusahaan yang diwujudkan melalui CSR (*Corporate Social Responcibility*) juga dapat dijangki dengan program pelatihan keterampilan misal pemberian bantuan sarana dan prasarana serta bantuan pemasaran produk hasil keterampilan tersebut. Kegiatan pelatihan keterampilan juga berpeluang besar dijangki bersama dengan pelaku industri kreatif, karena yang mengetahui bagaimana segmen pasar di lapangan sehingga keterampilan yang dipilih juga merupakan keterampilan yang banyak dibutuhkan seperti bengkel, sablon, menjahit dan memasak bagi perempuan.

Menurut penulis, peluang yang dimiliki sangatlah besar bagi program pelatihan gepeng sehingga gepeng tidak turun lagi ke jalan dan memiliki keterampilan dan dapat dipraktikkan. Dinas Sosial Kota Yogyakarta perlu untuk melihat peluang tersebut, dan menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta yang memiliki modal besar. Diharapkan dengan adanya kerjasama tersebut dapat terwujud program pelatihan keterampilan bagi gepeng sebagai wujud dari penanganan gepeng yang ada di Kota Yogyakarta. Tanpa ada bantuan dari pihak swasta maka keberhasilan penanganan gepeng sangatlah minim karena membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak sedikit dan perlu adanya bantuan dari sponsor.

4. *Threat* (Ancaman)

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan (Fred R, 2005: 47). Dalam penelitian ini terkait dengan penanganan gepeng di Kota Yogyakarta terdapat faktor ancaman yang dapat menghambat fungsi kehumasan program penanganan gepeng. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa ancaman yang dihadapi oleh humas officer dalam penanganan gepeng di lapangan adalah adanya perlawanan dari gepeng seperti gepeng melarikan diri sehingga petugas harus mengejar sampai ke jalan, gang-gang kecil. Oleh karena itu dibutuhkan stamina yang kuat dalam pelaksanaan razia. Selain itu gepeng yang ada di jalanan banyak yang membawa penyakit dan dikhawatirkan dapat menular ke petugas pada saat pelaksanaan razia

Terbitnya Perda Gepeng mendapatkan kontra dari berbagai komunitas dan LSM yang ada di Kota Yogyakarta. Komunitas dan LSM tersebut menilai bahwa Perda Gepeng membuat diskriminasi

dan melanggar dari HAM sehingga dinilai tidak layak. Kesiapan dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk menampung gepeng juga dinilai belum siap dengan melihat kondisi dari panti yang tidak layak huni dengan keterbatasan ruangan, sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai serta jumlah pendamping panti yang terbatas sehingga anak jalanan dan gepeng yang ada di panti kurang mendapatkan perhatian secara maksimal

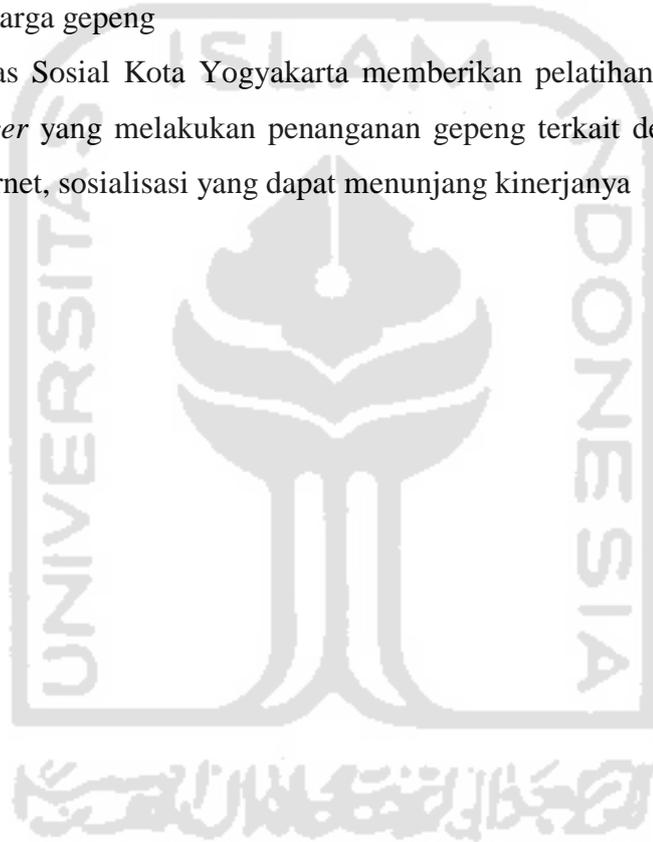
Berdasarkan uraian SWOT penanganan gepeng oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta tersebut di atas maka dapat dibuat matriks SWOT. Menurut Rangkuti (2006), matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Berbagai alternative strategi dapat dirumuskan berdasarkan model SWOT Matrix. Keunggulan SWOT Matrix adalah dapat dengan mudah memformulasikan strategi yang diperoleh berdasarkan gabungan internal dan eksternal faktor. Terdapat 4 alternatif strategi yang dapat disarankan yaitu SO Strategi, ST Strategi, WO Strategi dan WT Strategi.

Berikut ini adalah analisis dengan menggunakan SWOT Matrix menggunakan data yang diperoleh dari IFAS (*Internal Strategic Factor Anaysis Summary*) dan EFAS (*Eksternal Strategic Factor Anaysis Summary*) Strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam peningkatan penanganan gepeng adalah dengan menerapkan strategi ST. Strategi ST (*Strength and Threats*) merupakan strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki instansi untuk mengatasi ancaman.

Seperti diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Yogyakarta memiliki kekuatan yang menjadi dasar dalam penanganan gepeng. Akan tetapi ancaman yang dimiliki cukup besar terkait dengan tidak terkendalinya gepeng yang datang dari luar daerah dan masuk ke Kota Yogyakarta. Seolah-olah gepeng menilai Kota Yogyakarta memiliki potensi yang

besar untuk mendapatkan uang dengan cara mengemis. Oleh karena itu perlu disusun strategi utama untuk meningkatkan penanganan terhadap gepeng oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta berdasarkan strategi ST tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Yogyakarta perlu meningkatkan jumlah PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang secara aktif terjun ke lapangan/masyarakat untuk menyampaikan sosialisasi, pendekatan ke keluarga gepeng
2. Dinas Sosial Kota Yogyakarta memberikan pelatihan kepada humas *officer* yang melakukan penanganan gepeng terkait dengan pelatihan internet, sosialisasi yang dapat menunjang kinerjanya



BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan saran merupakan masukan penulis dalam melihat kondisi lapangan selama melakukan penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

Fungsi Kehumasan Dinas Sosial dalam implementasi penanganan masalah gepeng di wilayah Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan tiga fungsi yaitu fungsi komunikator, mediator dan organisator. Fungsi komunikator dilakukan dengan 1) Upaya preventif dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat; 2) Dinas Sosial melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas melalui media sosialisasi. Selanjutnya fungsi mediator dilakukan dengan penanganan gepeng yang melibatkan anggota PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang datang ke masyarakat secara langsung menyampaikan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada gepeng secara personal dan keluarganya. Fungsi sebagai organisator maka dilaksanakan dengan razia terhadap gepeng, terdapat razia gabungan yang melibatkan Dinas Ketertiban, Dinas Sosial dan pihak kepolisian. Bagi gepeng yang terjaring dalam razia maka akan didata dan masuk ke *camp assessment*. Bagi gepeng yang tidak ber-KTP Kota Yogyakarta akan dikembalikan ke daerah asal. Gepeng yang mempunyai KPT Kota Yogyakarta diberikan pelatihan keterampilan dan pembinaan.

B. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan dalam menganalisis fungsi kehumasan Dinas Sosial dalam implementasi penanggulangan masalah gepeng di wilayah Kota Yogyakarta. Pada penelitian ini penulis memiliki keterbatasan penelitian, diantaranya adalah terkait dengan hasil dari penanganan gepeng yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Bagi gepeng yang telah diberikan pelatihan maka dapat diteliti terkait dengan dampak dari pelatihan dan pemberdayaan yang telah dilakukan apakah yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta memberikan dampak positif bagi gepeng atau tidak. Hal tersebut dapat menjadi bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Yogyakarta untuk memanfaatkan media internet sebagai sarana sosialisasi. Penggunaan website perlu untuk dilakukan agar dapat menyampaikan informasi secara detail terkait dengan kegiatan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Media sosial seperti *facebook*, *twitter* dapat digunakan di era digital saat ini. Penggunaan media sosial tersebut dapat mempermudah pesan sampai dengan cepat kepada khalayak, efisien dan biaya murah.
2. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Yogyakarta agar humas *officer* diberikan pelatihan terkait dengan penanganan gepeng, pelatihan komunikasi, penggunaan internet.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Agus, Salim. (2006). *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Anggoro, Linggar. (2002). *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*. Cetakan ke 3. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. (2008). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cutlip, Center dan Broom. (2006). *Effective Public Relation*. Edisi ke 9. Jakarta: Kencana.
- Darmastuti, Rini. (2007). *Etika PR dan E-PR*. Yogyakarta: Gava Media.
- David, Fred R. (2006). *Manajemen Strategis*. Edisi Sepuluh. Jakarta: Salemba
- Effendy, OnongUchjana. (2002). *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Jefkins, Frank. (2003). *Public Relations – Disempurnakan oleh Danel Yadan*. Jakarta: Erlangga.
- Jogiyanto. (2006). *Sistem Informasi Strategi untuk Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Iriantara, Yosol. (2004). *Manajemen Strategi Public Relations*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Kasali. Rhenald. (2003). *Manajemen Public Relation: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kriyantono, Rachmat. (2006). *Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation Advertising, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2007). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rikena Cipta.

- Oliver, Sandra. (2007). *Aktivitas PR*. Jakarta: Erlangga.
- Patilama, Hamid. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Priyabna, Soeganda. (2008). *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rangkuti, Freddy. (2006). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rakhmat, Djalaludin. (2001). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ritonga, Jamiluddin M. (2004). *Riset Kehumasan*. Bandung: Grasindo.
- Rumanti, Maria Assumpta. (2005). *Dasar-dasar Public relations: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ruslan, Rosady. 2001. *Manajemen Humas & Manajemen Komunikasi: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2006. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2005). *Manajemen Public Realtion dan Manajemen Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2008). *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. (2010). *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerdjono. (1993). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

SumberJurnal:

- Anwar Sani. Optimalisasi Fungsi Humas Pemerintah, The Optimization of Government Public Relation Function. *Edutech, Volume : 1*. (2014).
- Evawani Elsy Lubis. Peran Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintah. *E-journal Unri, Volume : 12 No. 1*. (2012).
- M. Ali Al Humaidy. Pergeseran Budaya Mengemis di Masyarakat Desa Pragaan Daya Sumenep Madura. *STAIN PAMEKASAN*. (2005).

Meilyna, Diah Anggrahini, Christina Rochayanti, dan Edwi Arief Sosiawan. Peran Humas Kabupaten Sragen dalam Pengelolaan Isi Informasi Website Pemda Sebagai Media Communications Relation dengan Masyarakat. *Jurnal E-Ilmu Komunikasi Volume:6 No.2(2008)*.

Hermanto, Fanny. Strategy Public Relations PT. Coca-cola di dalam mengembangkan corporate social responsibility. *Universias Kristen Petra Surabaya*.(2007).

SaptonoIqballi. StudiKasus- Gelandangan- Pengemis di Kecamatan Kubu Karang Asem. *Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian UNUD*.(2008).

Yanuar Luqman. Perandan Posisi Hubungan Masyarakat Sebagai Fungsi Manajemen Perguruan Tinggi Negeri di Semarang. *Jurnal E-Ilmu Komunikasi UNDIP Volume : 2 No. 1*. (2005).

Yohana Amelia Lumindong. Penerapan Evaluasi Kegiatan Media Relation oleh Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kota Surabaya. *Jurnal E-Ilmu Komunikasi UNAIR*. (2013).

Sumber Online:

Anshori, Ridwan. “ Pembersihan Gepeng Mulai Digencarkan ” <http://daerah.sindonews.com/> (diakses 28 januari 2015).

“ Perda Gepeng Berlaku Mulai 1 Januari 2015 Pemberi Uang Kepada Gepeng Denda RP 1 Juta. ” <http://sosial.bantulkab.go.id/berita/148/perda-gepeng-berlaku-mulai-1-januari-2015-pemberi-uang-kepada-gepeng-denda-rp-1-juta/> (diakses 26 januari 2015).

Manggala, Yudha P. Putra. “ Selama Januari 91 Gepeng Yogya Terjaring Razia ”. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/01/27/niu2fk-selama-januari-91-gepeng-yogya-terjaring-razia> (diakses 27 januari 2015).

Kurniawan, Ferry. “ Satpol PP Kota Yogyakarta Gelar Razia Gepeng Malam Hari ”. <http://jogja.tribunnews.com/2015/04/07/satpol-pp-kota-yogyakarta-gelar-razia-gepeng-malam-hari> (diakses 29 april 2015).

“Sejarah Daerah Istimewa Kota Yogyakarta”. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/sejarah-DaerahIstimewa-Yogyakarta> (diakses 3 Maret 2015).

LAMPIRAN





PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2790

5470/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Psikologi & Ilmu Sosial Budaya - UII Yk
Nomor : 809/Dek/70/Div/Um/RT/VII/2016 Tanggal : 28 Juli 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : WIDYANITA MUSTIKA PUTRI
No. Mhs/ NIM : 12321062
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Psikologi Ilmu Sosial Budaya - UII Yk
Alamat : Jl. Kaliurang Km. 14,5 Besi Sleman
Penanggungjawab : Ali Minanto S.Sos., M.A
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS FUNGSI KEHUMASAN DINAS SOSIAL KOTA YOGYAKARTA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN GEPENG (GELANDANGAN PENGEMIS) DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 2 Agustus 2016 s/d 2 November 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

WIDYANITA MUSTIKA PUTRI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 03 Agustus 2016
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2.Ka. Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta
3.Dekan Fak. Psikologi & Ilmu Sosial Budaya - UII Yk
4.Ybs.

INTERVIEW GUIDE

Fokus : Perda Gepeng DIY

1. Sejak kapan Perda Gepeng di cetuskan?
2. Apa sasaran Perda Gepeng?
3. Siapa saja yang terlibat menjadi stakeholder agar perda ini dapat berjalan?
4. Apa peran tiap-tiap stakeholder dalam pelaksanaan Perda Gepeng?
5. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Perda Gepeng?
6. Bagaimana proses penyusunan strategi dalam pelaksanaan perda Gepeng?
7. Bagaimana pembagian jobdesk sesuai dengan strategi yang telah di tetapkan?
8. Bagaimana penerapan di lapangan?
9. Apa saja kendala yang di hadapi selama pelaksanaan Perda Gepeng?
10. Bagaimana Evaluasi yang di lakukan terkait dengan pelaksanaan Perda Gepeng?

Fokus : Peran Kehumasan Dinas Sosial dalam implementasi Perda Gepeng

1. Aktivitas kehumasan dalam pelaksanaan Perda Gepeng, seperti sosialisasi hingga dokumentasi.
2. Siapa saja yang terlibat dalam aktivitas kehumasan oleh dinas Sosial dalam implementasi Perda Gepeng?
3. Bagaimana pembagian jobsdesk yang dilakukan?
4. Bagaimana penerapan di lapangan?
5. Apa saja kendala yang di hadapi selama pelaksanaan Perda Gepeng?
6. Bagaimana Evaluasi yang dilakukan?

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Ibu Nanik

Jabatan : Kabid RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta

Keterangan : W= widya, N = Nanik

1. W : Selamat siang bu, yang pertama tentang Perda Gepeng bu?

N : Perda itu no 1 th 2014 tentang penanganan gepeng, kemudian mulai ya istilahnya sosialisasi-sosialisasi. Kemudian di tahun 2015 sudah mulai penganggaran untuk operasi, dan panti di campnya dipersiapkan. Penganggaran harus sudah setahun sebelumnya, pada saat ini muncul pada tahun itu belum ada penganggaran jadi ikut di perubahan anggaran dan sudah mulai untuk tahun kedepannya. Di tahun 2015 sudah dianggarkan oleh Dinas Sosial DIY. Kalau di kota untuk razia tersentral di Dinas Ketertiban jadi Dinas Sosial tidak boleh menganggarkan, khusus untuk razia karena sudah tersentral disana. Tapi Dinas Sosial DIY punya anggaran, kemudian diserahkan ke kabupaten kota. Tahun 2016 kota di beri jatah sebulan 4 kali, kemudian yang kota lakukan karena sebetulnya razia bukan kewenangan Dinas Sosial kan untuk preventif dan rehabilitasi. Preventif itu kita membuat liflet-lifletnya. Kemudian kita memasang papan himbauan di pertigaan perempatan di beberapa titik yang ada *traffic light*. Pasti mba pernah lihat?

2. W: Iya saya pernah lihat bu.

N: Sebelumnya kan sudah ada papan himbauan juga tapi untuk anjal, anak jalanan, tapi anak jalanan kan sekarang sudah berkurang, nah munculah gepeng. Anjal bersama orang tuanya. Kemudian dari beberapa papan himbauan itu kita ganti, tempatnya memang sama cuma isinya kita ganti dengan Perda Gepeng beserta sanksinya. Biasanya itu orang kalau memberi kok kena sanksi, ada juga yang tidak tau. Kalau di pintu-pintu masuk DIY kan sudah di pasang papan himbauan oleh DIY. Kota yang lingkup kota dimulai tahun 2015 kita sudah mengganti isi dengan Perda Gepeng dan sanksinya. Karena anjal dan gepeng tidak jauh berbeda sebetulnya, anjal kan anak kalau sudah gede jadi gepeng, atau gepeng membawa anak. Itu kalau kena razia nanti akan disendirikan, anak kan tidak lepas dari orang tuanya di panti akan disendirikan. Kalau yang gepeng kan di camp assessment atau panti karya. Kasian juga kalau anak di jadikan satu dengan orang tua, ya walaupun kalau di jalan mereka sudah biasa bersama. Tapi kita kan juga ada perlindungan terhadap anak. Selain liflet kita juga membuat banner-banner, tapi membuat banner juga banyak yang hilang. Pada saat awal temen-temen juga tidak tau kalau utuh bisa di ambil, mungkin yang nyopot juga

gepengnya, kan itu ada perda gepengnya. Pernah itu baru pasang besoknya sudah tidak ada, sehari doing. Ternyata kita salah strateginya, itu harus di gunting, disobek yang tidak bertulisan di buat lobang. Kalau itu sudah tidak bisa di pakai, lah kita setelah itu, padahal sudah panas –panas temen-temen pasang, hari berikutnya lewat sudah tidak ada. Tapi kalau yang di kecamatan gak berani di copotin, masih ada itukan di kantor. Kita liflet itu disebar ke PSM, jadi ada tim penjangkauan dari Dinsos bermitra dengan PSM Anjal Gepeng, mereka sekalian membagikan liflet, atau dimesjid-mesjid kalau hari jumat kan ada yang minta-minta. Jadi ada tim yang masuk kesana dan nitip ke peng-Khotbahnya juga. Terus kita juga dintib menyasar kesana, ada yang ikut jumatan, ada yang berjaga agak jauh. Begitu selesai di *calling* “ini sudah selesai”.

3. W: Pada saat itu mereka juga di razia atau gimana bu?

N: yang ketahuan meminta di razia. Kita pernah sampai di laporkan ke ombudsman juga. Oleh seorang difable yang kena razia. Karena mereka merasa saya itu bisanya kerja ya itu meminta-minta karena difable. Tapi bebera kali mediasi, ombudsman kan sebagai penengah juga tidak memihak salah satu untuk mencari solusi terbaik. Jadi tidak masalah juga.

4. W: salah satu bentuk konsekuensi juga bu?

N: iya itu termasuk mba.

5. W: Selama beberapa tahun Perda Gepeng ini, siapa saja yang terkait dalam pelaksanaannya?

N: kalau kita juga melibatkan PSM, Pekerja Sosial Masyarakat. Sebetulnya ini instruksi dari kementerian social ada Permensosnya. Jadi di setiap kabupaten harus di bentuk Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat ada di tingkat kota, kecamatan, kelurahan. Di kota itu jalan PSMnya. Di tingkat kota kita bentuk tim penjangkauan, kalau dulu penjangkauan anjal khusus anjal, tetapi anjal sudah mulai berkurang dulu di perempatan kan banyak sekarang kan sudah berkurang. Tetapi kan berkurang semuanya juga tidak bisa, mungkin yang satu pergi yang lain datang. Mereka juga sudah tidak anak-anak lagi, kan jadi gepeng to. Kadang-kadang kita rasa ini anjal tapi usianya sudah di atas 18 kan jadi gepeng. Kemudian dari tim tidak hanya penjangkauan anjal tetapi gepeng juga. Mereka itu istilah kami bukan mengambil tetapi pendekatan secara personal. Para petugas itu datang di tempat biasa anak –anakmangkal. Dia datangi pedekatan secara personal untuk di kembalikan ke masyarakat. Kemudian kalau di temukan penduduk kota, kita kan ada pelatihan untuk anjal, dari hasil penjangkauan tim itu. Mereka kan tidak hanya sekali dua kali bertemu, terus ditanya keinginannya itu apa, kemudian kita penuhi seperti tahun ini minta di latih sablon, bengkel, kalau tahun kemaren potong rambut. Bengkel hanya tambal ban saja, karena mereka kalau diberi pelatihan yang pakai mikir sudah tidak bisa, meraka sudah tidak mau. Kemaren kita juga salah strategi pada saat pelatihan sablon hari pertama kan harus teori dulu pelatihan gambar. Itu mereka hari berikutnya ada

yang gak datang. Katanya “saya kalau disuruh mikir gak bisa, pokoknya kita pelatihan yang gak usah pakai mikir”. Maunya pendidikan praktis to, ya namanya tingkat pendidikan juga. Kemaren kalau yang SMA mereka membuat desain dengan computer ya mereka senang, tapi yang gak tau itu tadi. Berarti kita salah strategi, kita kan manut sama pelatihnya biasanya hari pertama kedua ketiga kan teori. Ternyata tidak bisa, jadi besok kita langsung praktek aja teori sambil jalan. Kalau tambal ban langsung praktek, hari pertama pengenalan alat langsung praktek. Ternyata yang ikut sablon pada seneng, kan kita hanya enam hari. Hari terakhir untuk bimbingan social, kita datangkan narasumber untuk memberi motivasi. Kemudian anak-anak itu kan rentan terhadap HIV- AIDS, kita ngaturi dari KPA.

6. W: KPA itu apa bu?

N: komisi peduli AIDS. Karena anak-anak itu rentan ya jadi kita undang itu, ternyata anak-anak memang belum tau tentang HIV-AIDS. Mereka antusias, kalau di tv mungkin mereka tidak memperhatikan tapi begitu ada narasumber yang hanya 20 orang mereka langsung memperhatikan. Informasinya juga baru buat mereka. Saya kira ini mesti gak tertarik ini, ternyata mereka tertarik. Disamping pelatihan kepada anak, anak yang kita latih memang sudah tidak usai sekolah, kalau anak yang usia sekolah kan tidak boleh harus di kembalikan ke sekolahan. Jadi kita untuk usia 19-20. Kemudian kita juga ada pembinaan untuk keluarganya setiap tahun ada mulai tahun 2015. Karena jumlah anjal semakin menurun kita untuk orang tuanya. Harapan kami orang tua juga bisa memperhatikan anaknya utuk tidak turun dijalan. Saat pelatihan itu kan kita panggil satu-satu pekerjaannya apa, ternyata ada yang ngaku kerja di jalanan ngamen. Kita motivasi untuk tidak turun kejalan karena itu melanggar Perda. Kemaren ada pelatihan kepada gepeng sejumlah 40 orang. Kita dengan PSBK, pangudi luhur Bekasi. Tapi mereka kan milik Kementerian Sosial wilayahnya se Indonesia. Kita tahun ini menjadi sasaran gepengnya. Kemaren pelatihan selama 5 hari. Setelah pelatihan ada bantuan. Dari peserta itu kita motivasi kita mature dari seksi Transmigrasi untuk memotivasi penduduk kota kana da kesempatan ikut transmigrasi. Ternyata dari beberapa peserta gepeng kami ada yang mendaftarkan tapi tidak jadi berangkat karena istrinya gak mau. Sebetulnya di tawari juga oleh PSBK barangkali ada gepeng di kota mau ikut pelatihan disana kan selama 6 bulan. Temen-temen kami sudah melakukan motivasi gak ada yang minat. Kita arahkan ke panti yang menangani gepeng ada beberapa yang dikirim kesana tapi informasi kemaren ada yang pergi.

7. W: untuk jumlah panti yang terkait dengan Perda gepeng ada beberapa banyak bu?

N: kalau di kota Jogja ada 1. Tiap propinsi punya 1. Kalau di kota ada panti untuk gepeng, anak dan lansia. Hasil razia di panti karya kan akan di assessment. Kalau sudah lansia di bawa ke panti weda. Kalau anak itu jarang mba, karena di panti anak kan harus sekolah, mereka sudah tidak mau. Kita

pernah ada anak dari hasil razia dari panti karya, anaknya diberi motivasi dia mau ke panti anak. Dari panti itu mengurus anak ini asalnya dari mana, diurus biar bisa jadi penduduk sini. Jadi kasian dia orang tuanya sudah meninggal, ikut sodaranya, sodaranya gak mampu akhirnya turun ke jalanan sampai ke Jogja. Dia sampai lulus SMA terus bekerja sekarang kos. Ada temen di panti yang mau di ikutkan KKnya. Sekarang karena sudah lulus kemudian sudah bekerja dia pindah KK, "saya mau sendiri".

8. W: bu untuk penyusunan strategi dalam setahun bagaimana prosesnya?
N: jadi kalau kita sosialisasi secara khusus tidak ada, karena sosialisasi di masyarakat itu sulit mereka sudah banyak pertemuan. Jadi kita sisipi kegiatan mereka saja misal pertemuan RT, itu lebih efisien dan irit biaya.
9. W: Itu agenda rutin , misal razia atau program kerja lainnya gimana perencanaannya bu?
N: kalau razia memang sudah peraturan sebulan 2 kali agenda pasti, berkordinasi dengan Dinas Ketertiban dan Polisi, jadi disesuaikan. Kalau Dinas Ketertiban kan sering tapi tidak melibatkan kita. Kalau razia kita hanya 3 orang, polisi 2 orang, Dinas Ketertiban yang 10 orang.
10. W : Perda Gepeng ini melibatkan banyak pihak baik internal atau eksternal kayak tadi PSM, KPA, koordinasinya bagaimana bu, apa dari awal mereka di libatkan?
N: kalau dengan PSM dari awal kita punya anggaran untuk tim masyarakat jadi kita libatkan mereka. Misalnya mereka di daerah Pakualaman kalau ada anjal dan gepeng daerah situ kan dia lebih dekat. Kalau kita kan personilnya hanya berapa, gak bisa menjangkau sekota.
11. W: berarti hanya PSM yang di libatkan dari awal bu, yang lainnya koordinasi berjalan?
N: iya yang lainnya koordinasi berjalan. Yang jelas kalau penertiban kan dengan Dintib dari awal koordinasinya. Kalau KPA kan hanya untuk pembinaan saja kita koordinasi untuk masuk.
12. W: selanjutnya ini bu, selama berjalan dua tahun perda gepeng ada Kendal dan hambatan apa bu?
N: hambatanya itu mereka yang sudah biasa hidup dijalan untuk di bawa kepanti selama ini kan seperti di paksa. Padahal kalau tidak di paksa tidak ada yang mau kecuali sakit itu di bawa polisi ke rumah sakit mau. Jadi selama ini kita seperti memaksa terutama yang di berita berita kan Dinas Ketertiban yang selalu di sorot. Tapi kalau tidak seperti itu nyatanya kita motivasi tidak ada yang mau ikut ke panti. Kendalanya pada saat kita razia biasanya yang masih muda-muda yang potensial sudah kabur, lebih pintar mereka larinya juga cepetkan. Begitu ada mobil patrol sudah kabur. Sebetulnya di panti juga ada pembinaan kita selalu dapat yang aduh, kemaren ada satu yang potensial bawa anak. Bapak-bapak

bawa anak ya kita ambil. Seperti itu kan potensial untuk di beri motivasi lebih untuk ikut pelatihan supaya mereka punya ketrampilan. Gepeng itu biasanya gak punya ketrampilan, mereka pengennya yang praktis. Susah merubah pemikiran mereka. Mungkin sudah terbiasa tanpa mikir dapat uang. Mereka juga biasa dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kemudian di kita ada pembinaan anak-anak yang rentan ke jalan “drop out”. Itu kita pembinaan dengan Dinas Tenaga Kerja ada shelter selama 25 hari untuk anak yang rentan yang sudah putus sekolah agar tidak turun ke jalan.

13. W: untuk yang seperti itu, sudah direncanakan dari awal, atau koordinasi berjalan bu?

N: kebetulan satu payung jadi kita berkoordinasi dari awal

14. W: Untuk peran kehumasan, seperti sosialisasi, dokumentasi memang dari seksi RPS atau melibatkan orang lain?

N: semuanya dari seksi kami, kami berlima jumlah personilnya yang mengurus koordiansinya. Jadi seksi kami sering di libatkan di kegiatan seksi yang lain, itu sembari kami sampaikan sosialisasi. Dulu Kabid kami seorang penceramah di masjid-mesjid itu juga di sampaikan disana bagi liflet. Jadi dengan personil sedikit bisa efisien dan irit biaya. Terus di kita setiap awal tahun ada pemaparan program kepada PSM kota kelurahan kecamatan. Seperti itu kita sampaikan program-program kita.

15. W: kembali lagi ya bu, merencanakan program itu setahun sebelum bu?

N: iya setahun sebelum, seperti yang tahun 2017, kita sudah usulkan di bulan maret. Kalau misalnya terlewatkan kita nunggu besok di perubahan anggaran. Jadi timelinenya memang maret pengusulan rencana “Rencana kerja” untuk mau kegiatan kita berapa orang, itu sampai bulan maret sudah di tentukan. Itu sudah gak bisa nambah gak bisa ngurangi, kalau mau nambah ya tidak merubah itu ada yang selipkan disitu.

16. W: Menyusun rencana kerja itu dari Dinsos sendiri atau melibatkan pihak lainnya?

N: itu kan masing-masing seksi menyusun, nanti di koordinasikan ke Bapeda.

17. W: didalam pelaksanaan apa ada kegiatan mengundang pers, membuat release bu?

N: jadi memang kita selalu menjelaskan, melaporkan bahwa kita sudah sesuai aturan, untuk permasalahan yang di tuntut difable melibatkan ombudsman kita mediasi kita juga terbuka menerima complain dari mereka. Alasan mereka “Difable dulu di latih pijat, sekarangkan banyak orang awas yang jadi tukang pijat dan lebih laku jadi saingan, kami kan juga butuh makan dan bisanya kami itu”. Benar juga alasan mereka, terkadang kami juga dilema meneggakan aturan, tapi kalau aturan tidak di tegakkan nanti semakin banyak.

18. W: jadi evaluasinya gimana bu?

N: untuk kasus itu, kita haru lebih kreatif memberikan pelatihan di bidang lain tapi pelaksanaannya di tahun berikutnya. Apalagi sekarang memang mekanismenya agak ribet dalam memberikan bantuan kan ada aturannya. Kita harus mengusulkan setahun sebelumnya, misal untuk pelatihan sablon anak jalanan kan kita juga memberi bantuan itu setahun sebelumnya sudah diusulkan. Sama dengan penganggaran.

19. W: pertanyaan tadi bu, seperti membuat press release?

N: iya kita secara resmi tidak pernah mengundang wartawan, tetapi mereka yang selalu datang dan meliput razia. Kalo pemaparan program di awal selalu di liput.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Oka Mahendra
Jabatan : Kabid. Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta
Keterangan : P = Penelit, N = Narasumber
Lokasi :
Tanggal : 22 September 2016
Durasi : 35 Menit

1. P: Assalamualaikum pak, sebelumnya kenalan diri dulu tentang bapak?

N: Walaikumsalam, saya biasa dipanggil bang oka, tugas di Dinas Ketertiban baru selama 11 tahun. Tugasnya ikut patrol rutin jaga ketertiban Kota Yogyakarta.

2. P: Baik bang, kalau untuk Perda Gepeng bagaimana keterlibatan Dinas Ketertiban dan birokrasinya?

N: Untuk Perda Gepeng yang terlibat ada Dinas Sosial, Dinas Ketertiban untuk menertibkan, Polisi untuk pengamanan. Kami diberi agenda oleh Dinsos sebulan 2 kali untuk penertiban. Biasanya tanggal 4 dan 20an tiap bulannya, bisa pagi ataupun malam kayak begini operasinya. Kami patroli keliling Kota Yogyakarta, kalau ada yang tiduran di emperan toko, ngamen terus gak ada KTPnya ya diangkut, tapi kalau ada KTPnya gak dibawa sesuai prosedur. Di bawa secara sopan dan santun diajak baik-baik, tapi kalau gak mau baru kita paksa. Setelah penertiban gepeng di bawa ke *camp assessment*, disana kami serahkan ke petugasnya di urusi oleh Dinas Sosial.

3. P: Selain agenda patroli 2 bulan sekali, apa ada agenda lain terkait perda gepeng?

N: Pasti ada mba, jadi agenda Dintib sendiri patroli setiap hari, kalau ada masyarakat yang laporan misal ada orang gila di daerah kota ya kami kesana untuk tertibkan. Jadi kami 24 jam siap menertibkan gepeng. Bedanya kalau diluar agenda Dinsos, Polisi dan Dinsos tidak ikut operasi tapi tetep koordinasi berjalan. Kalau dibawa ke *camp assessment* kan laporannya masuk ke Dinsos. Pernah kami partoli sendiri di luar agenda Dinsos dapat laporan warga di daerah tugu ada gepeng udah sakit parah,

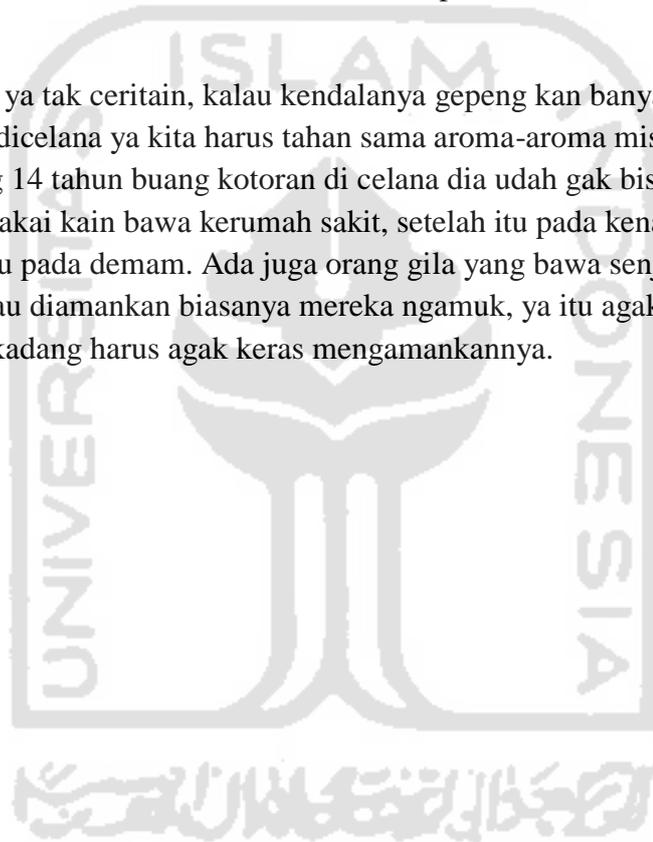
langsung kami kesana di bawa kerumah sakit dulu, setelah itu di bawa ke *camp assessment* di urus Dinsos untuk dikembalikan ke tempat asalnya.

4. P: Untuk pelaksanaan Perda Gepeng apakah ada targetnya, berapa orang yang harus terjaring dalam sebulan atau pertahun?

N: Kalau target jumlah orangnya gak ada mba, soalnya jumlah mereka gak tentu kadang udah dibersihkan datang lagi dari luar kota. Tapi targetnya perlokasi misal daerah tugu itukan banyak pengamennya ya kami gencarnya disana. Target akhirnya kan daerah Kota Yogyakarta bebas gepeng.

5. P: Untuk kendala dan hambatan selama pelaksanaan Perda Gepeng apa bang?

N: Maaf ya tak ceritain, kalau kendalanya gepeng kan banyak yang buang kotoran dicelana ya kita harus tahan sama aroma-aroma mistisnya, pernah ada yang 14 tahun buang kotoran di celana dia udah gak bisa jalan jadi kita angkat pakai kain bawa kerumah sakit, setelah itu pada kena herpes seminggu pada demam. Ada juga orang gila yang bawa senjata tajam kalau mau diamankan biasanya mereka ngamuk, ya itu agak susah karena kadang kadang harus agak keras mengamankannya.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Suheni

Jabatan : Staf RPS Dinas Sosial Kota Yogyakarta/ Tim
Penjangkauan Gepeng

Keterangan : P = Penelit, N = Narasumber

Lokasi : Kantor Dinas Sosial Kota Yogyakarta

Tanggal : 9 November 2016

Durasi : 1 jam 30 menit

1. P: Assalammualaikum bu, sebelumnya perkenalan diri dulu tentang ibu?

N: Walaikumsalam, perkenalkan saya Heni saya di staf RPS, saya ikut di tim penjangkauan Perda Gepeng gelandangan dan pengemis yang di adakan oleh Dinas Sosial. Kami tiap bulannya dapat jatah 2 kali penjangkauan sebelum tanggal 25 tiap bulan.

2. P: Tim penjangkauan terdiri dari berapa orang bu?

N: Tim penjangkauan dari Dinas Sosial 3 orang dari Polresta 2 orang , dari Dinas Ketertiban 10 orang. Semuanya ada 15 orang, kadang ada yang PSM kalau longgar ikut penjangkauan, kadang yang penelitian ikut juga.

3. P: Untuk fungsi-fungsi kehumasan seperti sosialisasi, penyebaran informasi ke masyarakat, memberikan pelayanan tentang Perda Gepeng seperti apa bu?

N: kalau pelaksanakannya untuk pemberitahuan dengan pendekatan ke masyarakat, saya juga sering ketemu orang yang rentan dan punya anak rentan turun ke jalan. Saya beritahukan sekarang sudah ada Perda, ada sanksi-sanksinya perlahan-lahan mereka akan berhenti turun ke jalan, Kalau sekaligus anak jalanan dan gepeng gak akan bisa. Saya memberikan pengertian beginiloh seandainya kena razia kita bawa ke panti di assessment kalau belum pernah kena razia nanti satu bulan di panti, kalau sudah dua kali 3 bulan, tiga kali 6 bulan. Itu biar memberikan efek jera, mereka juga disana bukan hanya di urus tapi juga di perdayakan. Kalau bisa di dandani, dikembalikan ke asalnya jangan hidup di jalan.

4. P: dari tim penjangkauan sendiri apakah ikut mendampingi selama di panti?

N: oww enggak mba, dari sana sudah ada tim pendamping, kita tugasnya hanya menjangkau. Kalau kita ambil hanya kita beritahu saja, ini loh kamu kena sanksi ini-ini tentang Perda Gepeng.

5. P: Untuk koordinasi yang melibatkan banyak pihak, selain Dinas Sosial ada Dinas Ketertiban dan Polresta birokrasinya gimana bu?

N: Birokrasinya dari Dinsos membuat surat menyurat ke kantor terkait, kalau enggak kan Dinas Ketertiban dan Polresta juga punya kegiatan biar gak bentrokan.

6. P: Program kerja dari tim penjangkauan sendiri seperti apa bu?

N: Jadi program kerja kita sudah termasuk dengan program keseluruhan tentang Perda Gepeng mba. Istilahnya rencana kerja yang sudah disusun pada tahun sebelumnya.

7. P: Selama menjadi tim penjangkauan apa kendala dan hambatan yang di hadapi?

N: Banyak keluh kesah suka dukanya mba. Salah satunya yang pernah kami alami, waktu itu kami pernah razia gelandangan yang sudah 14 tahun di jalanan, di daerah pasar kuncen ke utara. Itu sudah telanjang rambutnya sudah gimbal sebadan. Itu yang jangkau pada muntah-muntah. Keesokan harinya saya sendiri kena herpes, dari polresta Pak Arif kena juga. Kita sudah akrab dengan bau-bau mistik mba. Pernah juga kena razia kami kirim ke camp dari sana dikirim ke panti Bekasi diberi pelatihan, nanti mungkin bisa di nikahkan masal. Kami kan kedatangan dari Bekasi, kami di berikan jatah untuk mengirimkan gepeng kesana untuk pelatihan dan nikah masal. Pernah ada dari Wonosari sudah kami kirimkan kesana, sudah ikut pelatihan pas mau di nikahkan dia mala kabur. Padahal kalau gak nikahkan dia deket sama lelaki yang ini deket itu deket. Kita juga kan seneng sudah mau berhasil bisa meningkatkan derajat hidup dia, sudah kita urus semuanya tinggal nih ijab. Saya di wa “ Bu gagal” saya sedih juga mba, tanggung jawab kita kan besar juga. Pernah juga ada suami istri punya anak cowo satu cewenya satu. Nah cewenya punya anak hasil hubungan dengan bapaknya, itu tinggalnya di jembatan bantaran sungai Bandran. Kita jangkau kebetulan dia juga warga situ biar dia bisa kembali ke lingkungan semana mestinya. Sudah kita pisahkan dari bapaknya, tapi untuk beberapa bulan di panti sudah keluar masih berhubungan lagi. Kita kerja sama dengan para sakti peksos. Temen-temen pekerja social yang namanya sakti kan dia sudah mumpuni, kerjanya loncat sana loncat sini, itu mereka seperti PMS tapi binaan provinsi.

8. P: Untuk pelaksanaan ini kan melibatkan PSM, itu mereka bergerak di bawah arahan Dinsos atau dia punya program sendiri bu?

N: mereka dibawah arahan Dinas Sosial, kalau PSM itukan pekerja social masyarakat mereka yang tulus dari hatinya untuk menolong masyarakat secara sukarelawan. Jadi mereka di koordinasi sama kita, mereka mitra kita.

9. P: program kerja Dinas Sosial dengan PSM seperti apa bu?

N: Mereka ikut penjangkauan gepeng dan anjal. Untuk anak jalanan kan gak boleh di razia mba, jadi kita jangkau kita bina. Dengan mereka itu harus pendekatan personal di beri pemahaman, motivasi nah itu tugas PSM yang turun untuk itu, personil mereka kan banyak mba. Di kota itu di bagi ada tim utara tim tengah tim selatan. Itu setiap ada penjangkauan mereka kita koordinasikan.

10. P: PSM sendiri apakah khusus di latih atau training dari Dinas Sosial bu?

N: Dulunya mba, awal- awalnya kami training. Sekarang personil PSM banyak mba bertambah dari tahun ke tahun.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Pak Kasmat
Jabatan : Ketua PMS Kota Yogyakarta
Keterangan : P = Peneliti, N = Narasumber
Lokasi : Kantor PSM Kota Yogyakarta
Tanggal : 10 November 2016
Durasi : 1 jam

1. P: Assamualaikum Pak, pertama boleh perkenalkan diri bapak dan jabatannya?

N: Walaikumsalam mba, saya Kasmat, menjabat sebagai ketua PSM Kota Yogyakarta.

2. P: Boleh cerita tentang profil PSM dan kedudukannya dalam pemerintah?

N: PSM sebagai mitra pemerintah, kalau di kota kita bermitra dengan Dinas Sosial. Mulai tahun 2009 kita mendapat tugas untuk temen-temen PSM di kota Yogyakarta. Tugas pertamanya adalah kegiatan penanganan anjal berbasis masyarakat. Untuk tugas itu setelah terbitnya perda 1 tahun 2014, tugas kita di tambah penanganan gelandangan dan pengemis. Menangani penanganan anjal berbasis masyarakat itu kita bnetuk tiga tim. Tim utara, tim tengah tim selatan, meliputi wilayah 14 kecamatan di bagi 3. Wilayah termasuk jetis, gondokusuman pokoknya 14 kecamatan di kota. Terus kita bentuk tim namanya tim 70. Itu terdiri dari anggota PSM terus kita bagi tadi utara, tengah dan selatan. Tugas awalnya penanganan anjal basis masyarakat, ada tiga poin yang menjadi konsen kita.

3. P: Tugas awalnya seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya Pak?

N: Pertama adalah menangani anak jalanan itu sendiri yang ada di kota Yogyakarta. Sekarang hamper tidak ada anak jalanan di kota Yogyakarta, tetapi kita tidak serta merta kita lepas atau kegiatan di lepas. Tetap penanganan anjal basis masyarakat kita tangani anaknya kita jangkau, kita assessment, kita data, dokumentasi, diminta pernyataan di tiap-tiap sudut kota sesuai dengan wilayah kita. Selain itu anaknya kita latih tambal ban, sablon, potong rambut, sesuai permintaannya anak ini kita berdayakan

supaya punya masa depan tidak dijalan terus. Harapan kita seperti itu dan Alahmdullilah anak jalanan sekarang sudah tidak ada kalau di kota ya mba. Terus yang kedua orang tuanya, kalau kita menangani anaknya tetapi tidak bisa orang tuanya sama aja sia-sia. Karena anak sampai di jalan itu karena tidak nyaman dirumah, dia mungkin makannya kurang, tidak sekolah, banyak factor seperti itu. Sehingga kita menjangkau ke orang tua anak jalanan kita adakan *home visit*. Disana kita data, kita adakan Tanya jawab banyak banget hal, sehingga orang tuanya bisa cerita ke kita ke tim tadi “Jane ngopo to kok anake bisa kayak gitu tadi” tentunya banyak persoalan, ada yang orang tuanya *broken home*, mungkin bapaknya menceraikan atau di tinggal tanpa alasan padahal anaknya sudah banyak. Itu alasan klasik sejak kita data orang tuanya juga kita berdayakan, kita *treatment* orang tuanya kita kasih ketrampilan jual angkringan, apa gorengan kita kasih modal usaha. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat sendiri, masyarakat ini tidak boleh dia cuek kalau ada anak jalanan, ada orang tua yang tidak bergaul karena dia minder biasanya orang tua yang kemampuan ekonomi tidak mampu dia minder. Tanpa tingkat partisipasi lingkungannya anak-anak ini orang tuanya tidak akan mentas. Kita rangkul waktunya sholat ya kita ajak, kita libatkan kerjabakti bareng-bareng gotong royong. Itulah bentuk tanggung jawab lingkungan kalau kita cuek anak itu mala jadi mungkin ke narkoba dan sebagainya. Itu tiga poinnya, tetapi pelaksanaan kita menjangkau di wilayahkan tidak serta merta anak jalanan tok. Ada gelandangan, pengemis, pengamen itu dari Dinas karena terbitnya Perda kita tambah pekerjaan menjangkau gelandangan dan pengemis tetapi di perbatasan-perbatasan. Karena wilayahnya luas kita adakan komunikasi berjaring dengan teman-teman di Kabupaten sehingga bisa menjangkau di luar Kota. Tetapi karena terkait dengan anggaran tim kita tidak banyak yang dilibatkan setiap bulan dari kita dimintai 2 orang dalam rangka mendata di camp assessment. Karena pada aturannya PSM itu bukan sebagai eksekutor, kita hanya mitra yang maturi dengan sopan pendekatan personal karena tanpa itu tidak bisa.

Satu bulan dua bulan tiga bulan tidak akan bisa kalau gak kenal, tetapi PSM kan kenal mereka sudah cerita banyak ke PSM.

4. P: Pendataan yang di lakukan PSM tadi bagaimana sistem monitoringnya Pak?

N: Data yang terkumpul setiap tiga bulan kita setor ke Dinas. Kita adakan evaluasi bagaimana kendala apa solusinya, tiap tiga bulan sekali kita adakan rapat di tingkat koordinator sehingga kita memberikan kebijakan itu pas.

5. P: Pelaksanaan yang berjalan selama ini bagaimana prosesnya pak?

N: Selama ini memang berat mba, tidak semudah yang dikira menangani gelandangan dan pengemis. Kalau yang diluar kota kita kembalikan ke asalnya. PSM ikut kesana kita di fasilitasi oleh Dinas.

6. P: Jadi koordinasinya tetap dari Dinas Sosial atau gimana pak?

N: Iya tetap dari Dinas Sosial, mereka memberikan surat antar Dinas Sosial. Misalnya kita mengembalikan di Temanggung, Surabaya, Jakarta, itu sebelumnya Dinas Sosial harus komunikasi aktif ke Dinas sana. Karena tanpa itu kita akan sulit di terima di sana. Harapan kita ketika dikembalikan di kelola disana, agar tidak balik ke Yogya. Tetapi pada saat saya mengembalikan di Semarang ternyata saya belum sampai Yogya orangnya sudah sampai sini. Berarti tidak berhasil disana di biarkan saja, padahal dari sini kita *sangoni*, kita kasih seragam. Kita ajarkan bagaimana disiplin dalam masyarakat, bagaimana rajin beribadah, kita ajak olahraga pagi, banyak hal yang kita ajarkan tetapi semua tidak mudah seperti itu. Kalau kita tidak konsen kesana siapa yang mau ngurusin mereka anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Bulan kemarin kami PSM di beri tugas medata *homeless* orang-orang yang tidak punya tempat tinggal dan tidur di sudut-sudut kota. Kita data target selama dua minggu tapi selama seminggu sudah selesai mendata 450 lebih.

7. P: Selain tadi apalagi kegiatan PSM terkait Perda Gepeng Pak?

N: Kita sebagai mitra Dinas Sosial, kita juga aktif mengadakan komunikasi berjaring melibatkan karang taruna, ibu-ibu pkk untuk pemberitahuan Perda Gepeng itu sendiri dan pemberdayaan.

8. P: Untuk tim PSM sendiri sebelumnya dilatih atau gimana pak?

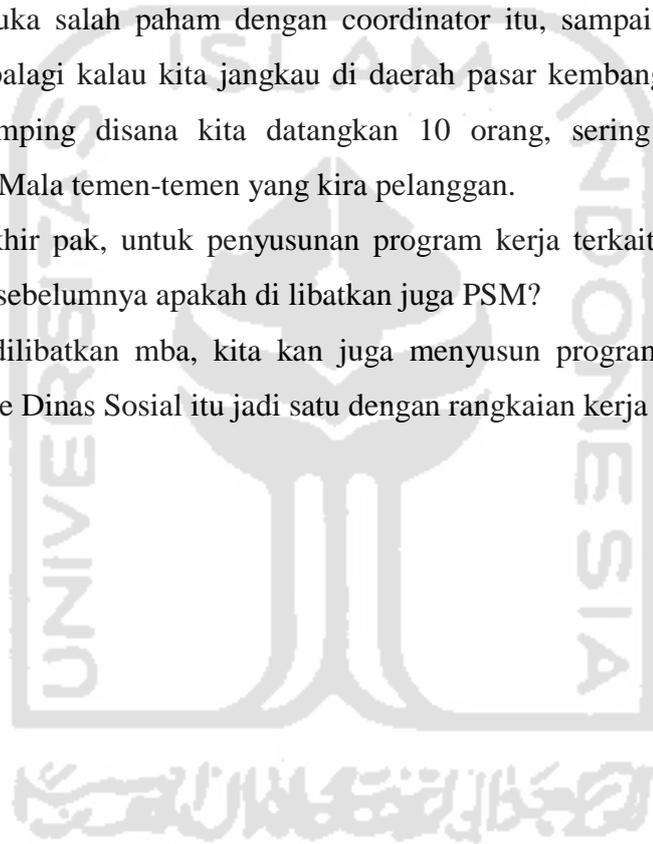
N: Iya dilatih mba, namanya bimbingan social dasar dan bimbingan social lanjut, termasuk kode etiknya. Temen-temen sekarang sudah menikmati pekerjaan di lapangan.

9. P: Selama ikut pelaksanaan Perda Gepeng apa kendala untuk PSM sendiri?

N: Begini mba kadang-kadang untuk menjangkau gepeng sendiri dengan alasan klasik mereka kita jangkau nanti *ngeyel* balik lagi. Apalagi kalau ada yang koordinir yang nge drop pakai mobil kadang-kadang temen-temen suka salah paham dengan coordinator itu, sampai mau berantem juga. Apalagi kalau kita jangkau di daerah pasar kembang itu kan ngeri. Kita damping disana kita datangkan 10 orang, sering keluar masuk sarkem. Mala temen-temen yang kira pelanggan.

10. P: Terakhir pak, untuk penyusunan program kerja terkait Perda Gepeng setahun sebelumnya apakah di libatkan juga PSM?

N: iya dilibatkan mba, kita kan juga menyusun program proposal kita ajukan ke Dinas Sosial itu jadi satu dengan rangkaian kerja Dinas Sosial.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Mugi Rahayu
Jabatan : Ketua Paguyuban Warga Kitren Kota Gede
Keterangan : P = Penelit, N = Narasumber
Lokasi : Rumah Pak Mugi Rahayu, Kitren, Prenggan, Kota Gede,
Yogyakarta
Tanggal : 4 Januari 2017
Durasi : 50 Menit

1. P: Assalamualaikum pak, sebelumnya perkenalan diri dulu tentang bapak?

N: Walaikumsalam, saya Mugi Rahayu, ketua paguyuban warga kitren dan pemuda pemudi kitren selama 7 tahun. Jadi di kitren ada dua paguyuban yang satu untuk pemuda-pemudi yang satunya lagi untuk seluruh warga. Warga paguyuban terdiri dari 3 RT.
2. P: Baik pak, untuk program kerja paguyuban kitren selama ini apa saja?

N: Untuk programnya, disini ada kerja bakti tiap hari minggu “slapanan hari” itu melibatkan semua warga dari 3 RT. Kumpul warga tiap hari jumat “slapanan hari”, yang dibicarakan ya macam-macam masalah social, keamanan di lingkungan kitren. Program untuk pemuda-pemudi mereka yang memfasilitasi kerja bakti, kumpul warga, pokoknya kalau ada kegiatan warga mereka yang menyiapkan. Ada juga pelatihan computer kerjasama dengan SD Muh. Kleco Kota Gede, pelatihannya untuk semua warga, bapak-bapaknya pelatihan *word*, pemudanya minta di latih *corel*.
3. P: Selain program tadi, pernah gak paguyuban kitren bekerjasama dengan instansi Pemerintah, khusus Dinas Sosial atau PMS untuk sosialisasi perda gepeng?

N: Pernah mba, dulu saya di undang ke kecamatan untuk sosialisasi Perda Gepeng. Setelah itu mereka “matur” untuk dilibatkan di kegiatan kami untuk sosialisasi. Pas kumpul warga itu mereka datang ada 3 orang bagi brosur tentang penanganan gepeng. Disinikan ada salah satu warga yang terlibat jadi pengamen, dia dicurigai sering mencuri soalnya banyak hewan

peliharaan yang hilang misalnya ayam, burung. Sama warga kitren anak ini malah kami rangkul, dilibatkan disemua kegiatan, tetap diajak *sharing*, ya gimana caranya biar dia gak ngamen lagi. Kalau PSM seingat saya sering kerumahnya silaturahmi sama keluarganya, ngobrol sama anaknya yang pengamen. Ya anaknya gak langsung mau mba, ada dua bulanan di datengin terus anaknya. Dari warga sendiri kita nyari solusi juga buat dia, kita carikan pekerjaan, kebetulan deket sinikan ada makam, nah sementara dia ngurusi itu, Alhamdulillah anaknya mau. Kalau dari Dinasnya kitren diberi pelatihan mba, sablon sama keripik pisang. Pelatihannya 3 hari, banyak yang ikut pemudanya kan pada seneng sablon. Kalau keripik ya buat ibu-ibu. Terus di hadiahi 3 perangkat sablon itu masih dipakai sampai sekarang di tempatnya mas Galih, 5 perangkat keripik di bagi ke tiga RT.

4. P: Untuk kasus tadi berarti berhasil anaknya berhenti mengamen, kalau untuk tetep mengawasi supaya kasus yang sama tidak terjadi lagi, apakah melibatkan PSM juga atau dari warga sendiri?

N: Iya berhasil mba, kalau dari paguyuban sendirikan sudah punya program kerja yang tujuannya warga saling menjaga peduli satu sama lain, tetap ngayomilah. Warga sini yang ngawasi nanti kalau kejadian lagi kita laporkan, sayakan rutin di undang ke kecamatan nanti disana saya laporkan biar Dinasnya menangani. Tapi warga pokoknya tetap menjaga jangan sampai kejadian lagi.



Papan Himbauan Perda Gepeng di kota Yogyakarta

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Papan Himbauan Perda Gepeng di kota Yogyakarta

Sumber: Dokumentasi Pribadi



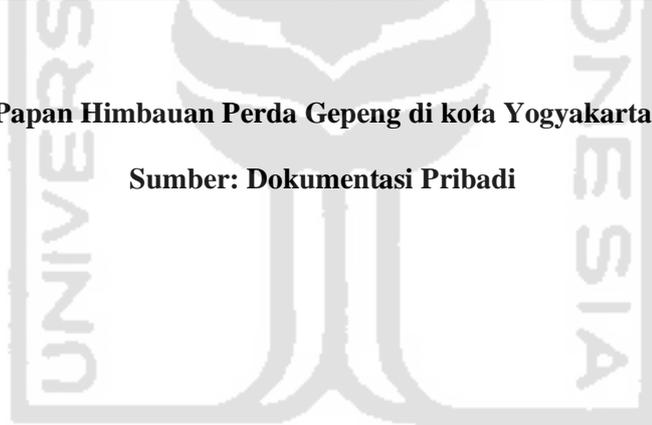
Papan Himbauan Perda Gepeng di kota Yogyakarta

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Papan Himbauan Perda Gepeng di kota Yogyakarta

Sumber: Dokumentasi Pribadi





Papan Himbauan Perda Gepeng di kota Yogyakarta

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Papan Himbauan Perda Gepeng di kota Yogyakarta

Sumber: Dokumentasi Pribadi

